



PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN



BAPPELTBANG
KABUPATEN TAPIN

RPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Bertanggung Jawab, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**# bangga
melayani
bangsa**



2024 - 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD dengan mengacu pada:
 - a. RKP;
 - b. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. hasil evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023; dan
 - d. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM |
| BAB III | : | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS |
| BAB V | : | TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB VI | : | STRATEGI, ARAH KEBLIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS |
| BAB VII | : | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| BAB IX | : | PENUTUP |

Pasal 4

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada APBD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati atau Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;

- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
 - c. evaluasi terhadap RPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. terjadinya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan dalam hal sisa masa berlaku RPD kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal RPJMD belum ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Maret 2023



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 05



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I- 9
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-16
	1.5. Sistematika Penulisan	I-17
BAB II	GAMBARAN UMUM	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin.....	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-43
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-78
	2.2. Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	II-84
	2.3. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.....	II-94
	2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin	II-103
	2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin	II-105
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-4
	3.1.2. Neraca Daerah.....	III-17
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-24
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-25
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-28
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-29
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	III-30
	3.3.2. Proyeksi Pembiayaan.....	III-43
	3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-45
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
	4.2. Isu – Isu Strategis	IV-19
	4.2.1. Isu Strategis Internasional	IV-20



4.2.2. Isu Strategis Nasional.....	IV-26
4.2.3. Isu Strategis Regional.....	IV-37
4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tapin.....	IV-50
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	V-1
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1. Strategi	VI -1
6.2. Arah Kebijakan	VI-6
6.3 Program Prioritas Daerah	VI-13
6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	VI-40
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-5
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan.....	VIII-1
8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VIII-2
8.1.3. Indikator Kinerja Kunci.....	VIII-3
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I – 10
Gambar I.2	Keselarasan Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.....	I – 11
Gambar I.3	Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalsel dan Tujuan RPD Kabupaten Tapin.....	I- 12
Gambar I.4	Keselarasan Arah Pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Tapin Terhadap Tujuan RPD Tahun 2024 -2026	I -13
Gambar I.5	Hubungan Antara RPD dan Renstra PD Kabupaten Tapin	I -14
Gambar I.6	Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ...	I -15
Gambar I.7	Hubungan Antara RPD dan TPB	I -16
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II -3
Gambar II.2	Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin.....	II -69
Gambar II.3	Galeri Tamasa Kabupaten Tapin	II -69
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	III - 6
Gambar III.2	Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	III - 7
Gambar III.3	Realisasi Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	III-11
Gambar IV.1	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.....	IV- 3
Gambar IV.2	Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	IV-5
Gambar IV.3	Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	IV-6
Gambar IV.4	Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	IV-7
Gambar IV.5	Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	IV-8
Gambar IV.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.....	IV-9
Gambar IV.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	IV-11
Gambar IV.8	Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022	IV-12



Gambar IV.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022	IV-13
Gambar IV.10 Kompetensi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2021	IV- 14
Gambar IV.11 Peta Pengembangan Wilayah Kalimantan	IV- 34
Gambar V.1 Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan RPJPD Periode Ke IV ..	V- 3
Gambar VI.1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.....	VI- 6
Gambar VI.2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tapin	VI-41



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapin	II - 2
Tabel II.2	Luas Wilayah Menurut Ketinggian (Mdpl).....	II - 4
Tabel II.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng	II - 4
Tabel II.4	Luas Rantau Dan Persentase Kota Rantau Berdasarkan Fungsi Dan Tipologi.....	II-9
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2020 – 2022.....	II-28
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-30
Tabel II.7	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tapin 2021-2022.....	II-31
Tabel II.8	Tingkatan Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Tapin Tahun 2022	II-32
Tabel II.9	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tapin Tahun 2022.....	II-32
Tabel II.10	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tapin Tahun 2022.....	II-33
Tabel II.11	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	II-37
Tabel II.12	IPM Kabupaten Tapin Menurut Komponen Tahun 2019 – 2022	II -38
Tabel II. 13	IPM Kabupaten Tapin Menurut Wilayah Tahun 2019 – 2021 ...	II-39
Tabel II.14	IPM Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2022	II- 39



Tabel II. 15	Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	II- 40
Tabel II. 16	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin dan Prov. Kalsel Tahun 2018-2022.....	II- 41
Tabel II.17	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022	II- 42
Tabel II.18	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022	II- 43
Tabel II.19	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2021	II- 44
Tabel II.20	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022	II- 44
Tabel II.21	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022	II- 45
Tabel II.22	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapin 2017 - 2022	II- 46
Tabel II.23	Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021	II- 46
Tabel II.24	Proporsi Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi, Kondisi dan Status Jalan Tahun 2022	II- 49
Tabel II.25	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kabupaten Tapin	II- 52
Tabel II.26	Angka Partisipasi Pelayanan Eksisting Jaringan air Minum Perpipaan di Kabupaten Tapin Tahun 2021	II- 54
Tabel II.27	Data Rekapitulasi Pelayanan Air Minum Layak di Kabupaten Tapin Tahun 2021	II- 56
Tabel II.28	Jumlah Kekuatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tapin Tahun 2022	II- 60
Tabel II.29	Rasio Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tapin Tahun 2017- 2021	II- 60
Tabel II.30	Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021	II- 62



Tabel II.31	PMKS Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Tapin Tahun 2021	II- 63
Tabel II.32	PMKS Penerima Bantuan terdampak Covid-19 di Kabupaten Tapin Tahun 2021	II- 63
Tabel II.33	Penanganan & Pengurangan Sampah di Kabupaten Tapin 2018-2022	II- 66
Tabel II.34	Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	II- 67
Tabel II.35	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	II- 67
Tabel II.36	Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2022	II- 68
Tabel II.37	Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2022	II- 68
Tabel II.38	Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2022	II-70
Tabel II.39	Produktivitas Padi Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2022.....	II- 72
Tabel II.40	Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022.....	II- 75
Tabel II.41	Skor Kinerja LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2016-2019.....	II- 75
Tabel II.42	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Tapin Tahun 2019- 2022	II- 76
Tabel II.43	Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	II- 76
Tabel II.44	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	II- 77
Tabel II.45	Persentase Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tapin Tahun 2019–2022	II- 79
Tabel II.46	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Tapin Tahun 2019 –2021	II- 81
Tabel II.47	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih di Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2021.....	II- 81



Tabel II.48	Rasio Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Tapin Tahun 2021.....	II- 83
Tabel II.49	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2010 dan 2020	II- 83
Tabel II.50	Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.....	II- 87
Tabel II.51	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.....	II- 88
Tabel II.52	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022.....	II - 94
Tabel II.53	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022.....	II- 103
Tabel 2.54	Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022.....	II- 106
Tabel II.55	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021.....	II- 107
Tabel II.56	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2021.....	II- 122
Tabel II.57	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan Kabupaten Tapin Tahun 2021.....	II- 130
Tabel II.58	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Tapin Tahun 2021	II- 137
Tabel III.1	Skala Interval Otonomi Fiskal.....	III - 3
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III - 4
Tabel III.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	III - 9
Tabel III.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III - 13
Tabel III.5	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III - 16
Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021.....	III - 18
Tabel III.7	Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	III - 21



Tabel III.8	Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	III - 22
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021.....	III - 23
Tabel III.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021.....	III - 24
Tabel III.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	III - 24
Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	III- 26
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan .Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III-27
Tabel III.14	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	III-28
Tabel III.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III-28
Tabel III.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III-29
Tabel III.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	III-29
Tabel III.18	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026.....	III-34
Tabel III.19	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026.....	III-38
Tabel III.20	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026.....	III - 42
Tabel III.21	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026.....	III- 44
Tabel III.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026.....	III-46
Tabel III.23	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026	III-47
Tabel IV.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	IV-16



Tabel IV.2	Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	IV-17
Tabel IV.3	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD.....	IV-37
Tabel IV.4	Rencana Pusat-Pusat Permukiman Perdesaan (PPL)	IV-45
Tabel IV.5	Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin.....	IV-48
Tabel V.1	Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	V-6
Tabel V.2	Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	V-8
Tabel V.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	V-12
Tabel V.4	Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 -2026	V-17
Tabel V.5	Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 -2026	V-33
Tabel V.6	Penanggung Jawab Utama Indikator Kinerja Utama Daerah dan Penanggung Jawab Data dan Pelaporan Indikator Kinerja Utama Daerah.....	V-42
Tabel VI.1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026	VI-2
Tabel VI.2	Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026	VI-9
Tabel VI.3	Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program pembangunan daerah beserta target dan pagu Tahun 2024-2026	VI-14
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)	VII-3
Tabel VII.2	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan).....	VII-4
Tabel VII.3	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	VII-5
Tabel VIII.1.	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VIII-2
Tabel VIII.2.	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VIII-3
Tabel VIII.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VIII-6



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Piramida Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2022	II -30
Grafik II.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2022.....	II -34
Grafik II.3	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	II -35
Grafik II.4	Rasio Gini Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2022	II -36
Grafik II.5	Prevalensi Stunting di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2021	II- 47
Grafik II.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	II- 65
Grafik II.7	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	II- 66
Grafik II.8	Produksi Perikanan Darat (Ton) di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021.....	II -70
Grafik II.9	Grafik Konsumsi Ikan di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2021.....	II -71
Grafik II.10	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022	II -71
Grafik II.11	Kontribusi Sektor Pertanian ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	II- 73
Grafik II.12	Kontribusi Sektor Industri Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	II- 74
Grafik II.13	Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tapin Tahun 2010-2021.....	II- 77



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Tapin merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada tanggal 30 November 1965 di lapangan Kabupaten (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI Soemarno Sosroatmodjo atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965, dengan Pusat Pemerintahan di Rantau. Rantau memiliki beberapa tempat wisata yaitu Batu Hapu, Bukit Talikur, kemudian berbagai olahan kuliner yang khas dan unik yaitu kue Ipau Basumap (pizza Banjar), Patin Baubar dll. Pembangunan Kabupaten Tapin terus dilaksanakan hingga saat ini, berbagai capaian pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat Tapin. Dengan perkembangan globalisasi yang begitu dahsyatnya, membuat Pemerintah Daerah harus lebih bergerak cepat dalam menyikapi kondisi, tantangan dan permasalahan yang ada. Permasalahan pembangunan harus mampu diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat dan akurat. Kebijakan pembangunan daerah ini dirumuskan dan disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun 2023–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di Tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.



Kabupaten Tapin merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di Tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Tapin harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005–2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tapin dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional. RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005–2025 dengan Visi: “Tapin yang Religius dan Sejahtera”. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024–2026.

Penetapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Tapin dan Renstra Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 mengacu pada pokok pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 sebagai tahap akhir untuk mencapai visi “Tapin yang Religius dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin juga harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk menjaga sinergitas dan sinkronasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu – isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang akan berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode



berikutnya menjadi sumber acuan. Untuk menjaga sinergitas tujuan pembangunan, maka Rencana Pembangunan Daerah Tapin Tahun 2024–2026 harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Target indikator makro sekurang-kurangnya sama dengan target yang telah ditentukan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Tapin. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga harus memerhatikan isu–isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk periode 2024–2026 yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD pada pelaksanaan tiap Tahunnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk menjaga sinergitas dan sinkronasi antara RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah maka setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 disusun agar dapat mengakselerasi percepatan pemulihan pembangunan pasca Pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian indikator serta target pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Sehingga tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin dapat segera terwujud.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);



18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);



35. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 memperhatikan:

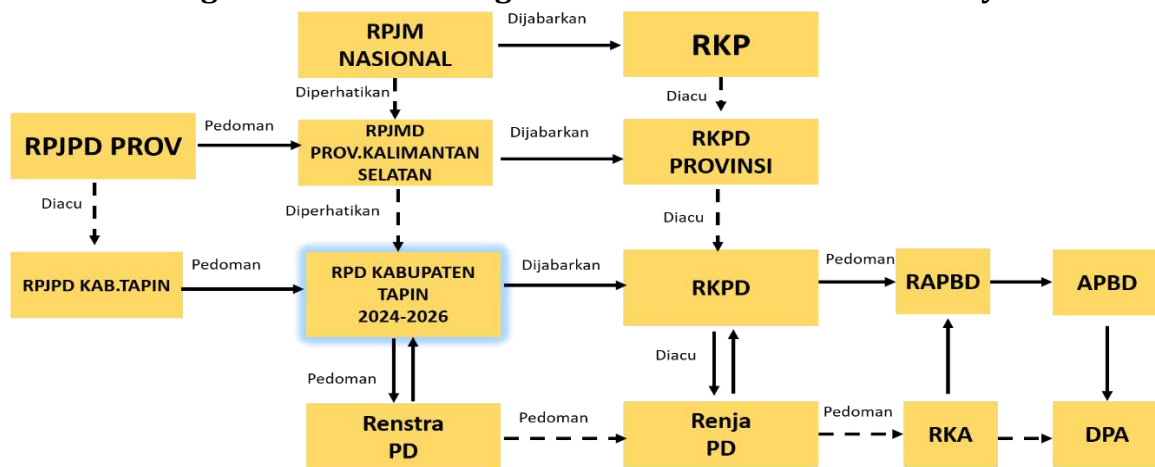
1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pada tahap keempat RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan Nasional; dan
6. Regulasi yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional, sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD) membentuk suatu arsitektur kinerja perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD



dilaksanakan melalui RPJMD dan RPD, kemudian RPJMD dan RPD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Dalam implementasinya, dokumen RPD Kabupaten Tapin perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional. Sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan, adapun keterkaitan antara RPD dan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar I.1
Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

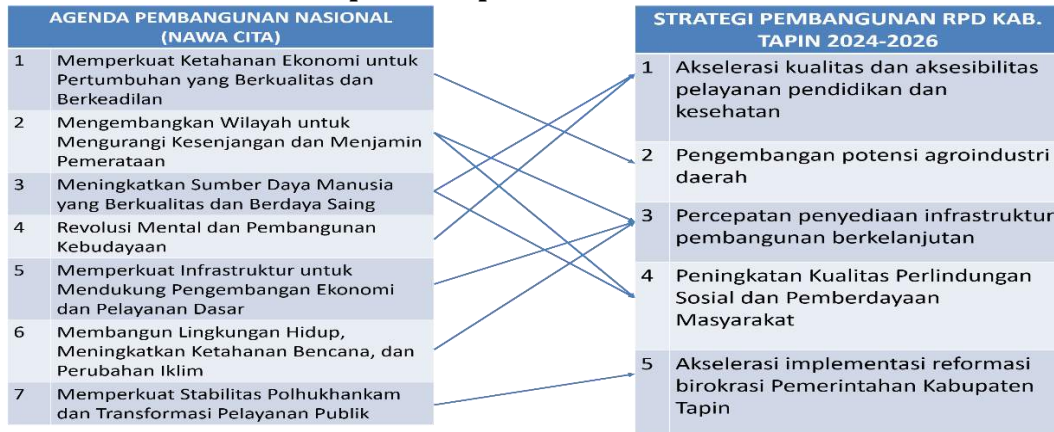


a. Hubungan Antara RPD dan RPJMN

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN dengan dokumen RPD Kabupaten Tapin. Dengan memperhatikan visi, misi RPJMN, serta agenda pembangunan, visi RPJMN yang tertuang yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan agenda Nawa Cita Pemerintahan Tahun 2020-2024 yang tersaji pada Hubungan antara RPJMN dan RPD hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar I.2
Keselarasan Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

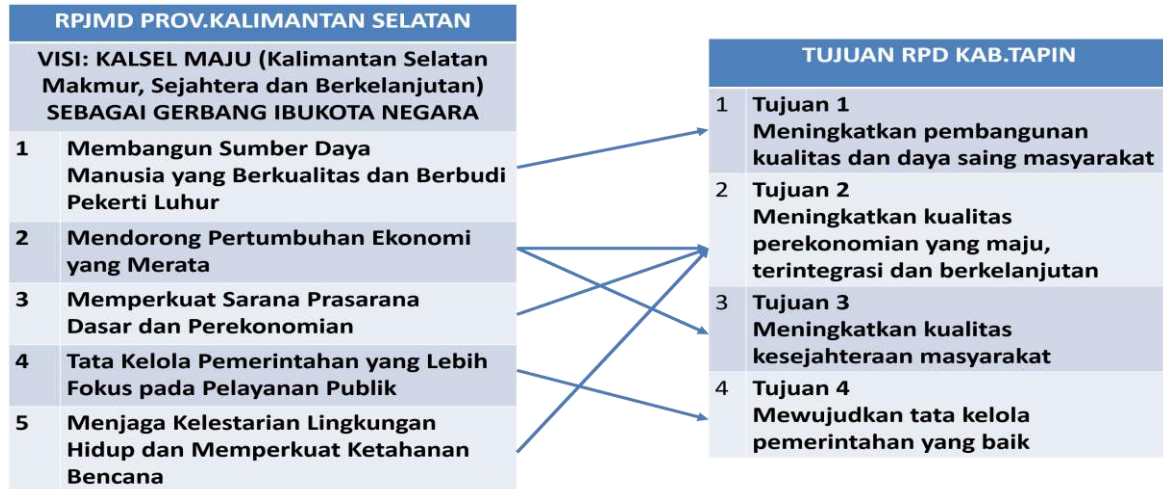


b. Hubungan Antara RPD dan RPJMD/RPD Provinsi Kalimantan Selatan

RPD juga harus memedomani RPJMD/RPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD/RPD Provinsi dan arahan pembangunan Provinsi untuk Kabupaten Tapin yang diamanatkan dalam RPD Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Tapin sudah sejalan, selaras dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan untuk sinkronisasi kebijakan. Berikut disajikan gambar keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan tujuan RPD Kabupaten Tapin.



Gambar I.3
Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan tujuan RPD Kabupaten Tapin



c. Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Tapin

RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025 pada tahap keempat. RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Tapin pada tahun 2025. Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kabupaten Tapin, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dengan maksimal. Menindaklanjuti hal tersebut maka, untuk memperjelasnya disajikan gambar keterkaitan antara arah pembangunan RPJPD dan Goals/Tujuan yang akan dicapai dalam dokumen RPD sebagai berikut:



Gambar I.4
Keselarasan arah pembangunan Tahap IV RPJPD Kab. Tapin terhadap Tujuan RPD Tahun 2024-2026



d. Hubungan Antara RPD dengan Renstra PD Kabupaten Tapin

Renstra OPD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun. Implementasi dari RPD Kabupaten Tapin dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah.





Gambar I.5
Hubungan Antara RPD dan Renstra PD Kabupaten Tapin



e. Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPD Kabupaten Tapin 2024-2026 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, dan RKPD Tahun 2026. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah. Memahami pernyataan diatas maka hal tersebut diperjelas dengan gambar dari hubungan RPD dan RKPD dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026, yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar I.6
Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



f. Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Tapin

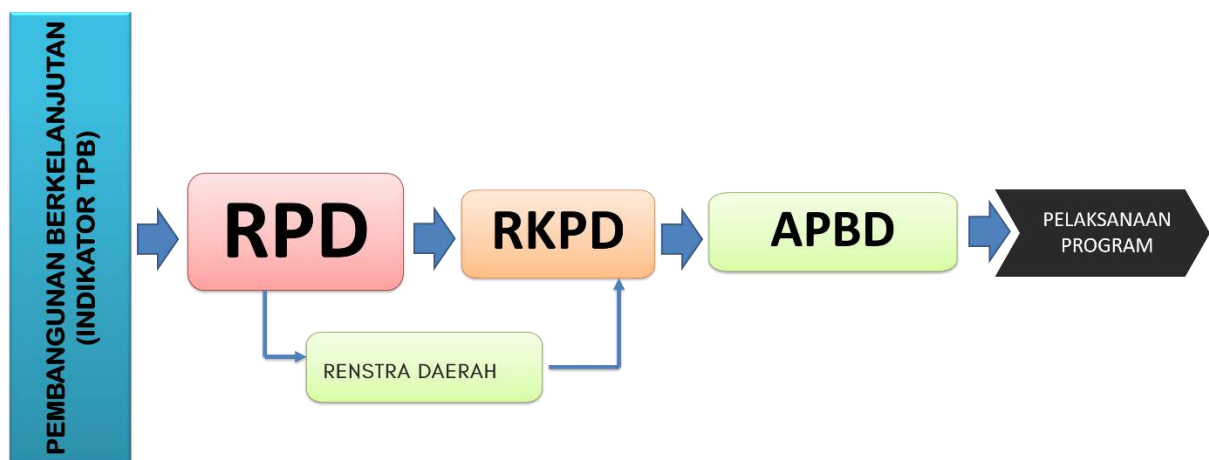
Penyusunan RPD Kabupaten Tapin harus memperhatikan RTRW Kabupaten Tapin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034. Dalam RTRW Kabupaten Tapin dijabarkan, tentang penataan ruang dan pemanfaatan potensi pengembangan wilayah. RTRW menjadi pedoman dalam pembangunan dengan memperhatikan, menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan RTRW, pengembangan tata ruang wilayah disusun dengan memerhatikan kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang serta pengembangan wilayah diintegrasikan dalam RPD untuk menentukan lokasi/titik dalam pembangunan daerah. Sehingga terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang dan wilayah.



g. **Hubungan Antara RPD Kabupaten Tapin dan TPB/Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pembangunan yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan yang akan berjalan sudah sesuai dengan arah koridor pembangunan berkelanjutan. Dalam dokumen TPB mencakup indikator - indikator sebagai tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut dokumen RPD harus mengakomodir indikator - indikator tersebut, sehingga akan terintegrasi dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Memahami hal ini, secara ringkas sebagai gambaran berikut keterkaitan antara RPD dan dokumen TPB disajikan pada gambar berikut:

Gambar I.7
Hubungan Antara RPD dan TPB



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 2026 ini dimaksudkan sebagai untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan hingga Tahun 2026 dan sebagai jembatan bagi Kabupaten Tapin yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di Tahun 2023 untuk memberikan arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen





Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam rencana pembangunan tahunan. RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 disusun dengan tujuan:

1. Memberikan landasan dan pedoman Pejabat Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Tapin selama kurun waktu Tahun 2024–2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat; dan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Tapin.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Tapin sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan yang dilaksanakan dengan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai cascading Bab V.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapin serta pagu anggaran setiap tahunnya.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Tapin 2024-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM



Dalam bagian Kondisi Umum Daerah memuat kondisi riil Kabupaten Tapin. Data dan informasi disajikan berdasarkan Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 5,8 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2022 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel II.1.
Luas Wilayah Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Binuang	132,39	6,09
2	Hatungun	95,60	4,40
3	Tapin Selatan	153,44	7,05
4	Salam Babaris	72,80	3,35
5	Tapin Tengah	309,56	14,23
6	Bungur	91,26	4,20
7	Piani	200,09	9,20
8	Lokpaikat	93,89	4,32
9	Tapin Utara	32,34	1,49
10	Bakarangan	62,57	2,88
11	Candi Laras Selatan	249,61	11,48
12	Candi Laras Utara	681,40	31,33
Jumlah (Total)		2.174,95	100

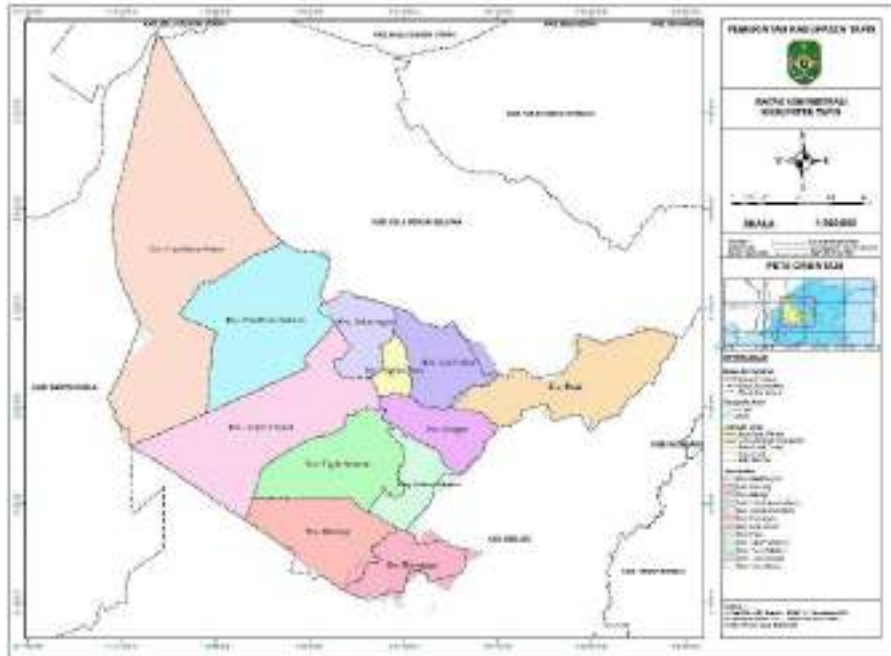
Sumber: Pemerintah Kabupaten Tapin

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam. Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



C. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara



Tabel II.2.
Luas Wilayah Menurut Ketinggian (Mdpl)

No	Kecamatan	0-7 m	>7-25m	>25-100m	>100-150m	>150-500m	>500m	Total
1	Binuang	8258	3991	940	130	0	0	13239
2	Hatungun	0	0	3344	4093	2123	0	9560
3	Tapin Selatan	6566	2975	5803	0	0	0	15344
4	Salam Barbaris	0	0	6411	869	0	0	7280
5	Tapin Tengah	29552	1404	0	0	0	0	30956
6	Bungur	0	3747	4182	1197	0	0	9126
7	Piani	0	0	3640	7260	6488	2621	20009
8	Lokpaikat	1854	3495	3719	321	0	0	9389
9	Tapin Utara	867	2143	224	0	0	0	3234
10	Bakarangan	6257	0	0	0	0	0	6257
11	Candi Laras Selatan	24961	0	0	0	0	0	24961
12	Candi Laras Utara	68140	0	0	0	0	0	68140
Jumlah		146.455	17.755	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase		67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,2	100

Sumber : Kabupaten Tapin dalam angka 2022

Tabel II.3.
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng

No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan					Jumlah (ha)	
		0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%		>40%
1	Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
2	Hatungun	0	264	6,070	2,110	256	860	9,560
3	Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
4	Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
5	Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
6	Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
7	Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
8	Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
9	Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
10	Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
11	CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
12	CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah		179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase		82.46	1.08	5.14	6.85	1.77	2.71	100.00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam angka 2022

D. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari *organosol gleyhumus*, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; *podsolik merah kuning*, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan *Lokpaikat*; *alluvial*, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di



Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, *Lokpaikat* dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

E. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, *Lokpaikat*, Bungur dan *Piani*. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

F. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat jumlah curah hujan berkisar antara 137,4-395.4 mm, dimana curah hujan tertinggi pada bulan November dan curah hujan terendah pada bulan Juli.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 22.9 – 28.9 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, Januari,



Maret dan April. Adapun rata-rata suhu udara tertinggi pada bulan Mei. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 74,9 – 83,4. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Agustus, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

G. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

H. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 memiliki rencana pola ruang terdiri dari:



I. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi:

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungun.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- Kecamatan Salam Babaris;
- Kecamatan Hatungun;
- Hulu Sungai Tapin meliputi:
 - Kecamatan Piani;
 - Kecamatan Bungur; dan
 - Kecamatan Tapin Utara.
- Hulu Sungai Negara meliputi:
 - Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - Kecamatan Candi Laras Selatan.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- **Kawasan Sempadan Sungai**
 - Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 - Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
 - Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 - Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;



- Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar
- Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar.
- **Kawasan Sekitar Danau dan Waduk**
 - Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat
 - Bendungan Tapin di Kecamatan Piani dan
 - Bendung Tapin di Kecamatan Bungur.
- **Kawasan Sekitar Mata Air**
 - Mata air di Desa Hatungun, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Benuang;
 - Mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
 - Mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
 - Mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.
- **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.



Tabel II.4.

Luas Rantau Dan Persentase Kota Rantau Berdasarkan Fungsi Dan Tipologi

No	Nama RTH	Luas (M ²)	Fungsi	Tipologi
1	RTH Pasar Keraton	4.218,97	Pasif	RTH
2	Eks Terminal Cangkring	2.097,12	Aktif	RTH
3	RTH Perumnas Mustika	595,05	Pasif	RTH
4	RTH Perumns Haur Kuning	700,28	Pasif	RTH
5	RTH Perumnas Labuan Permain	4.125,80	Pasif	RTH
6	RTH Pasar Ikan	13.705,88	Aktif	RTH
7	RTH Rantau Baru (Danau Buatan)	45.759,83	Aktif	RTH
8	Alun-alun di Kawasan Rantau Baru	11.418,15	Aktif	RTH
9	Fasilitas Olah Raga Rantau Baru	67.032,44	Aktif	RTH
10	Hutan Kota Rantau Baru	9.536,17	Pasif	RTH
11	Islamic Center Kawasan Rantau Baru	45.118,15	Aktif	RTH
12	Kawasan Perkantoran Rantau Baru	71.358,45	Pasif	RTH
13	Kawasan Stadion Datu Muning	67.377,12	Aktif	RTH
14	Halaman Kolam Renang Galuh Diang Bulan	14.141,27	Aktif	RTH
15	Lapangan Dwi Dharma	16.054,58	Aktif	RTH
16	Taman 17 Mei	3.246,88	Aktif	RTH
17	Taman Maunjun	6.311,60	Aktif	RTH
18	Taman Kuda	2.164,19	Pasif	RTH
19	Halaman Mesjid Humas	2.026,36	Pasif	RTH
20	Halaman Mesjid Nurul Falah	389,07	Pasif	RTH
21	Taman Samping Mesjid Nurul Falah	5.995,89	Aktif	RTH
22	Monumen Perjuangan Tasan Panyi	92,59	Aktif	RTH
23	Bundaran Dulang	773,72	Pasif	Jalur Hijau
24	Pulau Jalan Bundaran Dulang	1.218,35	Pasif	Jalur Hijau
25	Median Jalan Datu Nuraya	4.361,52	Pasif	Jalur Hijau
26	Bundaran Jalan Rantau Baru	1.071,29	Pasif	Jalur Hijau
27	Median Jalan Datu Suban	2.442,77	Pasif	Jalur Hijau
28	Median Jalan Hasan Basery	1.734,60	Pasif	Jalur Hijau
29	Median Jalan H Isbat	3.093,84	Pasif	Jalur Hijau
30	Median Jalan KCM	541,48	Pasif	Jalur Hijau
31	Median Jalan Pasar Keraton	1.408,18	Pasif	Jalur Hijau
	TOTAL	410.111,59		

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2021

*Hasil Registrasi

**Hasil Proyeksi

**d. Kawasan cagar budaya**

Kawasan cagar budaya meliputi:

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam TasanPanyi di Kecamatan Tapin Utara; Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Masjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur; Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- Masjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.

e. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- Kawasan rawan longsor
 - Kecamatan Bungur;
 - Kecamatan Piani; dan



- Kecamatan Hatungun.
- Kawasan rawan banjir
 - Kecamatan Candi Laras Utara;
 - Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - Kecamatan Tapin Tengah.

f. Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

g. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi Hutan Produksi Tetap (HP)

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
2. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
3. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;
4. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.

▪ **Hutan Produksi Konversi (HPK)**

Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi Laras Utara.

▪ **Hutan Produksi Terbatas (HPT)**

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.



2. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- Kawasan peruntukan tanaman pangan

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

- Kawasan pertanian lahan basah

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

- Kawasan pertanian lahan kering

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:

- 1) Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- 2) Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- 3) Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- 4) Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;
- 5) Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- 6) Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- 7) Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.

J. Kawasan tanaman pangan berkelanjutan

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



➤ **Kawasan peruntukan hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

- a. Komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
 2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
 7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- b. Komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
- c. Komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.



➤ **Kawasan peruntukan peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:

- a. Ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
 1. Ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
 2. Ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- b. Ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi.
 1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Bungur;
 6. Kecamatan Piani; dan
 7. Kecamatan Tapin Utara.



- c. Ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampak langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:
1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Bakarangan;
 4. Kecamatan Lokpaikat;
 5. Kecamatan Piani;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 7. Kecamatan Candi Laras Utara
 8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. Aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah;
 4. Kecamatan Bakarangan.
- e. Kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah;
 4. Kecamatan Bakarangan.
- **Kawasan peruntukan perkebunan**
- Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:



- a. Kawasan perkebunan besar;
 - b. Kawasan perkebunan rakyat.
- **Kawasan peruntukan perikanan**
1. Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Kawasan pengolahan ikan.
 2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Bakarangan;
 - d. Kecamatan Tapin Tengah;
 - e. Kecamatan Tapin Selatan;
 - f. Kecamatan Tapin Utara;
 - g. Kecamatan Lokpaikat
 - h. Kecamatan Binuang; dan
 - i. Kecamatan Bungur.
 3. Kawasan Pengolahan ikan meliputi :
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Bakarangan
- d. Kawasan peruntukan pertambangan**
1. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. Mineral logam;
 - b. Mineral bukan logam;
 - c. Batuan; dan
 - d. Batu bara.



2. Mineral logam meliputi:

a. Emas meliputi:

1. Desa Kalumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
2. Desa Miawa Kecamatan Piani.

b. Mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan

c. Besi terdapat di Kecamatan Piani.

3. Mineral bukan logam meliputi:

a. Intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;

b. Kaolin meliputi:

- 1) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- 2) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
- 3) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
- 4) Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
- 5) Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.

c. Batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:

- 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
- 2) Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
- 3) Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang;
- 4) Desa Bungur Kecamatan Bungur;
- 5) Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
- 6) Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat

d. Batu gamping kapur meliputi:

- 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
- 2) Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun
- 3) Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang.
- 4) G. Tarungin Kecamatan Hatungun;
- 5) G. Kapayang;
- 6) G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
- 7) G. Talikur Kecamatan Bungur;
- 8) G. Barung Kecamatan Piani;
- 9) G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
- 10) Desa Baramban Kecamatan Piani;



- 11) Desa Talikur Kecamatan Bungur;
- 12) Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur;
- 13) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
- 14) Sandar Kecamatan Salam Babaris;
- 15) Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
- 16) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
- 17) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.

e. Batu pasir kuarsa meliputi:

- 1) Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
- 2) G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
- 3) G. Galumbang;
- 4) Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
- 5) Sido Mukti Kecamatan Hatungun;
- 6) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
- 7) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- 8) Karang Nangka Kecamatan Hatungun
- 9) Tungkap Kecamatan Binuang.
- 10) Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
- 11) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
- 12) Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
- 13) Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
- 14) Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
- 15) Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.

f. Fosfat Meliputi:

- 1) Desa Beramban Kecamatan Piani;
- 2) Desa Talikur Kecamatan Piani;
- 3) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
- 4) Kecamatan Piani; dan
- 5) Kecamatan Salam Babaris



4. Batuan meliputi:
 - a. Granit meliputi:
 - 1) G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
 - 2) G. Karau Kecamatan Piani;
 - 3) G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
 - 4) G. Hatalayang Kecamatan Piani;
 - 5) Desa Harakit Kecamatan Piani;
 - 6) Desa Batung Kecamatan Piani;
 - 7) Desa Bagandah Kecamatan Piani;
 - 8) Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
 - 9) Desa Ranai Kecamatan Piani.
 - b. Andesit meliputi:
 - 1) G. Bagak – Asam Randah Kecamatan Hatungun;
 - 2) G. Batu Belawang;
 - 3) G. Haripit Kecamatan Hatungun;
 - 4) G. Batuago Kecamatan Hatungun;
 - 5) Desa Hariaman Kecamatan Piani;
 - 6) Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
 - 7) Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;
 - c. Marmer meliputi
 - 1) Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
 - 2) Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.
 - d. Pasir meliputi:
 - 1) Desa Shabah Kecamatan Bungur;
 - 2) Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
 - 3) Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
 - 4) Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.



- e. Tanah urug meliputi:
 - 1) Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
 - 2) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 3) Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
 - 4) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang;
 - 5) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
 - 6) Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
 5. Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Tapin Selatan;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Salam Babaris; dan
 - e. Kecamatan Lokpaikat.
 6. Kawasan pertambangan seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perizinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kawasan peruntukan permukiman**
1. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. Permukiman perkotaan; dan
 - b. Permukiman perdesaan.
 2. Permukiman perkotaan meliputi:
 - a. Permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
 - 1) Kecamatan Tapin Utara;
 - 2) Kecamatan Binuang; dan
 - 3) Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - b. Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
 - 1) Kecamatan Bakarangan;
 - 2) Kecamatan Lokpaikat;



- 3) Kecamatan Bungur;
 - 4) Kecamatan Piani;
 - 5) Kecamatan Salam Babaris;
 - 6) Kecamatan Hatungun;
 - 7) Kecamatan Tapin Selatan;
 - 8) Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - 9) Kecamatan Candilaras Utara.
3. Permukiman perdesaan terdiri atas:
- a. Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

f. Kawasan peruntukan industri

1. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a. Industri besar;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri kecil dan mikro.
2. Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
3. Kawasan industri menengah meliputi:
 - 1) Industri minyak kelapa sawit meliputi: Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - 2) Kecamatan Candi Laras Selatan.
4. Industri pengolahan karet *crumb rubber* di Kecamatan Tapin Selatan; dan Industri *bricket* batu bara di Kecamatan Tapin Selatan
5. Kawasan industri kecil dan mikro meliputi:
 - a. Kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b. Agro-industri di Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan;



- c. Sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
- d. Industri perikanan terbatas di Kecamatan Candi Laras Utara;
- e. Industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kawasan peruntukan pariwisata

1. Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - a. Wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - b. Wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - c. Wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - d. Wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
 - e. Wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
 - f. Wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
 - g. Wisata alam Peranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
 - i. Wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
 - j. Wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candilaras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
 - k. Wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
 - l. Wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.





3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata budaya:
 - 1) Perahu Naga di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 2) Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara;
 - 3) Situs Candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - 4) Aruh Ganal di Kecamatan Piani.
 - b. Kawasan wisata religius:
 - 1) Makam Datu Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Makam Syekh Salman Al Farisi di Kecamatan Bakarangan;
 - 3) Majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
 4. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di Kecamatan Candi Laras Selatan.
- h. Kawasan peruntukan lainnya**
 1. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Kawasan pertahanan dan keamanan.
 2. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas:
 - a. Fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
 - 1) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;
 - 2) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kecamatan; dan
 - 3) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.



- b. Fasilitas pendidikan meliputi:
- 1) Fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 - 3) Fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- c. Fasilitas kesehatan meliputi:
- 1) Fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
 - 2) Fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- d. Fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
- e. Fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
- 1) Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
 - 2) Lapangan umum atau lapangan olahraga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
 - 3) Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan





- 4) Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
 - 5) Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
 - 6) Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
 - 7) Lapangan Tenis Indoor di Kecamatan Binuang;
 - 8) Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
 - 9) Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
 - 10) Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
3. Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
- a. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di :
 - 1) Kawasan Rantau Baru;
 - 2) Kawasan Margasari Baru;
 - 3) Kawasan Binuang Baru; dan
 - 4) Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
 - b. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL;
 - c. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
4. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
- a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten;
 - c. Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.



2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi berada di Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi:

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- a. Kawasan Rantau Baru;
- b. Kawasan Binuang Baru;
- c. Kawasan Margasari Baru;
- d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
- e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
- f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Bendungan Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- a. Kawasan rawan longsor meliputi:
 - 1) Kecamatan Bungur;
 - 2) Kecamatan Piani; dan
 - 3) Kecamatan Hatungun.



- b. Kawasan rawan banjir meliputi:
- 1) Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 2) Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - 3) Kecamatan Tapin Tengah.

2.1.1.3. Demografi

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2022 berjumlah 194.628 jiwa, yang terdiri dari 98.346 jiwa laki-laki dan 96.282 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,47 persen dibandingkan tahun 2021. Dengan perbedaan angka penduduk per jenis kelamin tersebut, maka didapatkan rasio jenis kelamin sebesar 102,14 yang mengindikasikan dari 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki.

Tabel II.5.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin
Tahun 2020 - 2022

Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2010-2020	2020-2021	2021-2022
010 Benuang	31.258	31.683	32.191	1,33	1,36	1.60
011 Hatungun	9.256	9.388	9.545	1,39	1,43	1.67
020 Tapin Selatan	20.369	20.622	20.928	1,21	1,24	1.48
021 Salam Babaris	11.858	11.942	12.055	0,67	0,71	0.95
030 Tapin Tengah	21.195	21.583	22.030	1,80	1,83	2.07
040 Bungur	13.246	13.419	13.627	1,27	1,31	1.55
050 Piani	5.770	5.813	5.871	0,71	0,75	1.00
060 Lokpaikat	11.580	11.882	12.221	2,58	2,61	2.85
070 Tapin Utara	25.396	25.628	25.925	0,88	0,91	1.16
080 Bakarangan	10.047	10.200	10.381	1,49	1,52	1.77
090 Candi Laras Selatan	12.362	12.396	12.459	0,24	0,28	0.51
100 Candi Laras Utara	17.138	17.245	17.395	0,59	0,62	0.87
Kabupaten Tapin	189.475	191.801	194.628	1,18	1,23	1.47

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2023



Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

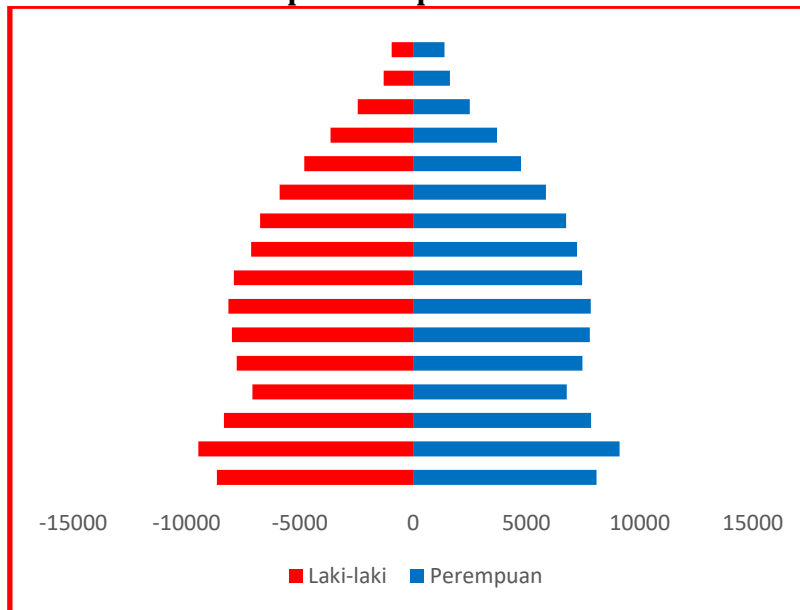
Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

- a. Faktor penambah
 - 1) Kelahiran (fertilitas) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
 - 2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan.
- b. Faktor pengurang
 - 1) Kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya semua tanda- tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
 - 2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.



Grafik II.1
Piramida Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2022



Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa peningkatan penduduk usia muda cukup tinggi dan penduduk usia tua berkurang cukup signifikan dibanding usia produktif. Sedangkan pada tabel di bawah menunjukkan pada tahun 2022 produktif (15 tahun – 64 tahun) sebanyak 132.867 Jiwa lebih besar dari penduduk yang berusia tidak produktif (0 tahun – 14 tahun dan diatas 65 tahun).

Tabel II.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	866	8094	16754
5-9	9478	9111	18589
10-14	8347	7856	16203
15-19	709	6787	13877
20-24	7786	7476	15262
25-29	7998	7806	15804
30-34	8148	7842	1599
35-39	7905	7456	15361
40-44	7147	7237	14384
45-49	6757	6757	13514
50-54	5887	5869	11756
55-59	4809	4759	9568
60-64	3643	3708	7351



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
65-69	244	251	495
70-74	1305	163	2935
75+	946	1384	233
Jumlah	98346	96282	194628

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2023

Jika dilihat dari tingkat penyebaran penduduk, persentase terbesar penduduk berada di wilayah Benuang (16,54%), Tapin Utara (13,32%) dan Tapin tengah (11,32) kepadatan penduduk tertinggi Tapin Utara 802 jiwa/km, Benuang 243 jiwa/km, Salam Babaris dan Bakarangan 166 jiwa/km. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin Utara sangat tinggi dibanding Kabupaten lainnya.

Tabel II.7.
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Tapin 2021-2022

Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Benuang	16,52	16,54	239	243
011 Hatungun	4,89	4,90	98	100
020 Tapin Selatan	10,75	10,75	134	136
021 Salam Babaris	6,23	6,19	164	166
030 Tapin Tengah	11,25	11,32	70	71
040 Bungur	7,00	7,00	147	149
050 Piani	3,03	3,02	29	29
060 Lokpaikat	6,19	6,28	127	130
070 Tapin Utara	13,36	13,32	792	802
080 Bakarangan	5,32	5,33	163	166
090 Candi Laras Selatan	6,46	6,40	50	50
100 Candi Laras Utara	8,99	8,94	25	26
Tapin	100	100	88	89

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2023

B. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada tahun 2022, data tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Tapin masih didominasi oleh para pekerja dengan lulusan sekolah dasar ke bawah, termasuk yang tidak sekolah. Oleh karena itu, kondisi tingkat pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Tapin harus menjadi perhatian karena



banyaknya tenaga kerja kurang berpendidikan. Jumlah penduduk yang menganggur cukup banyak terjadi di kelompok pendidikan SMA dan sederajat. Hal itu juga menjadi perhatian merupakan sinyal pentingnya program menambah lapangan pekerjaan untuk kelompok pendidikan menengah.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tapin ditinjau dari tingkat pendidikan masih harus ditingkatkan dalam rangka menghadapi tantangan kemajuan masa yang akan datang.

Tabel II.8
Tingkatan Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Tapin Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap AK
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	50.252	1.766	52.018	97
1	14.770	732	15.502	95
2	24.747	1.572	26.319	94
3	9.258	219	9.477	98
Jumlah/Total	99.027	4.289	103.316	96

Keterangan: 0: SD, 1: SMP, 2: SMA, 4: PT

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023

C. Jenis Pekerjaan Penduduk

Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Tapin, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 mencapai 99.027 jiwa yang bekerja. Dari angka tersebut sebagian besar bekerja pada lapangan usaha utama sektor jasa yang mencapai 40.307 jiwa, meskipun angka ini mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya.

Tabel II.9
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2022

Kegiatan	Jumlah Penduduk		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pertanian	39539	38837	39381
02 Industri	15391	17230	19339
03 Jasa	42016	41287	40307
Jumlah	96936	97354	99027

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023



Jika dilihat status pekerjaannya, maka pada Tahun 2022 sebagian besar penduduk berstatus buruh/karyawan atau pegawai sebesar 34.026 orang, dan berusaha sendiri sebanyak 25.308 orang. Adapun usaha yang dibantu buruh tetap atau dibayar hanya sebesar 2.166 orang dimana angka ini merupakan angka terendah dari status pekerjaan utama masyarakat Tapin.

Tabel II.10
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tapin Tahun 2022

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	13478	11830	25308
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker</i>	15808	5842	21650
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/ paid worker</i>	1649	517	2166
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	24084	9942	34026
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	1736	481	2217
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	3004	10656	13660
Jumlah/Total	59759	39268	99027

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Tapin utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Tapin. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat,



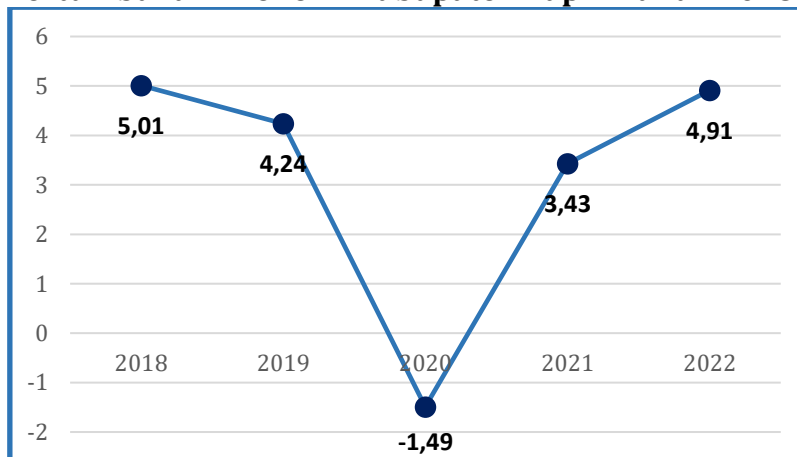
meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Tapin antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Tapin mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Hal tersebut, terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2018 sebesar 5,01 persen, tahun 2019 sebesar 4,24 persen dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,49 persen. Kontraksi pada tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan gejolak sosial ekonomi masyarakat baik karena kebijakan pemerintah dalam penanganannya maupun pemulihannya. Seiring dengan pelaksanaan pemulihan dan penanganan Pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi mulai normal kembali dimana pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 3,43 persen dan 4,91 persen.

Grafik II.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2022



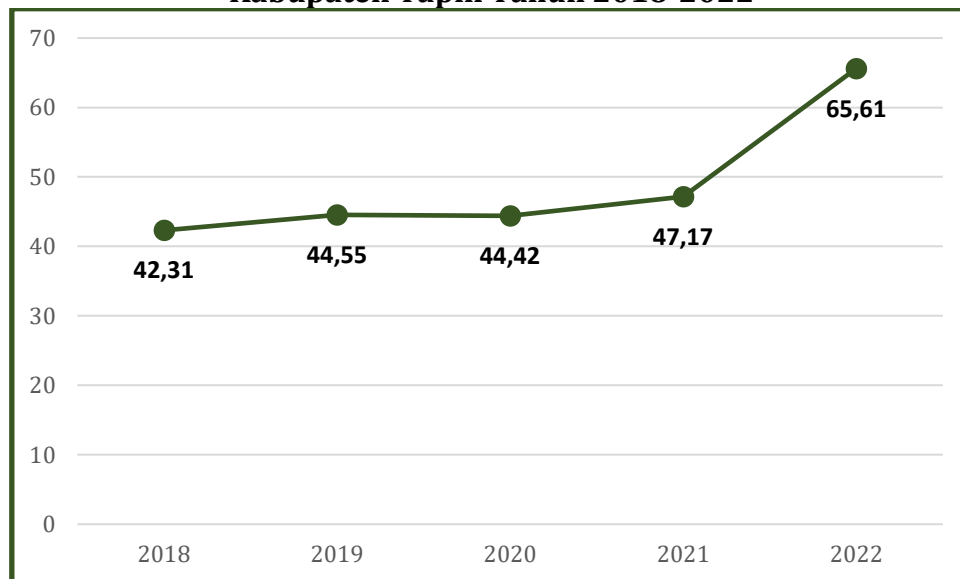
Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023



B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun secara umum mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar 42,31 juta rupiah per kapita menjadi sebesar 65,61 juta rupiah per kapita.

Grafik II.3
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

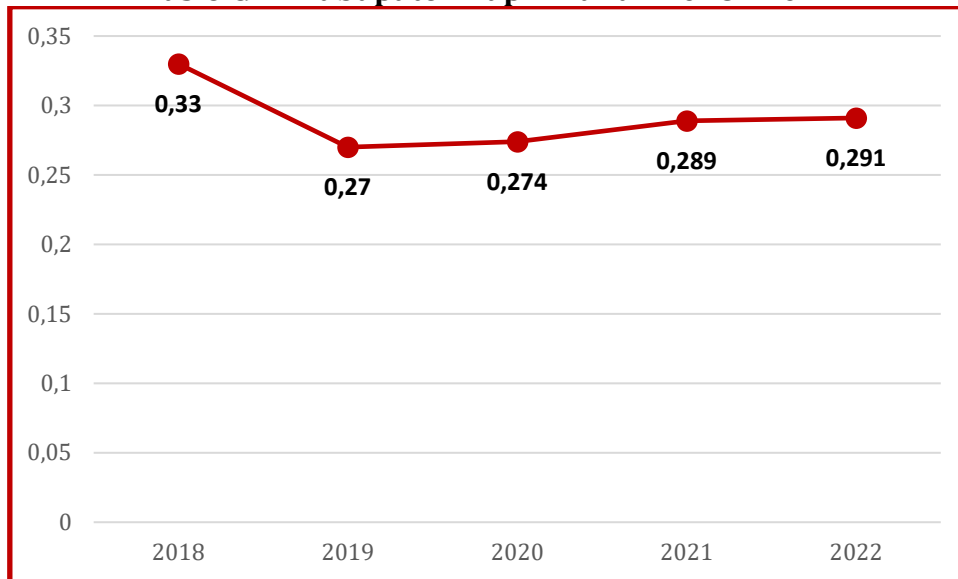
C. Indeks Gini/Koefisien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Koefisien Gini Kabupaten Tapin, pada tahun 2018 sampai tahun 2022 sempat mengalami penurunan hingga 0,27 pada tahun 2019, meskipun meningkat kembali ketimpangan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2022.



Grafik II.4
Rasio Gini Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023

D. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan adalah rasio penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan- kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan hingga 3,06 persen. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, maka angka kemiskinan kembali meningkat di angka 3,60 persen pada kondisi tahun 2021 maupun 2022. Kenaikan Persentase Penduduk Miskin ini salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tabel 2.11 menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan fluktuatif dari tahun 2018-2022 dari 0,35 tahun 2018, 04,46 tahun 2019, 0,45 pada tahun 2020 menjadi 0,28 pada tahun 2021 dan 0,33 di tahun 2022. Sedangkan



Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian Tingkat Keparahan Kemiskinan juga fluktuatif dari tahun 2018-2022 dari 0,06 tahun 2018, 0,09 tahun 2019, 0,12 tahun 2010 menjadi 0,04 pada tahun 2021 dan 0,07 di tahun 2022.

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

Variabel Kemiskinan	Nilai Variabel				
	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	405591	406367	446577	459160	484113
Jumlah Penduduk Miskin	6979	6507	5899	6925	6982
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,7	3,41	3,06	3,60	3,60
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,35	0,46	0,45	0,28	0,33
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,06	0,09	0,12	0,04	0,07

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi- institusi sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Kesejahteraan masyarakat bergantung pada status ekonomi masyarakat. Besarnya beban ekonomi dan kecilnya pendapatan yang diperoleh sebagian kecil kalangan belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang baik. Salah satu beban tersebut adalah tingginya angka ketergantungan penduduk dalam masyarakat. Pada sisi lain juga terjadi efek terhadap masyarakat dalam bentuk keterbatasan kemampuan sosial dalam masyarakat. Bentuk keterbatasan ini akan muncul dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial seperti balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan sosial, komunitas adat terpencil dan lain sebagainya.



Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada akhir-akhir ini sudah mengalami peningkatan, hal ini tercermin pada turunnya angka penduduk miskin, dengan melakukan upaya/program bersifat proyek padat karya, penyediaan modal usaha mikro, pelayanan kesejahteraan sosial.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Tapin yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Berikut IPM Kabupaten Tapin beserta komponen pembentuknya:

Tabel II.12
IPM Kabupaten Tapin Menurut Komponen Tahun 2019 - 2022

Komponen IPM	Satuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,23	70,4	70,57	70,88
Indeks Kesehatan	-	0,773	0,775	0,778	0,783
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,86	11,94	11,95	12,04
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,75	7,76	7,77	7,95
Indeks Pendidikan	-	0,588	0,590	0,591	0,599
Pengeluaran Riil Per Kapita	Ribu Rupiah/Kapita	12.088	11.841	11.952	12.247
Indeks Pengeluaran	-	0,759	0,753	0,756	0,763
IPM	-	70,13	70,11	70,31	71,02

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2022



IPM Kabupaten Tapin tahun 2019-2022 secara umum mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 70,12 dan meningkat hingga mencapai 71,02 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2020, angka IPM sempat mengalami penurunan 0,02 poin dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional. Dari data yang tersaji juga terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin pada tahun 2022 berada pada urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Tabel II.13
IPM Kabupaten Tapin Menurut Wilayah Tahun 2019 - 2021

KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2021	2022
Kalimantan Selatan	70,91	71,28	71,84
Tanah Laut	69,38	69,87	70,35
Kotabaru	68,86	69,13	69,74
Banjar	69,18	69,89	70,72
Barito Kuala	66,22	66,64	67,37
Tapin	70,11	70,31	71,02
Hulu Sungai Selatan	68,85	69,21	69,76
Hulu Sungai Tengah	68,84	69,05	69,70
Hulu Sungai Utara	65,59	66,12	66,84
Tabalong	72,19	72,60	73,13
Tanah Bumbu	70,71	71,00	71,79
Balangan	68,82	69,11	69,73
Kota Banjarmasin	77,10	77,57	77,97
Kota Banjar Baru	79,10	79,26	79,68

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023

Data IPM Kabupaten Tapin bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional Tahun 2020 sampai 2022 disajikan pada Tabel II.14. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Tapin selama tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dari 69,53 pada tahun 2018 menjadi 71,02 pada tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalsel dan IPM nasional maka IPM Kabupaten Tapin di bawah IPM Provinsi maupun Nasional.

Tabel II.14
IPM Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2022

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
TAPIN	69,53	70,13	70,11	70,31	71,02
KALIMANTAN SELATAN	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
NASIONAL	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS RI, 2023



Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender juga memberikan pengertian tentang kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Pembangunan manusia dari sisi gender mengalami fluktuatif. Terlihat pada tahun 2017 ke tahun 2018 bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan. Sementara, tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2021, IPG di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan mencapai 84,15. Penurunan angka IPG ini disebabkan karena pertumbuhan pada angka IPM laki-laki lebih besar dibandingkan peningkatan IPM perempuan, sehingga menyebabkan memperbesar perbedaan antara keduanya.

Sementara itu, dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, IDG Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif. Tahun 2019 IDG Kabupaten Tapin turun menjadi 65,16, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 73,11. Sedangkan tahun 2021, IDG Kabupaten Tapin mengalami kenaikan yang cenderung tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 73,19.

Tabel II.15
Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2017 - 2021

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender	83,87	84,56	84,44	84,09	84,15
Indeks Pemberdayaan Gender	72,99	73,11	65,16	64,97	73,19

Sumber: BPS RI, 2023



B. Pendidikan

Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang digunakan pada metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun). AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.16
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
di Kabupaten Tapin dan Prov. Kalsel Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
TAPIN	11,85	11,86	11,94	11,95	12,04
KALIMANTAN SELATAN	12,5	12,52	12,52	12,81	12,82
NASIONAL	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber : BPS RI, 2023

Tabel di atas menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin meningkat setiap tahun pada Tahun 2018 sebesar 11,85 tahun menjadi 12,04 tahun pada Tahun 2022. Angka tersebut di bawah angka Provinsi Kalimantan selatan maupun angka Nasional.



Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III. Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah.

Tabel II.17
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Naional/Provinsi/Kabupaten	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
KALIMANTAN SELATAN	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46
TAPIN	7,54	7,75	7,76	7,77	7,95
INDONESIA	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber : BPS RI,2022



Tabel II.16 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapin terus mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2018 sebesar 7,53 tahun dan menjadi 7,95 pada tahun 2022, namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi yang sebesar 8,46 pada tahun 2022 dan Nasional yang sebesar 8,69 tahun pada tahun 2022.

C. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka harapan hidup di Kabupaten Tapin cukup bagus dimana angka harapan hidup pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 70,88 tahun. Angka ini juga lebih baik dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Tabel II.18
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Naional/Provinsi/Kabupaten	[Metode Baru] Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
KALIMANTAN SELATAN	68,23	68,49	68,66	68,83	69,13
TAPIN	69,98	70,23	70,40	70,57	70,88
INDONESIA	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber : BPS RI,2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Pendidikan

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah dan tenaga guru. Ketersediaan sekolah nampak dari rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah, sedangkan ketersediaan tenaga guru nampak dari rasio guru terhadap murid.



Tabel II.19
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
SD/MI/Sederajat (7-12 Tahun)	98.98	99.41	99.38	112.66	114.35	113.08
SMP/MTs/ Sederajat (13-15 tahun)	72.20	72.42	72.86	86.23	84.52	89.62
SMA/SMK/MA/Sederajat(16-18 tahun)	54.79	54.76	54.89	65.08	63.10	64.59

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2022

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2022 APM tingkat SMP dan SMA mengalami kenaikan tetapi APM tingkat SD mengalami penurunan yang semula sebesar 99,41 menjadi 99,38. Begitu juga pada APK, tingkat SD mengalami penurunan dari 114,35 menjadi 113,08 pada tahun 2022.

Angka Partisipasi Murni

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Tabel II.20
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022

APM (%)	SD				SLTP				SLTA			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
TAPIN	98.81	98.76	99,41	99.38	74.84	75.51	72,42	72.86	57.82	58.25	54,76	54.89
KALIMANTAN SELATAN	99.69	98.98	98.94	99.12	71.59	72.2	74.88	76.28	53.49	54.79	58.37	59.91

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2022



Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK.

Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel II.21
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022

APK (%)	SD				SLTP				SLTA			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
TAPIN	114,57	112,66	114,3	113,08	85,85	86,23	84,50	89,62	63,54	65,08	63,10	64,59
KALIMANTAN SELATAN	108,69	107,28	107,14	107,18	83,83	86,31	86,04	86,04	78,86	79,10	80,77	80,97

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023

B. Kesehatan

Angka Kematian Ibu dan Bayi

Indikator lain yang mendukung Angka Harapan Hidup adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu jumlah kematian ibu saat melahirkan dari 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi yaitu jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Terlihat bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan hingga mencapai 385 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 tetapi Kembali menurun di tahun 2022 yaitu sebesar 301. Meskipun begitu, angka kematian bayi tahun 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 10 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat sebanyak 13 pada tahun 2022.



Tabel II.22
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Tapin 2017 - 2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu	31	187	93	149	385	301
Angka Kematian Bayi	12	13	11	34	10	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2022

Prevalensi *Stunting*

Dalam rangka Pembangunan Bidang Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tapin untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapin yang sehat, dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting*, Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* dalam RPJMN 2020 - 2024 menjadi 14%.

Upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara terintegrasi dan konvergen.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* adalah intervensi yang dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dari anak balita, intervensi anak kerdil (*Stunting*) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah, serta dunia usaha/masyarakat.

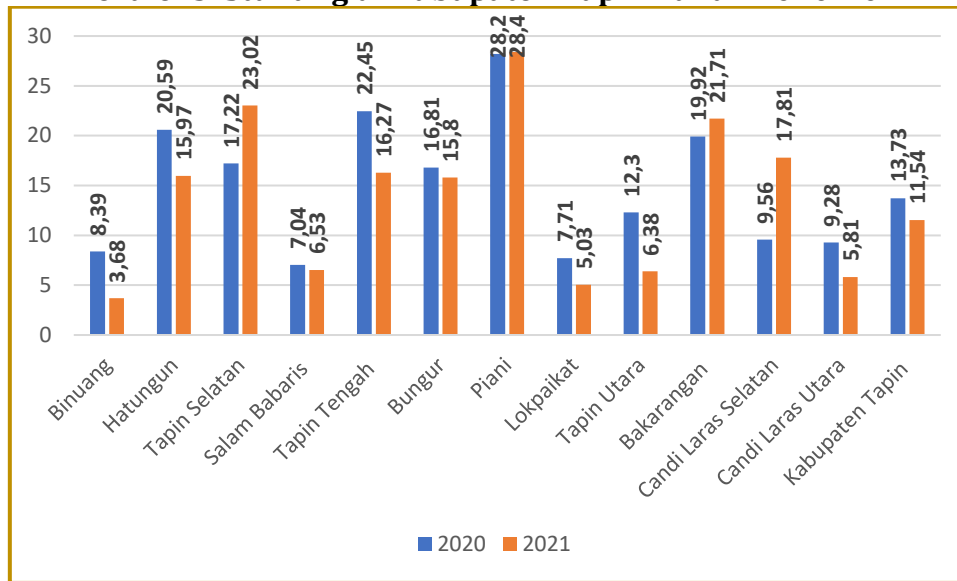
Tabel II.23
Prevalensi *Stunting* (Balita Pendek)
Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2022

Wilayah	2019	2020	2021	2022
TAPIN	16,85	13,73	11,54	14,50
KALIMANTAN SELATAN	18,98	12,2	10,64	24,60

Sumber: hasil entry EPPGBM 2019-2021, SSGI 2022



Grafik II.5.
Prevalensi Stunting di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2021



Sumber: hasil entry EPPGBM 2020-2021

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk mengelola pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dalam penataan ruang yang digunakan dalam rencana pembangunan di Kabupaten Tapin adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, SDA (Sumber Daya Air), rumah tangga yang menggunakan air bersih, rumah tangga dengan sanitasi, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.

Implementasi pembangunan infrastruktur melalui berbagai kebijakan telah banyak dilakukan. Kinerja pembangunan infrastruktur telah mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun demikian kinerja pembangunan infrastruktur harus ditelaah lebih jauh untuk dapat mengetahui permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan infrastruktur.



a. Jalan dan Jembatan

Mengacu pada UU Jalan No 38 Tahun 2004, jalan merupakan urat nadi yang berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Ketersediaan infrastruktur jalan menjamin keterhubungan antar wilayah dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan serta mendukung terselenggaranya distribusi barang dan jasa.

Jalan memiliki peran yang sangat penting untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan suatu wilayah. Sehingga dengan demikian tingginya konektivitas jaringan jalan akan meningkatkan akses masyarakat yaitu semakin lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan lainnya.

Penyediaan akses transportasi yang memadai menjadi sebagai salah satu fokus dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pada tujuan ke - 9, yang menekankan perlunya pembangunan infrastruktur tangguh dengan indikator berupa ketersediaan akses terhadap jalan

Kondisi jalan di Kabupaten Tapin dapat dibedakan atas kewenangan yaitu jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Sampai dengan tahun 2022, total panjang jalan yang ada di Kabupaten Tapin telah mencapai 723,26 km yang meliputi 617,15 km atau 95,40 persen merupakan jalan kabupaten, sepanjang 88,99 km atau 13,76 persen diantaranya adalah jalan negara dan sepanjang 17,12 km atau 2,65 persen merupakan jalan provinsi.

Lebih jauh bila dirinci berdasarkan keandalan jalan, panjang jalan dengan konstruksi diaspal mencapai 579,30 Km atau 80,10 persen dari jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Tapin. Masih terdapat jalan yang belum diaspal dengan rincian jalan kerikil mencapai 88,82 Km (12,28%), jalan tanah sepanjang 23,04 Km (3,19%) dan yang tidak dirinci mencapai 32,10 Km (4,44%).



Tabel II.24
Proporsi Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi, Kondisi dan Status Jalan Tahun 2022

Keandalan Jalan	Status Panjang Jalan (Km)			Jumlah	
	Negara	Propinsi	Kabupaten	Km	%
Diaspal	79,99	10,12	489,19	579,3	80,10
Kerikil	9,00	0,00	79,82	88,82	12,28
Tanah	0,00	7,00	16,04	23,04	3,19
Tidak Dirinci	0,00	0,00	32,1	32,1	4,44
Jumlah (Km)	88,99	17,12	617,15	723,26	100,00
Jumlah (%)	13,76	2,65	95,40		
Kondisi Baik	68,29	10,89	124,95	204,13	28,22
Kondisi Sedang	2	4,23	317,01	323,24	44,69
Kondisi Rusak	9,7	2	49,25	60,95	8,43
Kondisi Rusak Berat	9	0	125,94	134,94	18,66
Jumlah (Km)	88,99	17,12	617,15	723,26	100,00
Jumlah (%)	12,30	2,37	85,33		

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023

Kondisi jalan di Kabupaten Tapin dapat dikatakan dalam kondisi yang cukup baik. Jika di rinci menurut kondisi jalan, jalan di Kabupaten Tapin terdiri dari kondisi Baik 204,13 km (28,22%) , kondisi sedang 323,24 km (44,69%), kondisi rusak 60,95 km (8,43%) dan kondisi rusak berat 134,94 km (18,66%).

b. SDA (Sumber Daya Air)

Pentingnya sumber daya air untuk usaha tani adalah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang meliputi usaha tani dengan jenis komoditi tanaman pangan, tanaman sayuran dan buah-buahan, serta peternakan. Pembangunan pertanian yang membutuhkan dukungan air yang sangat besar adalah bidang pertanian tanaman pangan dengan potensi lahan pertanian meliputi lahan sawah dan lahan kering (tegal).

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produk hasil pertanian antara lain dengan membangun irigasi teknis dan bendungan atau waduk. Irigasi teknis (bendungan) dirasakan sangat penting dan bermanfaat sekali bagi para usaha tani di daerah pertanian bagian atas



(lahan kering) yang tidak terpengaruhi pasang surut sungai karena hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi persawahan. Ini berarti bahwa kelangsungan usaha pertanian tanaman pangan sangat tergantung dari curah hujan. Dengan adanya irigasi teknis (bendungan) maka petani dapat menanam pada musim kering.

Pembangunan Bendungan Tapin untuk pengairan di Sungai Tapin, Desa Pipitak, Kecamatan Piani, merupakan program yang sangat tepat. Bendungan tersebut juga akan dapat difungsikan sebagai salah satu bendungan pembangkit tenaga listrik.

Hasil akhir yang diharapkan dari rencana sistem jaringan prasarana pengairan adalah meningkatnya produksi pangan dengan penyediaan air irigasi sepanjang tahun dari sumbernya baik sungai maupun mata air/danau sampai ke lahan pertanian (sawah) sesuai dengan luas areal irigasi yang direncanakan.

Bendungan Tapin dapat memberikan kontribusi perkembangan ekonomi di wilayah Tapin dengan sekurangnya 4 (empat) fungsi utama yaitu:

- Pengendalian banjir dan genangan di wilayah Kab. Tapin. Dengan adanya bendungan diharapkan tidak lagi terjadinya banjir dan genangan di wilayah hulu sungai tapin yang berimbas pada terganggunya aktifitas perekonomian maupun kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
- Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Bendungan dengan volume dan kondisi topografi (tinggi terjunan) yang ada memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai energi penggerak pembangkit listrik dan ini sangat berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumberdaya energi listrik di wilayah Kab. Tapin dan sekitarnya terutama dalam mendukung kegiatan dan aktifitas masyarakat.



- Pengairan lahan pertanian, dengan dibangunnya bendungan dengan sendirinya terdapat simpanan atau cadangan air yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengairan lahan pertanian melalui sistem irigasi teknis,
- Sumber air baku PDAM, dengan adanya cadangan air dalam bendungan dengan kapasitas yang relatif besar dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk kegiatan penyediaan air minum (PDAM) terlebih dengan adanya bendungan maka kualitas air jauh lebih baik karena didalamnya akan terjadi proses alami baik fisik, kimia maupun biologi yang akan memperbaiki kualitas air itu dengan sendirinya. Dengan kualitas air yang baik maka pengolahan yang dilakukan akan relatif lebih mudah dan berbiaya murah.

Lokasi bendungan berada pada daerah perbukitan dengan ketinggian muka tanah sekitar 140 m diatas permukaan laut, disisi lain (daerah pelayanan) berada pada ketinggian 10 s.d. 20 m dpl. Dengan perbedaan ketinggian permukaan tanah ini dimungkinkan untuk didistribusikan melalui sistem gravitasi yang berdampak pada biaya operasional distribusi yang jauh lebih hemat.

Selain hal tersebut diatas, peningkatan kualitas jaringan irigasi merupakan salah satu program kegiatan strategis bagi Kabupaten Tapin dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur. Melalui peningkatan kualitas jaringan irigasi maka akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan luas areal pertanian budidaya atau sawah yang terairi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesinambungan produktifitas hasil pertanian. Kabupaten Tapin memiliki sejumlah areal pertanian budidaya yang telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai dengan tahun 2021, luas areal sawah yang dilengkapi dengan jaringan rigasi telah mencapai 4.210 Ha.

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi area irigasi di Kabupaten Tapin mencapai 21.739 Ha, meliputi :



1. Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan lintas kabupaten yang berada di Kabupaten Tapin D.I Belanti I dan II dengan luasan 3.267 Ha, dengan rincian 2.267 Ha berada di Kabupaten Banjar dan 1.000 Ha di Kabupaten Tapin;
2. Daerah Irigasi Permukaan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 Daerah Irigasi yakni DI Belanti seluas 1.050 dan DI Binuang seluas 1.408. Selain itu juga terdapat Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan DIR Sei Kalang Damar seluas 1.000 Ha.
3. Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin dengan total luasan 11.808 Ha meliputi 50 DI/DIR yang terdiri dari 6 DI seluas 1.596 Ha dan 44 DIR yang mencapai 10.212 Ha.

Tabel II.25.
Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR
di Kabupaten Tapin

Kewenangan	Luas Area	Jumlah DI/DIR
Pusat	6.472	2
Provinsi Kalimantan Selatan	3.458	3
Kabupaten Tapin	11.808	50
Total	21.739	55

c. Air Minum

Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.



Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. Target SDG's menyebutkan bahwa akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua dicapai pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut maka pada RPJMN 2020-2024 ditargetkan pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2024 adalah Akses Air Minum Aman 15%, Akses Air Minum Layak 100% dengan Akses Perpipaian 30%, dan Akses Non- Perpipaian 70%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan SPAM merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan kewenangannya dapat membentuk BUMN/BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat dan badan usaha untuk kebutuhan sendiri.

Sumber air minum layak meliputi air minum perpipaian dan air minum non-perpipaian terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak ≥ 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Peningkatan akses penduduk terhadap sumber air minum layak ini memiliki penting terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tingkat pelayanan SPAM melalui Jaringan Perpipaian PDAM Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 67.799 jiwa yang merupakan 35,78 % dari jumlah penduduk. Area pelayanan terbesar berada di wilayah Kecamatan Tapin Utara dan Bungur yang mencapai 36.911 jiwa melalui IPA Bungur yang memiliki Kapasitas Terpasang sebesar 210 ldp.



Tabel II.26
Angka Partisipasi Pelayanan Eksisting Jaringan air Minum Perpipaan
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Unit IPA/IKK	Kecamatan	Kap. Terpasang (L/det)	Kap Produksi (L/det)	Kap Air Terjual (L/det)	Kap. Idle (L/det)	SR (@ 2,98 Jiwa)	HU (@ 100 Jiwa)	Penduduk 2020	Terlayani	% Pelayanan
1	IPA Bungur	Tapin Utara & Bungur	210	90	85.95	120	8783	74	38642	36911	95.52
		Lokpaikat	0	0	2.97	0	10	2	11580	1738	15.01
2	IPA Hyung (IKK Taping Tengah)	Tapin Tengah	157.5	66	15.82	91.5	1728	10	21195	6206	29.28
		Bakarangan	10	0	5.68	10	823	17	10047	891	8.87
		Candi Laras Selatan	5	0	2.55	5	732	5	12362	2738	22.15
3	IKK Tapin Selatan	Tapin Selatan	10	7	4.92	3	847	8	20369	3422	16.8
4	IKK Batuhapu	Batuhapu	55	26	5.68	29	473	10	9256	2448	26.45
5	IKK Binuang	Binuang	20	14	17.04	6	2156	12	31258	7866	25.16
6	IKK Candi Laras Utara	Candi Laras Utara	5	1	0.19	4	61	7	17138	891	5.2
7	IKK Piani	Piani	20	16	1.96	4	560	2	5770	1893	32.81
8	IKK Salam Babaris	Salam Babaris	20	10	3.48	10	732	5	11858	2795	23.57
Jumlah			512.5	230		282.5			189475	67799	35.78

Sumber : <http://aiminum.ciptakarya.pug> dan teknik PDAM Kabupaten Tapin

Berdasarkan Tabel 2.27, dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin telah terlayani oleh sistem perpipaan melalui 8 sistem penyediaan air minum (SPAM). Namun demikian terdapat permasalahan dalam penyediaan air minum aman melalui jaringan perpipaan di Kabupaten Tapin yaitu :

1. Akses air minum perpipaan di Kabupaten Tapin sebesar 35,78% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan 100 persen akses air minum layak, termasuk 15 persen akses air minum aman, serta 30 persen akses air minum perpipaan.
2. Optimalisasi Kapasitas air yang belum termanfaatkan (*idle*) melalui perluasan jaringan perpipaan. Kapasitas air yang belum termanfaatkan (*idle*) cukup besar mencapai 282,50 L/det. Sistem yang memiliki *idle* terbesar adalah IPA Bungur memiliki kapasitas belum termanfaatkan terbesar yaitu mencapai 120 L/det. Persentase pelayanan pada sistem ini yaitu Kecamatan Tapin Utara dan Bungur telah mendekati optimum yaitu 95,52 % sehingga optimalisasi terhadap sistem ini dapat dilakukan dengan perluasan jaringan perpipaan untuk kecamatan terdekat;



3. Peningkatan cakupan layanan sistem air minum melalui interkoneksi sistem, secara khusus pada SPAM/IPA yang memiliki kapasitas air belum termanfaatkan (*idle*) cukup besar.

Penyediaan air minum di Kabupaten Tapin selain oleh PDAM untuk pemenuhan akses terhadap sumber air minum layak penyelenggaraannya juga dilakukan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Sehingga diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tapin yang dapat mengakses pelayanan air minum layak sampai dengan tahun 2021 melalui program PAMSIMAS sebanyak 9.618 jiwa (5,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Tapin) dan SPAMDES sebanyak 47.869 jiwa (25,26% dari jumlah penduduk Kabupaten Tapin). Sehingga jumlah total keseluruhan penduduk di Kabupaten Tapin yang dapat mengakses pelayanan air minum aman telah mencapai 125.286 jiwa atau 66,12% dari jumlah penduduk. Lebih jauh akses pelayanan air minum aman in telah melampaui target RPJMD Kabupten Tapin untuk akses layak pada tahun 2023 atau pada akhir tahun perencanaan yaitu sebesar 65,92%.





Tabel II.27
Data Rekapitulasi Pelayanan Air Minum Layak
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDAM		Pamsimas		Data Dinas Kesehatan (SPAM Perdesaan)		Total	
			Penduduk terlayani	% terlayani	Penduduk terlayani	% terlayani	Penduduk terlayani	% terlayani	Penduduk terlayani	% terlayani
1	Tapin Utara & Bungur	38642	36911	95.52	1584	4.1	2937	7.6	41432	107.22
2	Lokpaikat	11580	1738	15.01	1180	10.19	3226	27.85	6144	53.05
3	Tapin Tengah	21195	6206	29.28	190	0.9	9892	46.67	16288	76.85
4	Bakaangan	10047	891	8.87	9	0.9	4827	48.05	5727	57
5	Candi Laras Selatan	12362	2738	22.15	808	6.54	17	0.14	3563	28.82
6	Tapin Selatan	20369	3422	16.8	736	3.61	13546	66.5	17704	86.92
7	Hatungun	9256	2448	26.45	675	7.29	2318	25.05	5441	58.79
8	Binuang	31258	7866	25.16	1588	5.08	5342	17.09	14796	47.77
9	Candi Laras Utara	17138	891	5.2	1988	11.6	6	0.03	2885	16.83
10	Piani	5770	1893	32.81	179	3.1	652	11.31	2724	47.22
11	Salam Babaris	11858	2795	23.57	681	5.74	5104	43.05	8580	72.36
Jumlah		189475	67799	35.78	9618	5.08	47869	25.26	125286	66.12

Sumber : diolah dari data PDAM Tapin, SIMSPAM dan Dinkes Kabupaten Tapin, 2022

d. Sanitasi

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga dengan pengertian tersebut maka pengelolaan sampah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 untuk pengelolaan sampah ditargetkan adalah 100%. Dalam hal ini, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tapin telah menangani sampah sebesar 55,64% dimana masuk pada kategori sedang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapin telah memfasilitasi pengelolaan sampah



melalui Bank Sampah, TPS3, 3R, Rumah Kompos sebesar 80%. Kinerja fasilitasi pengelolaan sampah ini tergolong tinggi.

Namun demikian berdasarkan hasil Studi EHRA untuk analisis area berisiko persampahan yang dilakukan pada tahun 2020 diketahui bahwa:

1. Pengelolaan Sampah tidak memadai mencapai 82%.
2. Layanan Pengelolaan Sampah dengan frekuensi tidak memadai sebesar 88,1% dan ketepatan pengangkutan tidak memadai/tidak tepat waktu sebesar 88%.
3. Tidak ada pengolahan terhadap sampah 95,5%.

Pengolahan limbah domestik adalah pengolahan limbah cair rumah tangga. Sehingga air yang dibuang bukan lagi air yang tercemar zat perusak, melainkan air yang lebih bersih. Secara umum pengolahan limbah domestik terbagi menjadi dua, yaitu limbah rumah tangga dan komunal. Target pengelolaan sanitasi yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah Akses Layak 90 % termasuk Akses Aman 15 % serta 0 % untuk rumah tangga yang melakukan BABS.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses/fasilitas buang air besar sendiri di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 81,42 % dari jumlah rumah tangga dan 18,58 % rumah tangga dengan menggunakan fasilitas lainnya. Sehingga dalam rangka mencapai target pengelolaan sanitasi yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 maka rumah tangga dengan fasilitas lainnya tersebut menjadi target grup prioritas di Kabupaten Tapin. Hal ini karena penggunaan fasilitas lainnya mengandung pengertian bahwa termasuk didalamnya adalah rumah tangga dengan penggunaan fasilitas bersama, MCK Umum dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Lebih jauh bila dirinci berdasarkan jenis fasilitas buang air besar diketahui bahwa yang sudah menggunakan kloset berupa leher angsa 87,64 % dan yang sudah dilengkapi dengan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja baru mencapai 79,54 % rumah tangga



di Kabupaten Tapin. Namun demikian mengacu pada hasil studi EHRA terhadap responden yang dilakukan pada tahun 2020 diketahui bahwa area beresiko air limbah domestik di Kabupaten Tapin bersumber dari adalah tangki septik yang tidak aman.

e. Penataan Ruang

Rencana tata ruang merupakan wujud kegiatan sektor dalam ruang yang disusun dengan mempertimbangkan arahan lokasinya juga dalam rangka untuk mempermudah pencapaian arah pemanfaatan ruang. Hingga saat ini peninjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034 yang telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 masih dalam disusun konsep usulan RTRW yang terbaru tengah diproses. Peninjauan RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034 ini dinilai penting mengingat seiring dengan perjalanan waktu, arah dan pola pengembangan serta semua aktivitas pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan dengan kondisi dan program pembangunan daerah.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan penjelasan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2011, penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011, bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pengembangan yang telah ada, pembangunan baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman juga merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing- masing. Dijabarkan lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 23 tahun



2014 bahwa pembagian tugas dan wewenang terkait pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penerapan SPM, sejak tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin berpedoman pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya. Dalam kurun waktu 2020 – 2021, jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani di Kabupaten Tapin sebanyak 206 unit.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Tabel II.28
Jumlah Kekuatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
di Kabupaten Tapin Tahun 2022

Unit	Tahun
Kediaman Bupati	10
Kediaman Wakil Bupati	14
Kediaman Sekretaris Daerah	10
Pemadam Kebakaran	12
Kantor Satpol PP	99
Total	145

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023

Satpol PP melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda.

Tabel II.29
Rasio Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tapin
Tahun 2017- 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah polisi pamong praja	121	112	134	119	117
2	Jumlah penduduk	186.672	189.081	189.422	189.475	192.696
3	Rasio per 10.000 penduduk	6,5	5,9	7,07	6,28	6,07

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka 2018- 2022

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.



b. Gambaran Wilayah Kebencanaan

Kabupaten Tapin memiliki beberapa kejadian bencana yang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Untuk mengurangi dampak korban jiwa maka direncanakan jalur dan ruang evakuasi. Jalur evakuasi bencana alam banjir tersebut meliputi :

1. Ruas jalan Margasari- Muara Muning- Rantau; dan
2. Ruas jalan Muara Muning - Sungai Kandang – Rantau. Dan ruang evakuasi bencana alam banjir meliputi :
 - Kecamatan Candi Laras Utara;
 - Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - Kecamatan Tapin Tengah.

Kejadian kebakaran juga berdampak kepada Kecamatan sekitar Kabupaten Tapin dengan korban mengungsi yang cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah kekeringan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada Tahun 2021 bencana alam yang terjadi adalah bencana banjir. Data bencana banjir disajikan pada Tabel II.29



Tabel II.30
Jumlah Kejadian Bencana Banjir
di Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021

Kecamatan	Banjir/Flood		
	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4
010 Binuang	1	...	2
011 Hatungun	-	...	-
020 Tapin Selatan	2	...	2
021 Salam Babaris	-	...	-
030 Tapin Tengah	-	...	-
040 Bungur	2	...	1
050 Piani	-	...	1
060 Lokpaikat	-	...	3
070 Tapin Utara	13	...	3
080 Bakarangan	2	...	1
090 Candi Laras Selatan	-	...	-
100 Candi Laras Utara	-	...	-
	20	...	13

F. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.



Masalah sosial yang dianggap krusial adalah penanganan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanganan sosial akibat Pandemi Covid-19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 sebanyak 18.334 orang PMKS yang memperoleh bantuan dan jumlah ini meningkat menjadi 24.303 pada tahun 2021.

Tabel II.31
PMKS Penerima Bantuan Sosial Tunai
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Sumber Dana	JAN	FEB	MAR- APR	MEI- JUN	KETERANGAN
1	Bantuan Sosial Tunai (BST) APBN Kementerian Sosial (300rb/Bulan 6 Bulan)	6873 KK	6853 KK	6700 KK	6345 KK	Kementerian Sosial
		JUN-DES				Keterangan
2	Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Pemerintah Kabupaten Tapin Untuk Kelurahan (300rb/Bulan untuk 7 Bulan)	1371 KK				Dinas Sosial (Untuk 9 Kelurahan)

Jumlah keluarga yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai pada bulan Januari 2021 adalah 6873 KK, bulan Februari 6853 KK, Maret dan April 6700 KK dan bulan Mei – Juni 6345 KK, bantuan tersebut berasal dari anggaran APBN Kementerian Sosial sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan diterimakan kepada 1371 KK.

Tabel II.32
PMKS Penerima Bantuan terdampak Covid-19
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Jenis Bantuan	Penerima
1	PKH	3665 KK
2	BPNT	7260 KK
3	BST	6345 KK
4	BPNT PPKM	5857 KK
Jumlah		23127 KK



Penerima bantuan bersyarat pada tahun 2021 sebesar 23.127 KK dengan perincian masing-masing adalah: Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 3665 KK, BPNT sebesar 7260 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 6345 dan BPNT PPKM sebanyak 5857 KK.

J. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

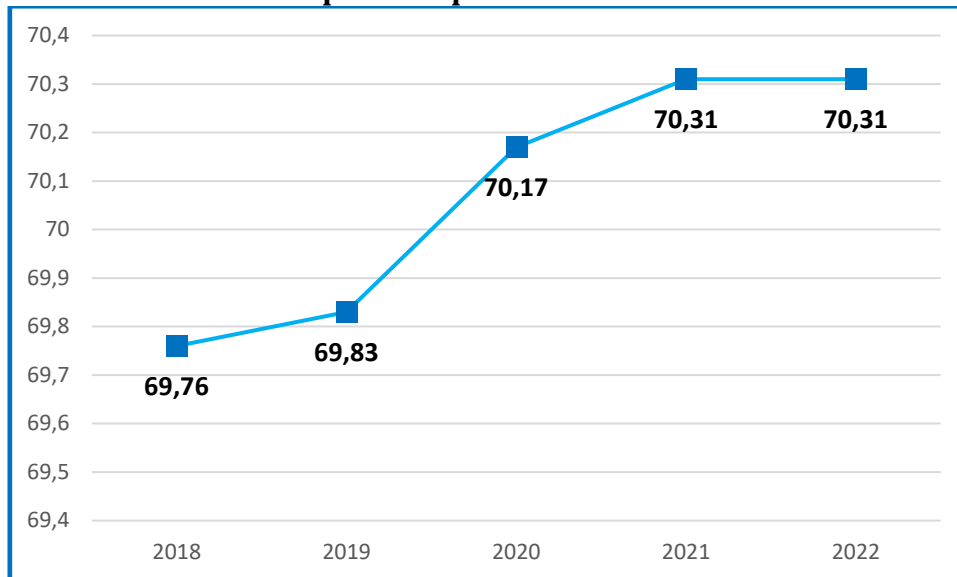
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan secara berkala dimana pada tahun 2018 sebesar 69,76 dan meningkat hingga 70,31 pada tahun 2022. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya potensi angkatan kerja yang siap diserap menjadi tenaga kerja.



Grafik II.6.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2023

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Angka pengangguran di Kabupaten Tapin konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga mencapai 3,73 persen pada tahun 2020. Namun dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19, maka pengangguran meningkat hingga mencapai 4,96 persen di tahun 2021, meskipun pada tahun berikutnya menurun kembali menjadi sebesar 4,15 persen.



Grafik II.7.
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2023

K. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan data penanganan sampah yang tertangani mencapai angka 55.64 persen. Hal ini karena sampah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin untuk menjadikan Kabupaten Tapin yang bersih dan hijau.

Tabel II.33
Penanganan dan Pengurangan Sampah
di Kabupaten Tapin 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penanganan Sampah	51,88%	54,35%	56,30%	56,34%	55.64%
2	Persentase Pengurangan Sampah	18,22%	16,33%	15,56%	15,85%	

Sumber: Jakstrada Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2022



b. Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Dapat dilihat fasilitas tempat pembuangan sampah sebagai berikut.

Tabel II.34
Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

Uraian	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)	2022 (unit)
Permanen	22	22	21	21	19
Kontainer	11	11	11	11	10
Bin Komunal	1	2	2	2	-
Jumlah	34	35	34	34	29

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2018-2022

c. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Dalam urusan penataan ruang, aspek pelayanan umum dapat dilihat dari kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan luas wilayah seperti pada tabel berikut :

Tabel II.35
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	29,676	29,676	29,679	29,679	29,728

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2022

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif yang dikarenakan terjadinya perubahan formulasi penghitungan di tahun 2021 dan 2022. IKLH trennya naik dari 53,03 pada tahun 2017 menjadi 69,09 pada tahun 2020. Namun dikarenakan perubahan formula penghitungan maka mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 63,58 dan 65,25 pada tahun 2022.



Tabel II.36
Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,20	63,00	69,09	63,58	65,25
Tutupan Lahan	46,51	46,52	46,36	29,50	30,09
Kualitas Air	60,67	54,67	57,78	52,80	56,84
Kualitas Udara	91,32	93,31	91,89	92,02	92,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2023

L. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan, akan tetapi menurun pada tahun 2022. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tapin sektor perdagangan Pada tahun 2018 sebesar 10,17 persen, tahun 2019 sebesar 10,58 persen, tahun 2020 sebesar 10,80 persen, tahun 2021 menjadi 10,24 persen sedangkan tahun 2022 turun hingga 8,7 persen atau menjadi sebesar 8,7 persen.

Tabel II.37
Kontribusi sektor perdagangan
di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Perdagangan	813,698.45	892,400.78	906,924.81	961,507.85	1,111,061.91
2	PDRB Total	7,999,159.37	8,438,249.39	8,393,891.50	9,387,409.72	12,770,255.04
3	Kontribusi (%)	10,17%	10,58%	10,80%	10,24%	8,7%

Dinas perindustrian sebagai garda terdepan perkembangan industri di kabupaten Tapin memiliki sistem informasi dan website yang cukup memadai, seperti pada Gambar II.2.

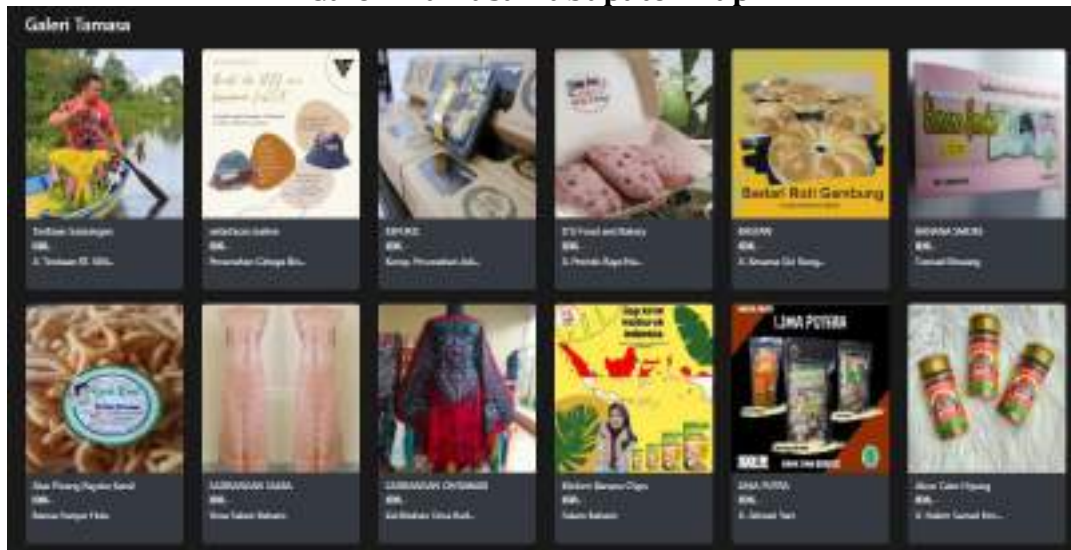


Gambar II.2.
Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin



Aneka produk yang ada di Kabupaten Tapin ditampilkan pada galeri tamasa pada website tersebut, seperti pada gambar II.3

Gambar II.3.
Galeri Tamasa Kabupaten Tapin



Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar menjadi sebesar 5,13 persen. Meskipun kontribusi mengalami penurunan, namun secara umum masih terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan.



Tabel II. 38

Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Perindustrian	545985.78	574864.35	558469.82	617206.26	654554.72
2	PDRB Total	7,999,159.37	8,438,249.39	8,393,891.50	9,387,409.72	12,770,255.04
3	Kontribusi (%)	6,83%	6,81%	6,65%	6,57%	5.13%

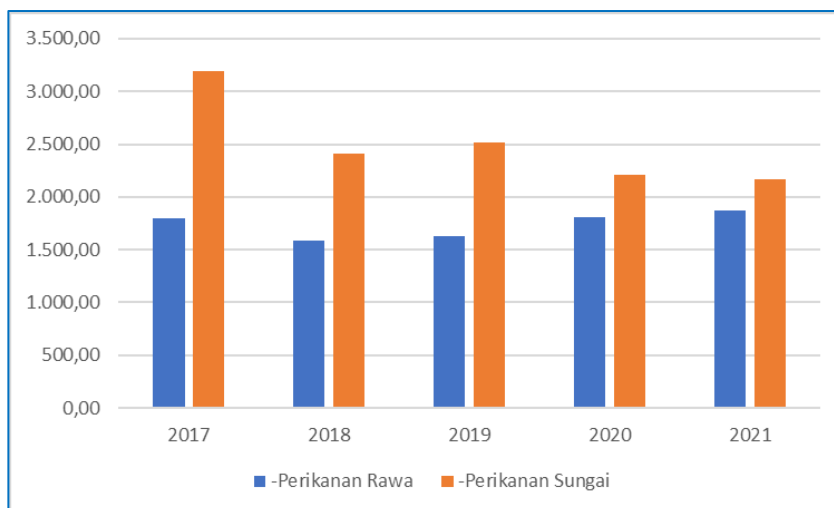
Sumber : BPS, Kabupaten Tapin 2022

M. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Tapin selama tahun 2017-2021 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Grafik II.8
Produksi Perikanan Darat (Ton)
di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

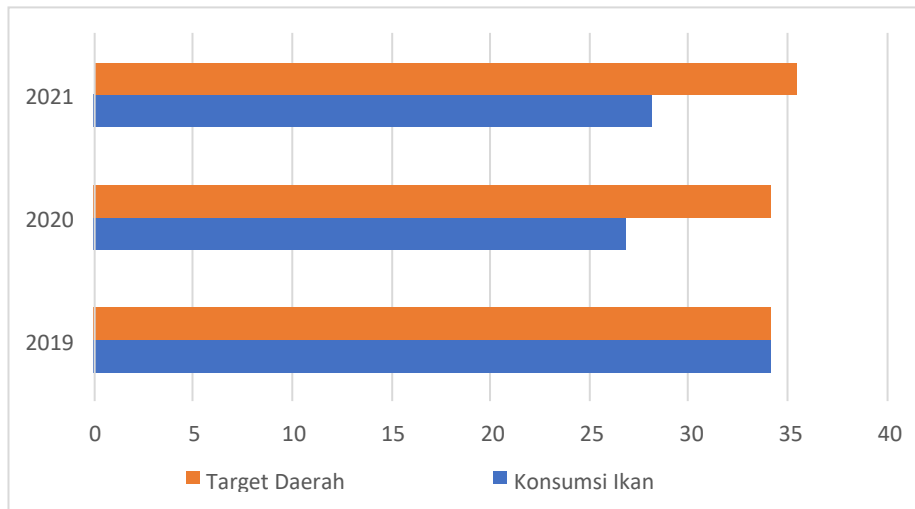


b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin terbukti cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini bahwa persentase konsumsi ikan terhadap target mampu di atas angka 75 persen selama periode tahun 2019 - 2021



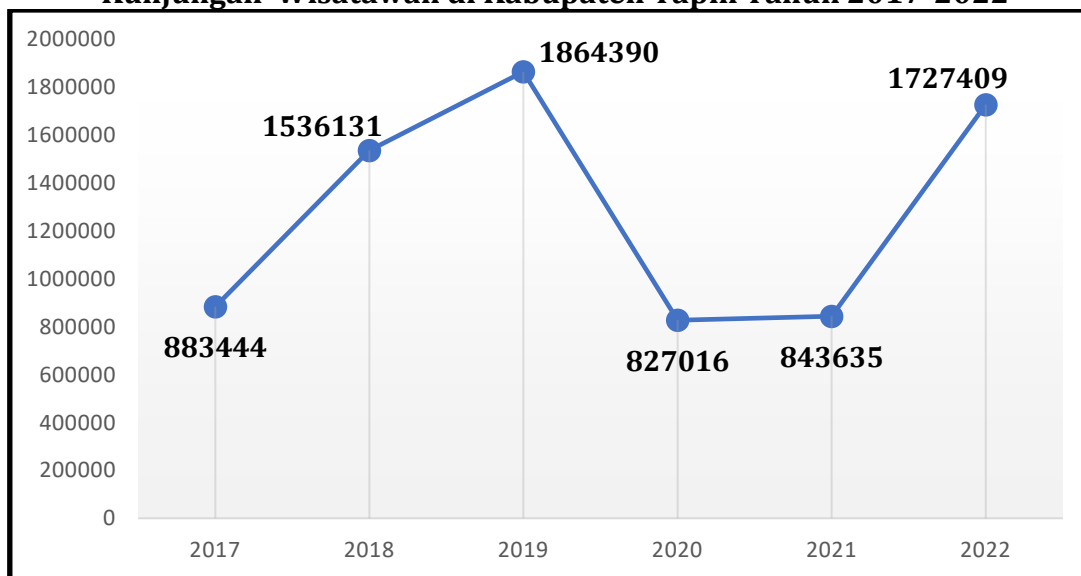
Grafik II.9
Grafik Konsumsi Ikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2021



N. Pariwisata

Kunjungan wisatawan ke Kabupten Tapin (domestik dan luar negeri) selama tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, khususnya pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan masa terjadinya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022, setelah dilaksanakannya penanganan dan pemulihan dampak Covid-19, angka kunjungan wisatawan meningkat kembali hingga mencapai 1,7 juta wisatawan.

Grafik II.10
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022





O. Pertanian

a. Produktivitas Padi

Berdasarkan tabel di bawah, produksi padi selama periode tahun 2017- 2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018-2022 produksi padi sebesar 435.914 ton menjadi 439.480 ton. Sementara untuk produktivitas padi pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan dari 5,23 ton/ha, turun menjadi 4,90 ton/ha dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 5,04 ton/ha.

Tabel II. 39
Produktivitas Padi Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Padi (ton)	435.914	419.823	430.942	424.249	439.480
2	Luas Panen Padi (ha)	84.705	82.410	87.895	84.193	
3	Produktivitas (ton/ha)	5,15	5,09	4,90	5,04	

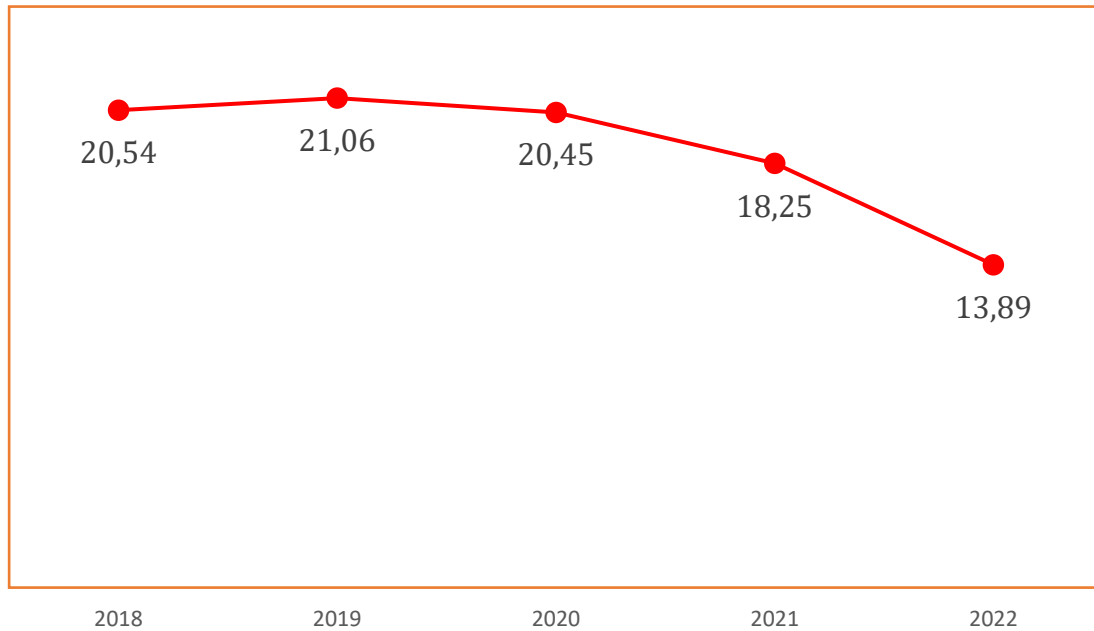
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 2022

b. Kontribusi Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah sektor utama pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tapin setelah sektor pertambangan. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan grafik di bawah menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki pola penurunan pada kontribusi struktur ekonominya meskipun masih cukup mendominasi nilai PDRB Kabupaten Tapin.



Grafik II.11
Kontribusi Sektor Pertanian ADHB
di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2023

c. Produktivitas Karet

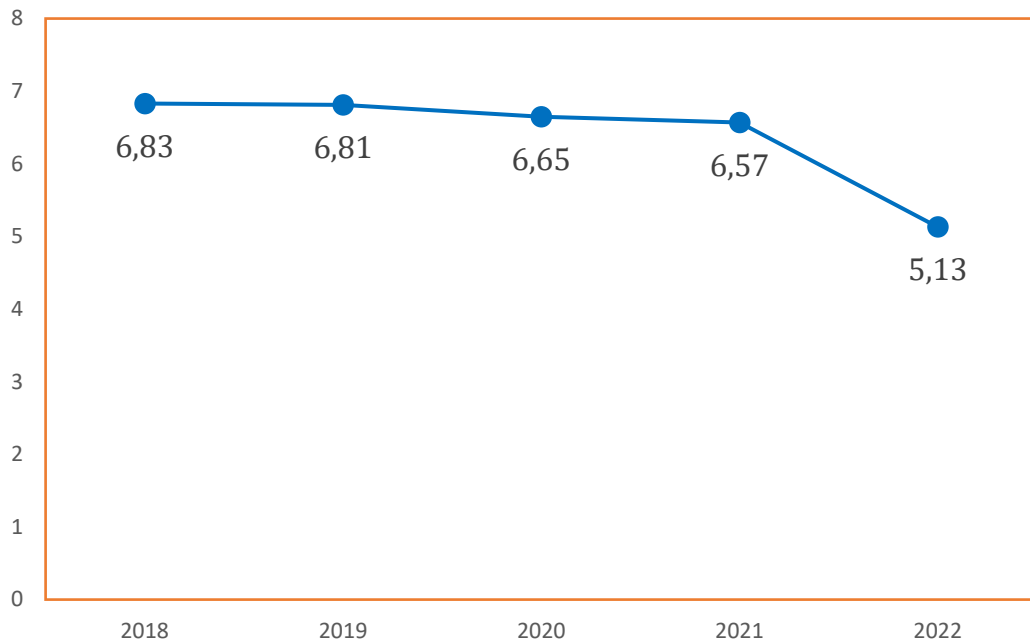
Produktivitas karet di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2017-2021 mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 546,97 kg/ha pada tahun 2018 sebesar 596 kg/ha, pada tahun 2019 sebesar 596 kg/ha, pada tahun 2020 sebesar 654 kg/ha dan pada tahun 2021 sebesar 654 kg/ha . sedangkan Produksi karet di Kabupaten Tapin cenderung naik dari tahun 2017-2021 pada tahun 2017 sebesar 6.818 ton, pada tahun 2018 sebesar 7.993 ton, pada tahun 2019 sebesar 7.992 ton, pada tahun 2020 sebesar 8.678 ton, dan pada tahun 2021 sebesar 8.141 ton.

Q. Perindustrian

Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami kenaikan di setiap tahun, namun kontribusi sektor tersebut pada struktur ekonomi Tapin secara perlahan mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 mencapai 5,13 persen. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang cukup pesat bahkan struktur ekonomi pada tahun 2022 berbeda jauh dibandingkan tahun 2021.



Grafik II.12
Kontribusi Sektor Industri
Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (persen)



2.1.3.1 Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

A. Administrasi Pemerintahan

a. Nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB)

Perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana nilai SAKIP maupun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 68,93 dengan kategori B dan Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 55,00 dengan kategori CC. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih memerlukan upaya dalam meningkatkan performa pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Tabel II. 40
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Sakip	B 60,21	B 67,23	B 67,93	B 69,69	B 68,93
Nilai Reformasi Birokrasi		CC 51,65	CC 53,12	CC 53,94	CC 55,00

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2023

b. Peringkat, Skor dan Status LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.41
Skor Kinerja LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Skor	3,1173	2,8640	3,161.0	3,529.7

Sumber Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2022

c. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil



pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Tabel II.42
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
di Kabupaten Tapin Tahun 2019- 2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	79,83	82,55	83,42	83.48

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2022

B. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

Tabel II. 43
Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti
Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti	70,22	60,92	74,42	88	98.38
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	76,97	75,29	72,61	76,5	76.44

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tapin, 2022

C. Perencanaan

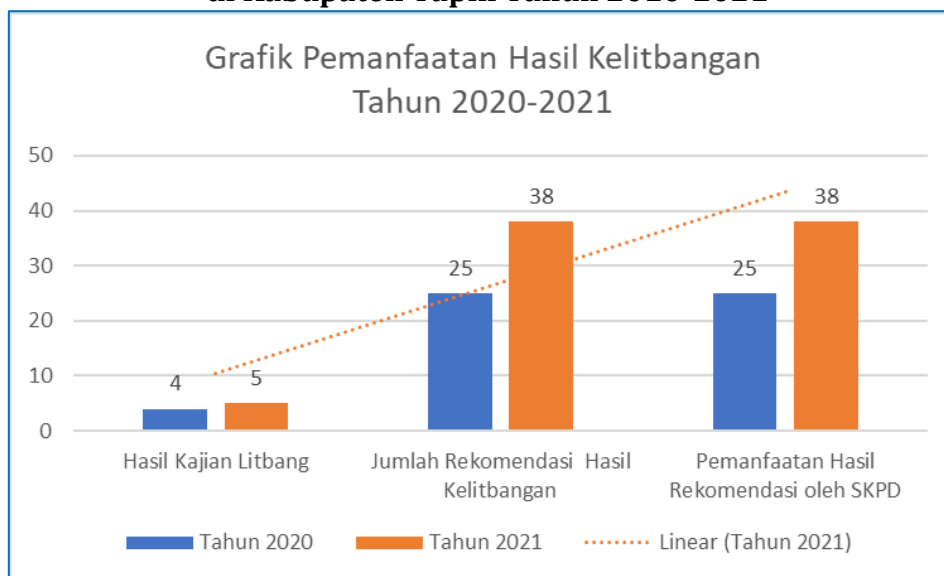
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan:

- RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.
- RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA.
- RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.
- Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan akan mempunyai kewenangan antara lain melakukan penelitian daerah, merumuskan pengembangan dan inovasi daerah. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan.



Grafik II.13
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
di Kabupaten Tapin Tahun 2010-2021



Sumber : Bappelitbang Kab. Tapin 2022

D. Keuangan

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2018-2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel II. 44
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Opini BPK
1	2018	Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
2	2019	Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
3	2020	Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
4	2021	Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)
5	2022	Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tapin, 2022



21.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita). Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi untuk makanan masih mendominasi pengeluaran rumahtangga di Tapin.



Tabel II. 45
Persentase Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022

JENIS PENGELUARAN	Tahun							
	2019		2020		2021		2022	
	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase
MAKANAN								
Padi-padian	63843	9.14	72709	10.07	76703	10.49	71408	10.02
Umbi-umbian	2192	0.31	2086	0.29	4865	0.67	4739	0.66
<i>Ikan/Udang/Cumi/Kerang</i>	80226	11.49	84391	11.69	94035	12.86	96036	13.47
Daging	25257	3.62	26736	3.7	29669	4.06	31054	4.36
Telur dan susu	38676	5.54	38087	5.28	39861	5.45	40557	5.69
Sayur-sayuran	36774	5.26	43126	5.98	50159	6.86	52703	7.39
Kacang-kacangan	9247	1.32	10551	1.46	12000	1.64	11171	1.57
Buah-buahan	34196	4.9	32187	4.46	23533	3.22	23940	3.36
Minyak dan kelapa	14445	2.07	14999	2.08	17255	2.36	23983	3.36
Bahan minuman	20994	3.01	24920	3.45	24167	3.31	23156	3.25
Bumbu-bumbuan	13597	1.95	13720	1.9	16632	2.27	18205	2.55
Konsumsi lainnya	16137	2.31	17383	2.41	19890	2.72	15900	2.23
Makanan dan minuman jadi	263913	36.57	263913	36.57	249348	34.11	223414	31.34
Rokok dan tembakau	76790	10.99	76936	10.66	72975	9.98	76551	10.74
Jumlah	698516	54,31	721745	54,84	731093	55,13	712819	53,04
BUKAN MAKANAN								
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	299696	50.99	324415	54.58	336250	25.35	345815	25.73
Aneka barang dan jasa	131247	22.33	119983	20.19	116920	8.82	120248	8.95
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	39007	6.64	41569	6.99	36346	2.74	32788	2.44





JENIS PENGELUARAN	Tahun							
	2019		2020		2021		2022	
	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan (Rp)	Persentase
Barang yang tahan lama	70216	11.95	41377	6.96	49855	3.76	66173	4.92
Pajak, pungutan, dan asuransi	25715	4.38	33008	5.55	39682	2.99	42367	3.15
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	21861	3.72	34055	5.73	16066	1.21	20594	1.53
Jumlah	587742	45,69	594408	45,16	595119	44.87	630983	46.96
TOTAL	1286258	100	1316153	100	1326212	100.00	1343803	100

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2020-2023





2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar- wilayah.

A. Jenis Dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Perusahaan perbankan di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang meningkat menjadi 6 unit.

Tabel II. 46
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Tapin Tahun 2019 -2021

Uraian	2019	2020	2021
Bank Umum			
Konvensional	9	9	9
Syariah	0	0	0
BPR			
Konvensional	1	6	6
Syariah	0	0	0
Total	10	15	15

Sumber : BPD Kabupaten Tapin, 2022

B. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 57% di tahun 2018 dan meningkat menjadi 60% tahun 2019, juga pada tahun 2021 naik menjadi 73%.

Tabel II. 47
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih di
Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih	57%	60%	63%	73%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tapin, 2022



2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi





tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan tingkat sarjana.

Tabel II. 48
Rasio Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Indikator	2021
1	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah Perguruan Tinggi	12.703
2	Jumlah Penuduk 15 tahun ke atas	145.676
3	Rasio Lulusan (1/2)	8.72

Sumber: BPS Tapin Sakernas Agustus 2021

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tabel II. 49
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2010 dan 2020

No	Uraian	2010	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	47.132	50.983
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	6.924	8.883
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) + (2)	54.056	59.866
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	113.821	129.609
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	47,49	46,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2021



Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,49 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Adapun tahun 2020 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,19 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

2.2. HASIL EVALUASI RPJMD KABUPATEN TAPIN 2018-2023

Perwujudan visi dan misi dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran RPJMD. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin sebagaimana dimuat dalam RPJMD Tahun 2018- 2023 akan dicapai dengan tolok ukur yang jelas per tahun.

Tingkat capaian indikator kinerja tujuan dapat mewakili ketercapaian masing-masing misi RPJMD untuk tahun 2019 – 2023:

- Pada tahun 2019, misi RPJMD Kabupaten Tapin yang memiliki predikat Sangat Tinggi adalah Misi 1, Misi 2, Misi 4, dan Misi 5. Sedangkan Misi 3 memiliki predikat Sangat Rendah.
- Pada tahun 2020 misi RPJMD Kabupaten Tapin kriteria Sangat Tinggi dicapai Misi 1, Misi 3, dan Misi 5, sedangkan Misi 2 memiliki kriteria Sedang. Selanjutnya, untuk Misi 4 memiliki tingkat capaian Sangat Rendah.
- Pada tahun 2021, misi RPJMD Kabupaten Tapin yang memiliki predikat Sangat Tinggi adalah Misi 1, Misi 2, Misi 3, dan Misi 5. Sedangkan Misi 4 memiliki predikat Sangat Rendah.





- Pada tahun 2022, misi RPJMD Kabupaten Tapin yang memiliki predikat Sangat Tinggi adalah Misi 1, Misi 2, Misi 3, dan Misi 4. Sedangkan Misi 5 memiliki predikat Sedang.
- Pada tahun 2023 (Proyeksi), misi RPJMD Kabupaten Tapin yang memiliki predikat Sangat Tinggi adalah Misi 1 dan Misi 2, predikat Tinggi pada Misi 3, dan predikat Rendah pada Misi 5. Sedangkan Misi 4 memiliki predikat Sangat Rendah.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. IKU memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023. Pencapaian IKU pemerintah daerah didukung oleh kinerja perangkat daerah dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi tingkat capaian 44 indikator kinerja RPJMD yang terdiri atas 10 indikator tujuan dan 34 indikator kinerja sasaran tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

a. Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2019 mencapai predikat Sangat Tinggi sebanyak 79,55 persen, Tinggi sebanyak 9,09 persen, Sangat Rendah sebanyak 6,82 persen, sementara Sedang sebanyak 2,27 persen dan Rendah sebanyak 2,27 persen.

b. Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2020 Capaian indikator kinerja dengan predikat Sangat Tinggi mencapai 77,27 persen, Sangat Rendah sebanyak 11,36 persen, Rendah sebanyak 6,82 dan Tinggi sebesar 4,55 persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh memburuknya kondisi sosial ekonomi dan berbagai sektor lainnya sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

c. Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2021 mencapai predikat Sangat Tinggi sebanyak 59,09 persen, Tinggi sebanyak 18,18 persen, Sangat Rendah sebanyak 11,36 persen, Rendah sebanyak 6,82 persen, dan Sedang sebanyak 4,55 persen.





d. Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2022 mencapai predikat Sangat Tinggi sebanyak 59,09 persen, Tinggi sebanyak 20,45 persen, Rendah sebanyak 9,09 persen, Sedang sebanyak 6,82 persen dan Sangat Rendah sebanyak 4,55 persen.

e. Proyeksi Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2023 mencapai predikat Sangat Tinggi sebanyak 56,82 persen, Tinggi sebanyak 15,91 persen, Rendah sebanyak 13,64 persen, Sangat Rendah sebanyak 9,09 persen dan Sedang sebanyak 4,55 persen.



Tabel II. 50
Pencapaian Misi RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Misi	2019		2020		2021		2022		2023	
	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya Dan Berdaya Saing	101,34	Sangat Tinggi	100,59	Sangat Tinggi	100,16	Sangat Tinggi	100,45	Sangat Tinggi	100,32	Sangat Tinggi
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Yang Dimulai Dari Desa	97,28	Sangat Tinggi	74,68	Sedang	93,15	Sangat Tinggi	92,19	Sangat Tinggi	94	Sangat Tinggi
Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	109,04	Sangat tinggi	149,91	Sangat Tinggi	100,83	Sangat Tinggi	91,96	Sangat Tinggi	86,72	Tinggi
Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	9936	Sangat Tinggi	-723,46	Sangat Rendah	-547,82	Sangat Rendah	208,95	Sangat Tinggi	50	Sangat Rendah
Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (<i>GoodAnd Clean Government</i>)	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	75	Sedang	60	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Tabel II. 51
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya Dan Berdaya Saing																								
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68,7	68,7	69,2	70,13	101,34	69,7	70,11	100,59	70,2	70,31	100,16	70,7	71,02	100,45	71,2	71,43	100,32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	71,2
Sasaran 1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7,53	7,53	7,91	7,75	97,98	8,3	7,76	93,49	8,72	7,77	89,11	9,15	7,95	86,89	9,61	7,95	82,73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	9,61
	Harapan lama sekolah (poin)	11,52	11,52	12,1	11,86	98,02	12,7	11,94	94,02	13,34	11,95	89,58	13,74	12,04	87,63	14	12,04	86,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	14
	Rasio budaya baca (poin)	0,002665	0,002665	0,002672	0,004831	180,80	0,002677	0,0008602	32,13	0,002679	0,000648	24,19	0,002685	0,00162664	60,58	0,002691	0,001659	61,65	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	0,002691
Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	69,72	70,42	70,23	99,73	71,12	70,4	98,99	71,83	70,54	98,20	72,55	70,88	97,70	73,28	71,5	97,57	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	73,28
Sasaran 3: Meningkatkan daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	11.4170,45	11.4170,45	11.760,0	12.088,00	102,79	12.112,800	11.841,00	97,76	12.746,150	11.952,00	93,77	12.850,450	12.247,000	95,30	13.235,950	12.377,590	93,41	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1.323,595
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	100	125,00	80	100	125,00	85	100	117,65	80	100	125,00	86,67	100	115,38	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	86,67
Sasaran 5: Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83,87	83,87	84,54	84,44	99,88	84,73	84,09	99,24	84,92	84,15	99,09	85,11	84,15	98,87	85,3	84,15	98,65	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	85,3
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72,99	73,11	73,17	65,16	89,05	73,25	64,97	88,70	73,32	64,97	88,61	73,39	64,97	88,53	73,47	64,97	88,43	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	73,47
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi																								



RPD KABUPATEN TAPIN 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023		
Berkualitas Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Yang Dimulai Dari Desa																									
Tujuan 1: Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,01	4,9	4,25	86,73	5	-1,5	-30,00	5,2	3,4	65,38	5,4	3,4	62,96	5,6	3,56	63,57	Tinggi	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	5,6	
	Indeks Gini (poin)	0,33	0,33	0,3	0,2684	110,53	0,3	0,2739	108,70	0,29	0,29	100,00	0,29	0,291	99,66	0,28	0,311	88,93	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	0,28	
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0,32	0,32	0,31	0,31	100,00	0,3	0,33	110,00	0,29	0,27	93,10	0,28	0,27	96,43	0,27	0,27	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0,27	
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5.897.160	6.192.450	6.254.189	6.455.630	103.222	6.441.815	6.358.880	98,71	6635069	6.575.520	99,10	6.834.121	6575520	96,22	7.039.145	6575520	93,41		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	7.039.145
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7.430.810	7.999.160	7.885.959	8.437.290	106,99	8.122.538	8.395.700	103,36	8366214	9.047.330	108,14	8.617.201	9047330	104,99	8.875.717	9047330	101,93		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	8.875.717
Sasaran 1: Meningkatkan Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21,88	20,54	22,78	20,5	89,99	23,15	21,22	91,66	23,53	15,4	65,45	23,91	15,4	64,41	24,3	16	65,84	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	24,3	
	Kontribusi sektor peternak	2,1	2,3	2,5	1,48	59,20	2,6	1,49	57,31	2,7	1,5	55,56	2,8	1,5	53,57	2,9	1,6	55,17	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	2,9	





RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	
	an terhadap PDRB (%)																							
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,2	1,3	1,4	1,85	132,14	1,5	1,91	127,33	1,6	1,8	112,50	1,7	1,82	107,06	1,8	1,85	102,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1,8
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7,03	6,83	7,2	6,8	94,44	7,4	6,69	90,41	7,6	6,82	89,74	7,8	6,82	87,44	8	6,82	85,25	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	8
Sasaran 2: Meningkatkan Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2,5	2,7	3	5,95	198,33	3,2	5,76	180,00	3,5	2,46	70,29	3,7	2,46	66,49	4	2,46	61,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	4
Sasaran 3: Meningkatkan Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,1	1,2	1,3	1,23	94,62	1,4	1,3	92,86	1,5	1,27	84,67	1,6	1,27	79,38	1,7	1,27	74,71	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	1,7
Sasaran 4: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0,54	0,55	0,56	0,63	112,50	0,57	0,65	114,04	0,68	0,6823	100,34	0,7	0,73	103,61	0,73	0,73	99,36	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0,6
Sasaran 5: Meningkatkan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83,9	86,2	85	93,8	110,35	86	89,9	104,53	87	88,4	101,61	88	86,2	97,95	90	86,2	95,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	90
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,77	3,76	3,75	3,41	109,07	3,65	3,06	116,16	3,55	3,6	98,59	3,45	3,6	95,65	3,35	3,59	92,84	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3,35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,4	0,41	0,42	0,46	90,48	0,43	0,45	95,35	0,44	0,28	136,36	0,45	0,328	127,11	0,46	0,31	132,17	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0,46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,08	0,08	0,07	0,09	71,43	0,06	0,12	0,00	0,05	0,04	120,00	0,04	0,071	22,50	0,03	0,067	-22,22	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	0,03
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	4,39	4,25	4	3,65	108,75	3,8	3,73	101,84	3,6	4,96	62,22	3,4	4,15	77,94	3,2	3,6	87,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi	3,2



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan																								
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43,49	44,55	46,67	50,89	109,04	52,33	78,45	149,91	55,33	55,79	100,83	60,67	55,79	91,96	64,33	55,79	86,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	67,67
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54,32	50	60	73,9	123,17	63	80,77	128,21	66	70,12	106,24	70	71,77	102,53	75	72	96,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	75
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	53,08	102,08	55	68,6	124,73	58	44	75,86	60	53	88,33	65	60	92,31	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	65
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55,48	55,65	56	59,65	106,52	58	62,83	108,33	60	68,11	113,52	62	70,14	113,13	64	60	93,75	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	64
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	31,97	47,72	69	36,5	52,90	71	17,08	24,06	73	55	75,34	75	65	86,67	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi	75
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44,06	137,69	44	48,75	110,80	48	40,21	83,77	60	50	83,33	64	60	93,75	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	64
Sasaran 5: Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi	80	85	90	95	105,56	92	95	103,26	94	95,23	101,31	96	96,83	100,86	98	100	102,04	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	98



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	
	asi (%)																							
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1,39	1,48	0,56	-1,11	198,21	0,11	15,84	14400,00	2,69	-2,68	-99,63	0,01	2,62	26200,00	0,32	0,02	6,25	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	0,32
Sasaran 1: Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	53,03	57,03	53,329	56,4	105,76	53,389	65,33	122,37	54,829	63,58	115,96	54,835	65,25	118,99	55,015	65,26	118,62	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	55,015
	Tingkat kepatuhan terhadap RTRW (%)	45	46	48	60	125,00	57	65	114,04	63	80	126,98	69	60	86,96	75	70	93,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	75
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97,5	97,62	97,74	97,56	99,82	97,86	97,77	99,91	75	74,79	99,72	88	86,47	98,26	91	90,12	99,03	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	98,22
Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat																								
Tujuan 1: Meningkatkan investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4,6	5	496,8	9936	5,2	-37,62	72.346,154	5,5	-30,13	547,82	5,7	11,91	208.947.368	6	3	50	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	6
Sasaran 1: Meningkatkan keamanan daerah	Indeks rasa aman (point)	0	0	0,49	0,49	100	0,5	0,5	100	0,51	0,65	127,451	0,52	0,5	96,15	0,53	0,5	94,34	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0,53
Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)																								
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (point)	0	0	C	CC	100	CC	CC	100	CC	CC	100	B	CC	75	BB	CC	60	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	BB





RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	
melayani masyarakat																								
Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	100	B	B	100	B	B	100%	BB	B	80	BB	BB	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	WTP
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (point)	0	0	99	37,27	37,65	99	40,13	40,54	99	40,23	40,64	99	40,13	40,54	99	50	50,51	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	99
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (point)	75	76	77	75	97,4	79	82,4	104,30	81	96,25	118,83	83	83,48	100,58	83	83,5	100,60	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	85





2.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Tapin berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan sebelumnya berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II. 52
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.24	(1.49)	3.43	4,91
2	Laju inflasi	4,15	1,67	2,52	
3	PDRB per kapita	44,55	44,42	47,17	65,61
4	Indeks Gini	0.27	0.27	0.29	0.291
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0.31	0.3	0.29	0.27
6	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	3.41	3.06	3.60	3.60
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.13	70.11	70.31	71.02
8	Angka Harapan Hidup	70,23	70,4	70,57	70,88
9	Angka Melek Huruf	69,3	70,17	70,31	
10	Rata-rata lama sekolah	7.91	8.3	8.72	7.95
11	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	12 088	11 841	11 952	N/A
12	Angka melek huruf	69,3	70,17	70,31	N/A
13	Persentase balita gizi buruk	100	N/A	N/A	N/A
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66.77	70.17	70.31	70.31
15	Tingkat pengangguran terbuka	3.79	3.73	4,96	4,15
16	Rasio penduduk yang bekerja	96,21	96,27	95,04	95,85
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	82.55	83,42	83.48
18	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	98,2	84,5	88,4	N/A
20	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	22.78	23.15	23.53	N/A
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3	3.2	3.5	2.46
22	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1.4	1.5	1.6	1.82
23	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,58	10,80	10,24	8,70
24	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,81	6,65	6,57	5,13



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi per kapita	1286258	1316153	1316153	1343803
2	Jumlah Unit Perbankan	10	15	15	15
3	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih	60%	63%	73%	70.14
4	Rasio lulusan S1/S2/S3	N/A	N/A	8,72	10.91
5	Rasio Ketergantungan	N/A	47,49	46,19	
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	84,17 %	72,29%	62,48%	N/A
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,48%	83,41%	90,84%	N/A
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	67,34%	64%	65,86%	N/A
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	520,97%	2,25%	2,26%	N/A
b) Kesehatan					
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,06%	0,06%	0%	N/A
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50%	50%	100%	N/A
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85,25%		100%	N/A
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	69,42%	74,68%	95%	N/A
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,44 %	95,80%	99%	N/A
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	67,85%	80,93%	92%	N/A
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,20%	70,29%	87%	N/A
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,54%	19,92%	25%	N/A
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	13,49%	24,81%	48%	N/A
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	12,72%	60,12%	16%	N/A



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
	pelayanan kesehatan sesuai standar				
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28,08%	60,12%	75%	N/A
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	63,36%	81,73%	81,73%	N/A
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	48,23 %	2109,00%	20%	N/A
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,57 %	58,07%	58,07%	N/A
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	SUKET	0%	22,76%	N/A
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	SUKET	0%	0%	N/A
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,24%	10,20%	14,01%	N/A
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	59,65 %	62,83%	68,11%	N/A
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,05 %	81,73%	0%	N/A
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		65,66%	70,12%	71,77
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	27,61 %	N/A	62,00%	N/A
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	100%	100%	N/A
d) Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	0%	0%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	0%	65%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	97%	0,94%	N/A



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,44%	41,63%	14,03%	N/A
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	0,66%	0,65%	0%	N/A
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	86,43%	100%	100%	N/A
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	19,44%	22,22%	41,66%	71,63%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6530 orang	100%	7220 orang	N/A
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6530 orang	100%	120	N/A
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2480 Orang	100%	85%	N/A
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	85%	N/A
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	13 menit	13 menit	N/A
f) Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	34,23%	29,00%	2,50%	N/A
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	N/A
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	166,67 %	100 %	100%	N/A
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	77,30%	2,016%	57,90%	N/A
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	28219717788,46%	208.287,9954	31,399,946%	N/A
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	28219717788,46%	3,82 %	68%	N/A
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	60,98%	93,79%	65%	N/A



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,77%	1,2599%	27,93%	N/A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02%	0,020%	0,27%	N/A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0%	0,013%	0%	N/A
c) Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1391,24%	172,38%	1844,60%	N/A
d) Pertanian					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	N/A
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	0%	100%	N/A
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	88,71%	0%	0,94%	N/A
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	775913,07%	33,76%	14,03%	N/A
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	0%	0%	N/A
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	100%	100%	N/A
e) Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	63,00	69,09	63,58	65,25
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74,74%	71,87%	56,34%	55,64
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	26,32%	100%	47,37%	N/A
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	perekaman KTP elektronik	98,31 %	97,43%	100,15%	N/A
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	N/A	96,51%	67,08%	N/A
3	kepemilikan akta kelahiran	99,84 %	90,7%	97,35%	10306
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	N/A	75,93%	100%	N/A



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	100%	27,27%	100%	N/A
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	100%	31%	27,428%	N/A
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18%	0%	2,26%	N/A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	82,23 %	12,28%	85,27%	N/A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,93%	0,00%	7,22%	N/A
i) Perhubungan					
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	N/A	0%	0%	N/A
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0%	0%	0%	N/A
j) Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46,67 %	26%	26%	N/A
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	N/A
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	0,14%	37,07%	50%	N/A
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	82,88 %	11,49%	8,11%	N/A
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0%	23,29%	27%	N/A
l) Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	496,83 %	(37.62%)	-30,13%	N/A
m) Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,02%	0%	1,82%	N/A
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,69%	0%	2,31%	N/A
3	Peningkatan prestasi olahraga	SUKET	0%	0%	N/A
n) Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	78%	83%	N/A
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam	100%	78%	83%	N/A



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
	melakukan evaluasi pembangunan daerah				
o) Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	0%	61%	N/A
p) Kebudayaan					
1	Terlestariannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	N/A
q) Perpustakaan					
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	1370,16%	10%	0%	0,001
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	0%	27,15%	N/A
r) Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	70,10%	519	0,56	N/A
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	53,60%	58,17	60,83	N/A
Urusan Pilihan					
a) Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	434076,0%	4.480,85 Ton	4.311,145 Ton	N/A
b) Pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	362,35%	-100%	0%	N/A
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	21,38%	-55,6%	25,22%	N/A
3	Tingkat hunian akomodasi	7068,21%	14,99%	29,27%	N/A
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	0,05%	5,70%	0,00	N/A
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,04%	2,54%	2,57%	N/A
c) Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	506,28%	5,08 ton/hekta	5,04%	N/A
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	50,00%	-100%	-100%	N/A



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
d) Kehutanan					
e) Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Suket	N/A	N/A	N/A
f) Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	45,22%	52,63%	50%	N/A
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	92,85%	97,78%	79%	N/A
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66,49%	0,10%	5,25%	43,009%
g) Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	N/A	0%	1,30%	N/A
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	N/A	0%	0%	N/A
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	N/A
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	0%	0%	N/A
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	N/A	0%	0%	N/A
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	N/A	0%	95%	N/A
h) Transmigrasi					
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
a) Perencanaan dan Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,72 %	12,093%	0,09%	N/A
2	Rasio PAD	1,59%	N/A	N/A	N/A
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	N/A	N/A	Level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	N/A	N/A	Level 2



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	17,71%	N/A	N/A	N/A
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	N/A	0%	0%	N/A
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	58,73%	43,32%	46,64%	N/A
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	95,57%	97,59%	36,90%	N/A
c) Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	442%	5,04%	N/A
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	62,20%	11,22%	N/A
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	40%	29,12%	N/A
d) Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	87,91%	38,31%	89,86%	N/A
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	N/A	40,49%	126,19%	N/A
3	Manajemen Aset	YA	YA	YA	N/A
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	34,32%	32,85%	23,92%	N/A
e) Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	N/A



2.4. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TAPIN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 53
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	PENDIDIKAN					
	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	84,17	85,22	69,57	74,54
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI dan SMP/MTs	%	81,39	88,18	83,19	83,03
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	1,11	0,82	2,26	57,15
2	KESEHATAN					
2.01	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT					
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	85,2	86,57	90	87,1
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	69	74,68	77	79,7
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	90,5	95,81	98,93	95,4
	Pelayanan Kesehatan Balita	%	67,85	80,93	92,02	98,8
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	97,20	70,31	87,16	35,9
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	63,26	24,81	48	48,4
2.02	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT					
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	44,60	19,93	24,76	23,1
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	12,72	10,78	16	16,4
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	28,08	60,12	74,73	78,5
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	63,36	81,74	139,14	143,
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	47,58	21,09	20,01	29,2
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	99,16	58,08	77,49	74,3



No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
3	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS					
3.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
03.01.01	PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Penertiban dan penegakan perda	%	0	100	100	100
03.01.02	PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	100	85,71	100
3.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	%	100	100	100	100
	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	%	87	89	50	54
	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulanganbencana dalam bentuk dokumen resmi	%	100	100	100	100
	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	%	100	100	100	100
	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	0	2	1	6
	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	1	1	4
	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	%	83	86	50	186
	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	%	0	0	100	100
	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	%	0	100	100	100
	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	%	100	0	0	100
	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100
	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	%	84	90	100	100
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG & BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4.01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	59,65	81	68,11	70,14
	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,05	54	86,68	88,08
4.02	Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman					
	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%		100	100	100
	Persentase jumlah warga negara yang	%		65,05	65,05	100



No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah layak huni					
5	BIDANG URUSAN SOSIAL					
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	4,95	0	98	96,12
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	29,63	9,56	94	100
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	34,32	30,16	96	93,76
	Persentase (%) gelandang pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	0	100	100
	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	51,81	100	100	100

2.5. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 - 2030 yang meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi.

Secara umum, ketercapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hingga mencapai 68 persen dengan 201 indikator SDG's dan 137 diantaranya tercapai dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini harus terus ditingkatkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.



Tabel II. 54
Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2022

POIN SDG'S	JUMLAH INDIKATOR	JUMLAH INDIKATOR TERCAPAI	JUMLAH INDIKATOR TIDAK TERCAPAI	JUMLAH INDIKATOR TANPA DATA	PERSENTASE INDIKATOR TERCAPAI
1	12	7	4	1	58%
2	3	2	1	0	67%
3	20	11	9	0	55%
4	9	3	6	0	33%
5	12	10	2	0	83%
6	70	50	14	6	71%
7	-	-	-	-	-
8	30	22	6	2	73%
9	2	0	0	2	0%
10	7	6	0	1	86%
11	12	11	1	0	92%
12	6	5	1	0	83%
13	3	3	0	0	100%
14	-	-	-	-	-
15	13	7	6	0	54%
16	-	-	-	-	-
17	2	0	2	0	0%
Jumlah	201	137	52	12	68%



Tabel II. 55
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial
Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Tujuan Sdgs 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun					
Indikator Sdgs: 1.3.1.(A) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui Sjsn Bidang Kesehatan.					
Indikator Program: Persentase Masyarakat Miskin Yang Terlayani Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	Tercapai Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.					
Indikator Program: Persentase Ppks Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan, Pengemis) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial					
Program : Rehabilitasi Sosial					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	42,91		Dinas Sosial
Indikator Sdgs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.					
Indikator Program: Persentase Ppks Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	%	88,56	46,93	Tidak Tercapai Dinas Sosial



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
	Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Sdgs: 1.4.1.(B) Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap.						
Indikator Program: Prosentase Desa Yang Melaksanakan Universal Child Immunization (Uci)						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Universal Child Immunization (Uci)	%	93	78,50	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 1.4.1.(D) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.						
Indikator Program: Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Bersih (%)						
Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
1.03.03.2.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	97,54	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator Sdgs: 1.4.1.(E) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.						
Indikator Program: Program: Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Limbah (%)						
Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
1.03.05.2.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	101,82	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator Sdgs: 1.4.1.(G) Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Sederajat.						



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Program: Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A						
Program : Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A	%	95	95,85	Tercapai	Dinas Pendiidikan
Indikator Sdgs: 1.4.1.(H) Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Sederajat.						
Indikator Program: Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Paket B						
Program : Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Paket B	%	66	65,86	Tidak Tercapai	Dinas Pendiidikan
Indikator Sdgs: 1.4.1.(J) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.						
Indikator Program: Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran						
Program : Program Pencatatan Sipil						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	52,52	52,52	Tercapai	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Indikator Sdgs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah.						
Indikator Program: Persentase Desa Tangguh Bencana						
Program : Program Penanggulangan Bencana						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	70	70	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator Sdgs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Berisiko Tinggi.						
Indikator Program: Persentase Desa Tangguh Bencana						
Program : Program Penanggulangan Bencana						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	70	70	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah





Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator Sdgs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.						
Indikator Program: Persentase Desa Tangguh Bencana						
Program : Program Penanggulangan Bencana						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	70	70	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan Sdgs 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Indikator Sdgs: 2.1.1.(A) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita.						
Indikator Program: Persentase Pelayanan Gizi Balita						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Gizi Balita	%	80	64,55	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 2.1.2.(A) Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.						
Indikator Program: Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Program : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Persentase Enyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	%	100	100	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan





Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator Sdgs: 2.2.2.(C) Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Mencapai; Dan Tingkat Konsumsi Ikan.						
Indikator Program: Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Program : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100	100	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan Sdgs 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
Indikator Sdgs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (Aki).						
Indikator Program: Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	%	80	90	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.2.1* Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup.						
Indikator Program: Persentase Pelayanan Kesehatan Anak						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak	%	80	92,02	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (Akn) Per 1000 Kelahiran Hidup.						
Indikator Program: Persentase Pelayanan Kesehatan Anak						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak	%	80	92,02	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.2.2.(A). Angka Kematian Bayi (Akb) Per 1000 Kelahiran Hidup.						





Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Program: Persentase Pelayanan Kesehatan Anak					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak	%	80	92,02	Tercapai Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.2.2.(B) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.					
Indikator Program: Prosentase Desa Yang Melaksanakan Universal Child Immunization (Uci)					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Universal Child Immunization (Uci)	%	93	78,50	Tidak Tercapai Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.3.1.(A) Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.					
Indikator Program: Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar	%	100	77	Tidak Tercapai Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.3.2.(A) Insiden Tuberkulosis (Itb) Per 100.000 Penduduk.					
Indikator Program:					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Orang Terdugabc Yang Mendapatkan Pelayanan Tbc Sesuai Standar	%	100	20	Tidak Tercapai Dinas Kesehatan



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Sdgs: 3.3.3* Kejadian Malaria Per 1000 Orang.						
Indikator Program: Angka Api Malaria						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Api Malaria	%	< 1 Per 1000 Penduduk	0,01	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.3.3.(A) Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria.						
Indikator Program: Angka Api Malaria						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Api Malaria	%	< 1 Per 1000 Penduduk	0,01	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.3.4.(A) Persentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.						
Indikator Program: Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59	%	100	24,74	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.3.5* Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).						
Indikator Program: Prevalensi Penderita Kusta						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Penderita Kusta	%	< 1 Per 1000 Penduduk	0,36	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.3.5.(B) Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Filariasis (Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).						
Indikator Program: Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15	%	100	24,74	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
- 59					
Indikator Sdgs: 3.4.2 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.					
Indikator Program: Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59	%	100	24,74	Tidak Tercapai Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.4.3. Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun.					
Indikator Program: Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59					
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Skrenning Penyakit Tidak Menular Usia 15 - 59	%	100	24,74	Tidak Tercapai Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.7.1.(A) Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.					
Indikator Program: Persentase Peserta Kb Aktif Mkjp					
Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)					
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peserta KB Aktif Mkjp	%	8,87	13,55	Tercapai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Indikator Sdgs: 3.7.2.(A) Total Fertility Rate (Tfr).					
Indikator Program: Tingkat Fertilitas Total (TFR) Per Wus (15-49 Tahun)					
Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Fertilitas Total (TFR) Per Wus (15-49 Tahun)	%	2,09	2,26	Tercapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Sdgs: 3.8.1.(A) Unmet Need Pelayanan Kesehatan.						
Indikator Program: Persentase Peserta Kb Aktif Mkjip						
Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif Mkjip	%	8,87	13,55	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 3.8.2.(A) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn).						
Indikator Program: Persentase Masyarakat Miskin Yang Terlayani Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar						
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.B.1.(A) Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas.						
Indikator Program: Persentase Obat Dan Bakhp Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar						
Program : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman						
Pemberian Izi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Persentase Obat Dan Bakhp Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	%	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Sdgs: 3.C.1* Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan.						
Indikator Program: Persentase Sdmk Yang Kompeten (Memiliki STR)						
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sdmk Yang Kompeten (Memiliki STR)	%	100	85	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Tujuan Sdgs 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua						
Indikator Sdgs: 4.1.1.(A) Persentase Sd/Mi Berakreditasi Minimal B.						



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Program: Persentase Sekolah Yang Terakreditasi Jenjang Sd						
Program : Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi Jenjang SD	%	100	97,19	Tidak Tercapai	Dinas Pendiidikan
Indikator Sdgs: 4.1.1.(B) Persentase SMP/Mts Berakreditasi Minimal B.						
Indikator Program: Persentase Sekolah Yang Terakreditasi Jenjang Smp						
Program : Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi Jenjang SMP	%	90	100	Tercapai	Dinas Pendiidikan
Indikator Sdgs: 4.1.1.(D) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sd/Mi/Sederajat.						
Indikator Program: Angka Partisipasi Kasar (APK) Sd/Mi/Paket A						
Program: Program Pengelolaan Pendidikan						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (Apk) Sd/Mi/Paket A	%	100	99,28	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Indikator Sdgs: 4.1.1.(E) Angka Partisipasi Kasar (Apk) Smp/Mts/Sederajat.						
Indikator Program: Angka Partisipasi Kasar (Apk) Smp/Mts/Paket B						
Program: Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (Apk) Smp/Mts/Paket B	%	90	77,53	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Indikator Sdgs: 4.2.2.(A) Angka Partisipasi Kasar (Apk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud).						
Indikator Program: Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud						





Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Program: Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Angka Partisipasi Kasar (Apk) Paud	%	78	85,18	Tercapai	Dinas Pendidikan
Indikator Sdgs: 4.6.1.(A) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun.						
Indikator Program: Persentase Warga Negara Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 18 (Delapan Belas) Tahun Yang Mengikuti Program Pendidikan Non Formal						
Program : Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 18 (Delapan Belas) Tahun Yang Mengikuti Program Pendidikan Non Formal	%	2	2,26	Tercapai	Dinas Pendidikan
Indikator Sdgs: 4.A.1* Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash).						
Indikator Program: Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik						
Program : Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	100	91,9	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	100	95	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Indikator Sdgs: 4.C.1* Persentase Guru Tk, Sd, Smp, Sma, Smk, Dan Plb Yang Bersertifikat Pendidik.						
Indikator Program: Persentase Pendidik (Guru) Yang Bersertifikasi						



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Program : Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan						
Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik (Guru) Yang Bersertifikasi	%	51,49	47,53	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Tujuan Sdgs 5: Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
Indikator Sdgs: 5.1.1* Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan.						
Indikator Program: Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) Pada Belanja Langsung Apbd						
Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) Pada Belanja Langsung Apbd	%	2,3	24,93	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.2.1* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.						
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti						
Program : Program Perlindungan Perempuan						
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti	%	90	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditindaklanjuti						
Program : Program Perlindungan Khusus Anak						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditindaklanjuti	%	90	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.2.1.(A) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan.						



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditindaklanjuti						
Program : Program Perlindungan Khusus Anak						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditindaklanjuti	%	90	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.2.2* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.						
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti						
Program : Program Perlindungan Perempuan						
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti	%	90	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.2.2.(A) Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.						
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti						
Program : Program Perlindungan Perempuan						
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti	%	90	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun.						
Indikator Program: Prosentase Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Tapin						
Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Tapin	%	2,3	5,7	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah.						



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator Program: Prosentase Keterlibatan Perempuan Di Parlemen						
Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Keterlibatan Perempuan Di Parlemen	%	30	16	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.5.2* Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial.						
Indikator Program: Persentase Perempuan Yang Terlibat Di Pemerintahan Daerah						
Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Terlibat Di Pemerintahan Daerah	%	55	53,80	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.6.1* Proporsi Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, Dan Layanan Kesehatan Reproduksi.						
Indikator Program: Tingkat Fertilitas Total (TFR) Per Wus (15-49 Tahun)						
Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Fertilitas Total (TFR) Per Wus (15-49 Tahun)	%	2,09	2,26	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.6.1.(A) Unmet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/Kb Yang Tidak Terpenuhi).						
Indikator Program: Persentase Peserta KB Aktif Mkjp						
Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Kb Aktif Mkjp	%	8,87	13,55	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 5.6.1.(B) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern.						
Indikator Program: Persentase Peserta Kb Aktif Mkjp						



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peserta Kb Aktif Mkjp	%	8,87	13,55	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Tabel II. 56
 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi
 Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)	
Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
Indikator SDGs: 8.1.1.(a) PDB per kapita.						
Indikator Program:	1. Jumlah Produksi Padi (Ton)					
	2. Jumlah Produksi Jagung (Ton)					
	3. Jumlah Produksi Cabai Rawit Hiyung (Ton)					
	4. Jumlah Produksi Jahe (Ton)					
	5. Jumlah Produksi Jeruk (Ton)					
	6. Jumlah Produksi Karet (Ton)					
	7. Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton CPO)					
Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Panen padi	Ha	82753	84193	Tercapai	Dinas Pertanian
	Luas Panen Jagung	Ha	1455	1558	Tercapai	Dinas Pertanian
	Luas Panen cabe Rawit Hiyung	Ha	211,6	202	Tercapai	Dinas Pertanian
	Luas Panen Jahe	Ha	50	60,83	Tercapai	Dinas Pertanian
	Luas Panen Jeruk	Ha	802,8	657,18	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
	Luas tanaman Karet	Ha	14978	13259	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
	Luas tanaman Kelapa Sawit	Ha	10274	11678	Tercapai	Dinas Pertanian
	Produktivitas Padi	Ku/Ha	50,14	50,39	Tercapai	Dinas Pertanian
	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	50,72	51,5	Tercapai	Dinas Pertanian
	Produktivitas Cabe rawit Hiyung	Ku/Ha	75,5	69,03	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
	Produktivitas	Ku/Ha	87	100	Tercapai	Dinas Pertanian



Program/Indikator		Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Jahe					
	Produktivitas Jeruk	Ku/Ha	399,05	395,1	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
	Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha)	Kg/Ha	659,01	614	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
	Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Kg CPO/Ha)	Kg CPO/Ha	5053,1	4996	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
Indikator Program: Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro						
Program: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Waktu Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bulan	12			Dinas Perindustrian
Indikator Program:						
Program: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		%	100	100	Tercapai	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		%	100	100	Tercapai	Dinas Perikanan
Indikator Program:						
Program: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/		%	100	100	Tercapai	Dinas Perikanan



Program/Indikator		Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)	
Kota							
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Dinas Perikanan	
Indikator Program: Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina							
Program: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaku Usaha Pariwisata yang aktif	buah	10	10	Tercapai	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Indikator Program: Persentase Koperasi Aktif							
Program: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Bulan	12			DINAS Perindustrian	
Indikator SDGs: 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.							
Indikator Program: Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi							
Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarakan Unit Kompetensi		Orang	96	96	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja	
Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta		Lembaga	15	15	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja	
Indikator SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.							



Program/Indikator	Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)	
Indikator Program: Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro						
Program : PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Waktu Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bulan	12		Dinas Perindustrian	
Indikator SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).						
Indikator Program: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan kluster kompetensi						
Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Orang	96	96	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta		Lembaga	15	15	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
Indikator Sdgs: 8.9.1* Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB.						
Indikator Program: Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan						
Program : PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	buah	10	10	Tercapai	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Indikator SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.						
Indikator Program: Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan						
Program : PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	buah	10	10	Tercapai	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Program/Indikator	Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)	
Indikator SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.						
Indikator Program: Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan						
Program : PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	buah	10	10	Tercapai	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Indikator SDGs: 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.						
Indikator Program: Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan						
Program : PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata yang dipasarkan	buah	10	10	Tercapai	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Indikator SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.						
Indikator Program:	1. Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia					
	2. Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka					
Program : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Bulan	12			Dinas Perindustrian
Indikator SDGs: 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.						



Program/Indikator	Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)	
Indikator Program:	1. Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia					
	2. Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka					
Program : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan	12		Dinas PerindustriaN	
Tujuan SDGs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara						
Indikator SDGs: 10.1.1* Koefisien Gini.						
Indikator Program: Persentase Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Orang	105	105	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Orang	1300	1233	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Orang	167	162	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
Indikator Program: Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial						
Program: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	%	88,56	46,93	Tidak Tercapai	Dinas Sosial



Program/Indikator		Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Program:						
Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	98,61	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayan Masyarkat Desa
Indikator Program: Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina						
Program: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaku Usaha Pariwisata yang aktif				Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Program/Indikator	Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)	
Indikator SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal.						
Indikator Program: Persentase Desa Berstatus Maju						
Program : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator SDGs: 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.						
Indikator Program: Persentase Desa Berstatus Maju						
Program : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tujuan SDGs 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
Indikator SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						
Indikator Program: Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	63	Tidak Tercapai	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Indikator SDGs: 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.						
Indikator Program: Persentase Penerimaan Pendaptan Asli Daerah (PAD)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	63	Tidak Tercapai	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah



Tabel II. 57
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Tujuan SDGs 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan						
Indikator SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.						
Indikator Program: Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih (%)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	97,54	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator SDGs: 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.						
Indikator Program: Program: Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih (%)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	97,54	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).						
Indikator Program: Program: Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Air Limbah (%)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	101,82	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator Program: Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat						



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat	%	80	84,70	Tercapai	Dinas Kesehatan
Indikator Program: Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)						
Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Bulan	12	12	Tercapai	Dinas Perkim
Indikator SDGs: 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.						
Indikator Program: Program: Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Air Limbah (%)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	101,82	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator SDGs: 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.						
Indikator Program: Program: Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Air Limbah (%)						
Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	101,82	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Indikator SDGs: 6.3.2.(a) Kualitas air danau.						
Indikator Program: 1. Status Mutu Air (status)						
5. Persentase air permukaan yang diuji sesuai baku mutu						
Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	3	3	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.						
Indikator Program: 1. Status Mutu Air (status)						
5. Persentase air permukaan yang diuji sesuai baku mutu						
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	3	3	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan SDGs 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
Indikator SDGs: 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.						
Indikator Program: Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani						
Program : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	Tercapai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Indikator Program: Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil						
Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%	45,68	79,53	Tercapai	Dinas Sosial
Indikator SDGs: 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani						
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs: 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).						



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani						
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs: 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.						
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani						
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs: 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.						
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani						
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.02.04.1.01 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs: 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.						
Indikator Program:	1. Persentase cakupan area pelayanan (%)					
	2. Persentase volume sampah yang tertangani (%)					
	3. Persentase Areal Publik Bebas Sampah (%)					
	4. Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif (%)					
	5. Persentase volume sampah yang dikurangi (%)					
	6. Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) (%)					
	7. Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (%)					
	8. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah (%)					



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
2.11.11.2.01 Sampah	Pengelolaan petugas kebersihan menangani sampah (orang)	Orang	295	295	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi (unit)	Unit	24	15	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah peserta yang dibina (orang)	Orang	60	85	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun (unit)	Unit	7	11	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Indikator SDGs: 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.						
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani						
Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan						
Indikator SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).						
Indikator Program: Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)						
Program : PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mengajukan ijin penyimpanan TPS LB3 (Perusahaan)	Perusahaan	6	7	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah laporan rekomendasi hasil verifikasi lapangan (Laporan)	Laporan	6	7	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Indikator SDGs: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.						



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana		
Indikator Program:							
		1. Persentase cakupan area pelayanan (%)					
		2. Persentase volume sampah yang tertangani (%)					
		3. Persentase Areal Publik Bebas Sampah (%)					
		4. Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif (%)					
		5. Persentase volume sampah yang dikurangi (%)					
		6. Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) (%)					
		7. Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (%)					
		8. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah (%)					
Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah (orang)	Orang	295	295	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi (unit)	Unit	24	15	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta yang dibina (orang)	Orang	60	85	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun (unit)	Unit	7	11	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan SDGs 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
Indikator SDGs: 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.							
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani							
Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.							
Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani							
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Terhadap Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Bencana Daerah
5.02.04.1.01 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati						
Indikator SDGs: 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.						
Indikator Program:	Persentase Kawasan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan Sebagai Kawasan Keanekaragaman Hayati (%)					
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tapin (%)					
	Persentase Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting (%)					
Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hayati Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup



Tabel II. 58
 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum & Tata Kelola
 Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Tujuan Sdgs 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan						
Indikator Sdgs: 16.2.1.(A) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir.						
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindak Lanjuti (%)						
Program : Program Perlindungan Khusus Anak						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	55	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	60	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 16.2.1.(B) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.						
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindak Lanjuti (%)						
Program : Program Perlindungan Khusus Anak						
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	55	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
Indikator Sdgs: 16.2.3.(A) Proporsi Perempuan Dan Laki-Laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun.						
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti						
Program : Program Perlindungan Perempuan						
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditindaklanjuti	%	90	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Program: Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditindak Lanjuti (%)						
Program : Program Perlindungan Khusus Anak						
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	60	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 16.6.1.(A) Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
Indikator Program: Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin						
Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan						
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Yang Dilakukan Pemeriksaan Tepat Waktu	%	100	100	Tercapai	Inspektorat
Indikator Sdgs: 16.6.1.(B) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
Indikator Program: Persentase Skpd Binaan Dengan Nilai Sakip Skpd Berkategori Sangat Baik						
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
4.01.04.02 Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	%	100	100	Tercapai	Sekretariat Daerah





Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Sdgs: 16.6.1.(C) Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan.						
Indikator Program: Persentase Paket Pekerjaan Yang Dapat Diselesaikan Proses Lelangnya						
Program : Program Perekonomian Dan Pembangunan						
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa					Sekretariat Daerah
Indikator Sdgs: 16.6.1.(D) Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
Indikator Program:Persentase Skpd Binaan Dengan Nilai Sakip Skpd Berkategori Sangat Baik						
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
4.01.04.02 Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	%	100	100	Tercapai	Sekretariat Daerah
Indikator Sdgs: 16.7.1.(A) Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd).						
Indikator Program: Prosentase Keterlibatan Perempuan Di Parlemen						
Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Keterlibatan Perempuan Di Parlemen	%	30	16	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 16.7.1.(B) Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon I Dan Ii).						
Indikator Program: Persentase Perempuan Yang Terlibat Di Pemerintahan Daerah (%)						
Indikator Program: Persentase Perempuan Yang Terlibat Di Pemerintahan Daerah						
Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Terlibat Di Pemerintahan Daerah	%	55	53,80	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indikator Sdgs: 16.9.1.(A) Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah.						



Program/Indikator		Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Indikator Program: Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran						
Program : Program Pencatatan Sipil						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	52,52	52,52	Tercapai	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Indikator Sdgs: 16.9.1.(B) Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran.						
Indikator Program: Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran						
Program : Program Pencatatan Sipil						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	52,52	52,52	Tercapai	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga turut harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani Covid-19 demi meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah merubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat





Indonesia, baik gaya hidup, belajar maupun cara bekerja. Hingga saat ini, perubahan-perubahan masih terus terjadi dan secara pasti cara-cara konvensional mulai bergeser ke arah digital dan *online*.

Kedudukan perencanaan sangatlah strategis dalam pembangunan dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kondisi saat ini memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi target keuangan dan melakukan berbagai *refocussing* anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan fiskal nasional mulai dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25, berbagai stimulus ekonomi dan berbagai macam bantuan sosial yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu menahan terjadinya resesi ekonomi agar tidak terlalu dalam di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional telah mengalami kontraksi.

Kondisi pasar keuangan global masih terus diwarnai oleh ketidakpastian disebabkan adanya kekhawatiran dalam pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Berbagai skenario yang telah dirumuskan membuat postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih terfokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kembali semua asumsi dan target ekonomi termasuk di level pusat.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan ekonomi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerah atau APBD untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tapin harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan





dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001



Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapin berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 DOFD Kabupaten Tapin mencapai angka 8% yang berarti masuk dalam kategori sangat kurang. Kemudian ditahun 2019 DOFD mengalaih penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 7%. Pada tahun 2020 DOFD naik menjadi 8%, pada tahun 2021 kembali naik menjadi 10% dan ditahun 2022 DOFD Kabupaten Tapin menurun drastis hingga menyentuh angka 5%. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Tapin yang sebesar 7% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Tapin harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapin periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tapin, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Pendapatan	1.167.531	1.439.269	1.187.334	1.202.140	1.777.376	1.354.730,00
Pendapatan Asli Daerah	89.820	102.655	98.887	121.443	92.901	101.141,04
Persentase	8%	7%	8%	10%	5%	7%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,



baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018-2022 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14% per tahun. Fluktuasi ini tidak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang membuat kontribusi pendapatan asli daerah terkoreksi sebesar 2% yang naik drastis pada tahun 2021, akan tetapi saat tahun 2022 mengalami penurunan yang drastis pula. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami realokasi dan refocusing hingga mencapai angka sebesar 15%.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

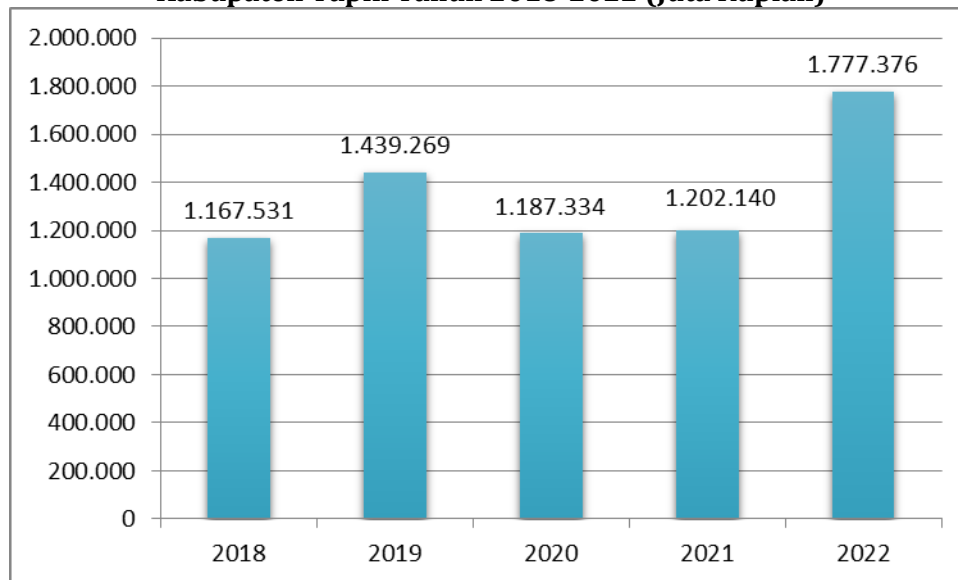
Pendapatan daerah Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata kenaikan sebesar





14% pertahun dari Rp. 1,16 triliun di tahun 2018 menjadi Rp. 1,77 Triliun di tahun 2022.

Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tapin terbaik pada tahun 2022. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 2% pertahun dari tahun 2018 sebesar Rp. 89 milyar, mengalami penurunan di tahun selanjutnya dan kembali naik menjadi Rp. 92 milyar ditahun 2022. Pendapatan transfer stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 15% pertahun dari Rp. 1,06 Triliun di tahun 2018 menjadi Rp 1,64 triliun di tahun 2022. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik hingga 64% pertahun dari Rp. 11 milyar ditahun 2018, meningkat hingga Rp 34 milyar di tahun 2022.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.



2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

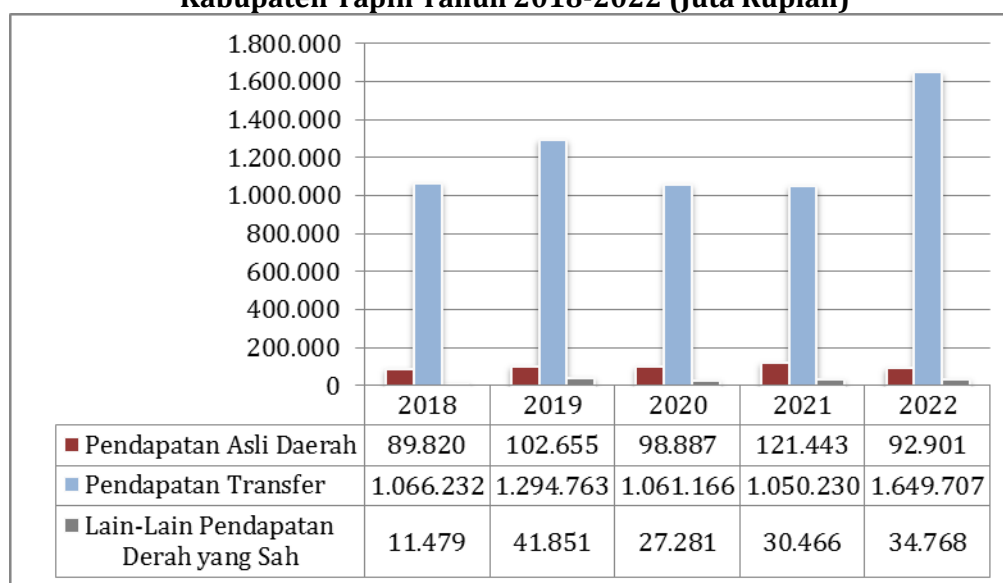
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kabupaten Tapin di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

Gambar III.2
Trend Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023(diolah)



Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Tapin berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu 2018-2022, PAD mengalami trend fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2%. Hal ini terjadi karena kurangnya optimalisasi kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta stimulus pengurangan pajak/retribusi. Untuk memperbaiki kondisi ini harus melalui penataan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari Kepala Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	1.167.531	1.439.269	1.187.334	1.202.140	1.777.376	14%
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,820	102,655	98,887	121,443	92.901	2%
1:01:01	Pendapatan Pajak Daerah	20,929	41,926	17,108	29,440	27.427	27%
1:01:02	Pendapatan Retribusi Daerah	3,120	2,672	2,594	2,337	4.003	11%
1:01:03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,987	2,424	3,698	4,701	5.180	8%
1:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59,783	55,633	75,487	84,965	56.290	2%
1:02	PENDAPATAN TRANSFER	1.066.232	1.294.763	1.061.166	1.050.230	1.649.707	15%
1:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	897,208	1,067,057	835,353	811,327	1.515.100	20%
	Dana Perimbangan	51,312	50,168	61,989	245,008	1.416.430	199%
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	866.890	
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	262,830	395,366	209,619	-	-	-32%
	Dana Alokasi Umum	448,697	477,467	421,845	416,700	414.513	-2%
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	134,368	144,055	141,901	149,619	72.575	-10%
	Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik					62.451	15%
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	8,000	35,303	50,002	165,850	98.670	5%
1.2.1.3.2	Dana Insentif Daerah	8,000	35,303	50,002	63,219	5.594	80%
	Dana Desa	-	-	-	102,630	93.076	2%
1.2.1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72,459	91,591	73,607	73,054	134.607	23%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72,459	91,591	73,607	73,054	134.607	23%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,479	41,851	27,281	30,466	34.768	64%
1:03:01	Pendapatan Hibah	5,237	36,700	27,281	9,110	9.882	129%
1:03:02	Pendapatan Lainnya	6,242	5,151	-	21,357	24.885	-34%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)





Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun belum maksimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

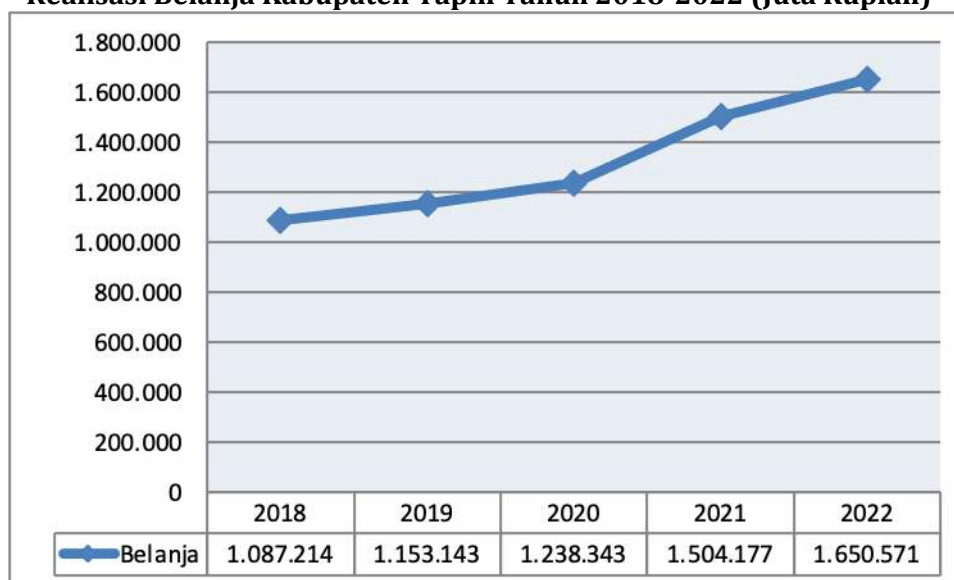
Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 11% per tahun dari Rp. 1,08 triliun di tahun 2018, pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan hingga menjadi Rp. 1,15 triliun naik kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,23 triliun mengalami kenaikan juga pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,50 triliun dan pada tahun 2022 menjadi 1,65 triliun. Fluktuasi belanja tersebut seirama dengan fluktuasi pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.



Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar III.3
Realisasi Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif dan cenderung stagnan dengan pertumbuhan 11%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing OPD.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Kenaikan belanja operasi dipengaruhi oleh adanya kenaikan merata pada komponen belanja operasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah serta belanja bantuan sosial yang pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan cukup. Untuk belanja pegawai mengalami kenaikan 3% pertahun dari tahun 2018 sebesar Rp. 397 milyar, tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 392 milyar, kemudian di tahun 2020 naik menjadi Rp. 405 milyar mengalami kenaikan untuk tahun-tahun selanjutnya



seperti pada tahun 2021 sebesar Rp. 422 milyar dan pada tahun 2022 sebesar Rp.448 milyar. Sedangkan belanja hibah yang tinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 63 milyar rupiah dan yang mengalami kenaikan pada tahun sebelum-sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 56 milyar. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2018-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 23%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapin tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	Belanja	1.087.214	1.153.143	1.238.343	1.504.177	1.650.571	11%
02.01	Belanja Operasi	726.153	730.768	742.762	871.900	987.440	8%
02.01.01	Belanja pegawai	397.359	392.899	405.398	422.171	448.970	3%
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	295.921	304.037	301.615	381.394	464.961	13%
02.01.03	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
	Belanja Bunga					7.579	167%
02.01.04	Belanja Hibah	29.481	30.139	25.070	63.673	56.698	32%
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.392	3.693	10.679	4.662	9.233	60%
02.02	Belanja Modal	212.593	245.315	314.885	442.234	483.954	23%
02.02.01	Belanja Modal Tanah	16.665	54.422	30.334	13.782	3.451	13%
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.938	36.811	38.558	54.642	71.669	31%
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.777	77.523	105.531	228.024	154.433	28%
02.02.04	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	83.241	70.978	119.935	143.323	252.794	38%
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.729	5.354	4.462	2.463	1.608	28%
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	243	227	9.846	-	-	1379%
02.02.07	Belanja Modal BLUD	-	-	5.945	-	-	-100%
02.02.08	Belanja Modal BOS	-	-	274	-	-	-100%
02.03	Belanja Tak Terduga	160	122	13.421	14.008	14.038	2717%
02.03.01	Belanja Tak Terduga	160	122	13.421	14.008	14.038	2717%
02.04	Transfer	148.308	176.939	167.275	176.035	165.138	41%
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.518	4.230	1.458	2.039	2.520	44%





RPD KABUPATEN TAPIN ²⁰²⁴ - 2026

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.309	3.998	1.298	1.806	2.270	51%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	209	232	160	234	250	8%
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	146.790	172.708	165.818	173.995	162.619	3%
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	146.273	171.651	164.725	102.630	162.619	9%
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	516	1.058	1.093	71.365	-	1610%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)





3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tapin selama kurun waktu tahun 2017-2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali piutang daerah serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tapin terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu 2018-2022, pembiayaan netto Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 221%. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.5
Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
3:01	Penerimaan Pembiayaan	13.806,82	94.162,63	379.182,28	436.777,76	168.118	210%
3:01:01	Penggunaan SILPA	12,893	93,109	379,157	326,836	132.793	214%
3:01:02	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	914	1.053	26	109.921	35.305	106744%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	20	20	0%
3:02	Pengeluaran Pembiayaan	1.014	1.132	-	-	12.856	-44%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	-	-	-	-	12.856	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.014	1.132	-	-	-	-44%
	PEMBIAYAAN NETTO	12.793	93.030	379.182	436.778	155.262	221%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023(diolah)



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.



Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	2.852	80.942	357.230	301.933	97.949
Kas di Bendahara Penerimaan	1	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	0	143
Kas di BLUD	7.909	9.771	14.005	20.518	32.694
Kas di Bendahara FKTP	1.648	1.741	1.268	917	550
Kas di Bendahara BOS	483	655	6.654	3.469	1.456
Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	-	-
Kas Lainnya	-	-	-	-	-
Setara Kas	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	16.984	19.265	58.698	97.894	61.847
Piutang Lainnya	24.481	43.044	38.449	27.851	826
Penyisihan Piutang	(9.948)	(12.332)	(14.611)	(15.330)	(16.855)
Beban Dibayar Dimuka	17	30	24	-	-
Persediaan	8.359	10.538	8.659	14.683	17.785
JUMLAH ASET LANCAR	52.785	153.654	470.375	451.934	196.396
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-	-



RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

Uraian	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	43	34	37	45	45
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	43	34	37	45	45
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	119.101	107.419	142.592	132.525	124.323
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	119.101	107.419	142.592	132.525	124.323
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	119.143	107.453	142.628	132.570	124.367
ASET TETAP	-	-	-	-	-
Tanah	340.574	358.094	415.592	446.957	459.532
Peralatan dan Mesin	240.717	258.141	287.838	337.821	384.302
Gedung dan Bangunan	716.306	877.866	962.666	1.050.524	1.115.184
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.348.394	1.434.383	1.511.834	1.634.351	1.809.026
Aset Tetap Lainnya	21.252	21.472	21.382	16.293	22.713
Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.142	63.344	53.327	72.713	251.790
Akumulasi Penyusutan	(1.105.529)	(1.306.533)	(1.534.502)	(1.729.599)	(1.957.757)
JUMLAH ASET TETAP	1.711.857	1.706.767	1.718.136	1.829.060	2.084.790
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	-	-	-	-	-
Tagihan Jangka Panjang	4.235	4.235	4.235	2.225	2.225
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	1.500	1.305	1.681	2.223	8.484
Aset Lain-lain	12.167	3.864	4.333	4.824	9.299
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	(5.965)	(6.728)



RPD KABUPATEN TAPIN ²⁰²⁴ - 2026

Uraian	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
JUMLAH ASET LAINNYA	17.902	9.405	10.250	9.272	13.280
JUMLAH ASET	1.901.687	1.977.278	-	-	-
KEWAJIBAN	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	322	209	162	179	181
Utang Beban	7.388	189	682	204	-
Utang Belanja	-	-	-	-	380
Utang Jangka Pendek Lainnya	12.009	3.587	2.973	4.419	58.889
Utang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	72.084	50.961	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.718	3.985	75.902	55.762	59.451
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	109.921
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	109.921
JUMLAH KEWAJIBAN	19.718	3.985	75.902	75.902	75.902
EKUITAS	-	-	-	-	-
EKUITAS	1.881.969	1.973.294	2.265.487	2.367.075	2.249.461
	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.901.687	1.977.278	2.341.389	2.341.389	2.341.389

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2022 (diolah)



4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tapin periode tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukan efisiensi siklus operasi. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2017-2021 fluktuatif setiap tahun dan berada antara angka 2,7 sampai dengan 38,6 sehingga kemampuan membayar hutang jangka cukup sampai dengan 0,00 pada tahun 2021 yang berarti rasionya semakin baik.

Berikut ini terlihat rasio lancar Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan):

Tabel III.7
Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	Rasio Lancar
1	2017	52.785	19.718	2,7
2	2018	153.654	3.985	38,6
3	2019	470.375	75.902	6,2
4	2020	451.934	55.762	8,1
5	2021	196.395,75	59.451	3,3

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2022 (diolah)

1. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah



dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)*

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tapin dari tahun 2017-2021 stabil tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio tahun 2017 yaitu sebesar 0,01 dan stagnan selama 2018. Tahun 2020 dengan angka 0,03 stabil 0,03 pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Tapin cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel III.8
Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 (dalam jutaan)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	19.718,44	3.984,76	75.901,69	75.901,69	75.901,69
EKUITAS	1.881.969,05	1.973.293,72	2.265.487,13	2.367.075,35	2.249.460,76
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,01	0,00	0,03	0,03	0,03

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)*

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.



Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tapin dari tahun 2017-2021 stabil hingga ditahun 2021 mencapai angka 0,03. Rasio terendah terjadi pada tahun 2018 mencapai 0,00. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2017-2021 pernah lebih dari 1% dari total aset yang ada, artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	19.718,44	3.984,76	75.901,69	75.901,69	75.901,69
AKTIVA	1.901.687,49	1.977.278,48	2.341.388,82	2.341.388,82	2.341.388,82
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,01	0,00	0,03	0,03	0,03

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2022 (diolah)

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan keuntungan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapin menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2017-2021 tren stabil. Adapun rasio di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 5,97%. Rasio pada tahun 2021 sebesar 5,83%. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.



Tabel III.10

Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	84.869,52	89.819,70	102.654,66	98.887,17	121.443,14
AKTIVA TETAP	1.711.856,79	1.706.766,79	1.718.135,83	1.829.060,35	2.084.789,59
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	4,96%	5,26%	5,97%	5,41%	5,83%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2022 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2017-2021 relatif stabil. Rasio ditahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 4,46% sampai dengan 5,19%. Secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapin mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III.11

Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	84.869,52	89.819,70	102.654,66	98.887,17	121.443,14
TOTAL AKTIVA	1.901.687,49	1.977.278,48	2.341.388,82	2.341.388,82	2.341.388,82
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	4,46%	4,54%	4,38%	4,22%	5,19%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2022 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik



untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapin 2018-2022 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 32% pertahun. Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2018 sebesar 37% dari total pengeluaran daerah dan proporsinya relatif stabil sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 27%.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2018	397.359	1.088.228	37%
2	2019	392.899	1.154.275	34%
3	2020	405.398	1.238.343	33%
4	2021	422.171	1.504.177	28%
5	2022	448.970	1.663.427	27%
Rata-rata		413.359	1.329.690	32%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2018-2022 cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 4% pertahun dari Rp. 546 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 628 milyar ditahun 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya belanja tak terduga pada tahun 2020,2021 dan 2022. Belanja transfer pos belanja bagi hasil hanya tercatat mengalami rata-rata pertumbuhan 57%. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.13

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	546.841	571.092	586.094	612.214	641.002	4%
Belanja Operasi	397.359	392.899	405.398	422.171	448.970	2%
Belanja pegawai	397.359	392.899	405.398	422.171	448.970	2%
Belanja Tak Terduga	160	122	13.421	14.008	14.038	3622%
Belanja Tak Terduga	160	122	13.421	14.008	14.038	3622%
Transfer	148.308	176.939	167.275	176.035	165.138	57%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.518	4.230	1.458	2.039	2.520	51%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.309	3.998	1.298	1.806	2.270	59%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	209	232	160	234	250	9%
Transfer Bantuan Keuangan	146.790	172.708	165.818	173.995	162.619	6%
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	146.273	171.651	164.725	102.630	162.619	-8%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	516	1.058	1.093	71.365	-	2180%
Pengeluaran Pembiayaan	1.014	1.132	-	-	12.856	-44%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	-	-	-	-	12.856	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.014	1.132	-	-	-	-44%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)





3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022) perkembangan defisit riil anggaran relatif fluktuatif cenderung meningkat namun positif. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 93 milyar, sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 379 milyar. Tahun 2020 juga mengalami defisit sebesar Rp. 328 milyar dan tahun 2021 juga defisit sebesar Rp. 134 milyar. Tahun 2022 mengalami surplus kembali sampai mencapai Rp 282 milyar. Secara lengkap berikut disajikan surplus/defisit anggaran Kabupaten Tapin tahun 2018-2022 .

Tabel III.14
Surplus/Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.167.531	1.439.269	1.187.334	1.202.140	1.777.376
2	Penerimaan Pembiayaan	13.807	94.163	379.182	436.778	168.118
	Dikurangi realisasi					
3	Belanja Daerah	1.087.214	1.153.143	1.238.343	1.504.177	1.650.571
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.014	1.132	0	0	12.856
	Surplus/Defisit riil	93.109	379.157	328.174	134.741	282.066

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	12.893	93.109	379.157	326.836	132.793
Penerimaan Kembali Piutang	914	1.053	26	109.921	35.305
Total Komposisi Penutup Defisit	13.807	94.163	379.182	436.757	168.097

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)



Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	93%	99%	100%	75%	79%
Penerimaan Kembali Piutang	7%	1%	0%	25%	21%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapin dari tahun 2017-2021 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Penggunaan SiLPA dan penerimaan kembali piutang daerah. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Penerimaan Pembiayaan	13.807	100%	94.163	100%	379.182	100%	436.757	100%	168.097	100%
Penggunaan SILPA	12.893	93%	93.109	99%	379.157	100%	326.836	75%	132.793	79%
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	914	7%	1.053	1%	26	0%	109.921	25%	35.305	21%

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 maupun untuk prioritas lainnya.



Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2023 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Tapin tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Tapin. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan





- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapin ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 hingga 2022 yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan tahun 2022 dan RAPBD Tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN. Kondisi perekonomian Kabupaten Tapin di tahun 2023-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Kalimantan dan Nasional.

a. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah Kabupaten Tapin berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapin masih bertumpu pada dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan lokal secara umum ditahun 2023 mulai membaik maka beberapa komponen PAD yang ditahun 2021 mangalami penurunan yaitu pendapatan retribusi daerah, maka ditahun 2023 komponen ini ditargetkan nilainya membaik. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai hilang. Adapun proyeksi tahun 2024-2026 secara umum menggunakan tahun dasar proyeksi pada RKPD tahun 2023.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2023-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didongkrak oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri



dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar 0% sampai dengan 10%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 100 milyar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 125 milyar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjarangan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut.

Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kabupaten Tapin yang diperkirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2023 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2022. Pada awal tahun 2023 diharapkan target vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin Booster terpenuhi sehingga telah tercapai *herd immunity*. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sampai dengan 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka di atasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.

Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

- 1) Dana Perimbangan;





2) Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan nilainya turun dari tahun 2022 menjadi 1,17 triliun pada tahun 2023 dan ditargetkan mencapai Rp. 1,43 triliun pada tahun 2026; dan

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah hanya diproyeksikan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 6 milyar terdiri dari pendapatan lainnya. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 (dalam jutaan)

No	Uraian	REALISASI 2022	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi (Juta Rupiah)			
				2023 (APBD)	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1.777.376	6%	1.396.770	1.412.339	1.539.747	1.679.771
1:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.901	7%	100.982	108.361	116.424	125.222
1:01:01	Pendapatan Pajak Daerah	27.427	8%	20.595	22.243	24.022	25.944
1:01:02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.003	8%	4.652	5.025	5.427	5.861
1:01:03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.180	2%	10.000	10.100	10.302	10.611
1:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.290	8%	65.735	70.994	76.673	82.807
1:02	PENDAPATAN TRANSFER	1.649.707	7%	1.289.005	1.303.978	1.423.323	1.554.548
1:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.515.100	7%	1.173.243	1.187.637	1.306.401	1.437.041
	Dana Perimbangan	1.416.430	10%	1.079.670	1.187.637	1.306.401	1.437.041
	Bagi Hasil Pajak	134.607					
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-		-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	414.513		-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.575		-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik	62.451					
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	98.670		93,573	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Insentif Daerah	5.594		-	-	-	-
	Dana Desa	93.076		93.573	-	-	-
1.2.1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.607	0%	115.762	116.341	116.923	117.507
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.607	0%	115.762	116.341	116.923	117.507
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-		-	-	-	-
1:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.768		6.783	-	-	-
	Pendapatan Hibah	9.882					
1:03:02	Pendapatan Lainnya	24.885		6.783	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2022 (diolah)



Seperti yang terlihat pada tabel III.17 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
- c. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- e. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- f. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
- g. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- h. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- i. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
- j. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;dan
- k. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Tapin akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD; dan



- b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin.
- 6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapin, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Tapin dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapin. Pada tahun Anggaran 2023 anggaran belanja daerah Kabupaten Tapin diproyeksikan sebesar Rp 1,658 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1,067 triliun, belanja modal sebesar Rp 374 milyar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 20 milyar. Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran belanja daerah Kabupaten Tapin diproyeksikan mengalami sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya mengikuti proyeksi pendapatan dengan hitungan pesimis, tetapi pada tahun 2025 sampai dengan 2026 belanja Kabupaten Tapin diproyeksikan kembali naik dengan rata-rata kenaikan maksimal 8% di mana pada tahun 2026 belanja operasi menjadi sebesar Rp 1,231 triliun, belanja modal sebesar Rp 337 milyar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 25 milyar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1,740 triliun. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.18 di bawah ini.



Tabel III.19
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
				2023 (APBD)	2024	2025	2026
2	Belanja	1.650.571	2%	1.658.526	1.462.026	1.592.837	1.740.772
02.01	Belanja Operasi	987.440	5%	1.067.178	1.002.835	1.109.002	1.231.087
02.01.01	Belanja pegawai	448.970	0%	485.782	486.000	485.850	486.000
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	464.961	13%	499.627	476.835	586.652	707.087
02.01.03	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-
	Belanja Bunga	7.579		5.000	5.000	-	-
02.01.04	Belanja Hibah	56.698	-19%	64.278	25.000	25.500	26.000
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.233	0%	12.492	10.000	11.000	12.000
02.02	Belanja Modal	483.954	-3%	374.672	312.700	325.250	337.800
02.02.01	Belanja Modal Tanah	3.451	-7%	11.500	5.000	6.000	7.000
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.669	-8%	30.664	20.000	21.000	22.000
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.433	-10%	96.437	50.000	55.000	60.000
02.02.04	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	252.794	2%	231.249	235.000	240.000	245.000
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.608	-2%	4.407	2.500	3.000	3.500
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		-2%	416	200	250	300
02.02.07	Belanja Modal BLUD	-		-	-	-	-
02.02.08	Belanja Modal BOS	-		-	-	-	-
02.03	Belanja Tak Terduga	14.038	8%	20.200	25.000	25.000	25.000
02.03.01	Belanja Tak Terduga	14.038	8%	20.200	25.000	25.000	25.000
02.04	Transfer	165.138	-6%	196.475	121.490	133.585	146.885
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.520	8%	2.525	2.727	2.945	3.180
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.270	8%	2.525	2.727	2.945	3.180
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	250		-	-	-	-



RPD KABUPATEN TAPIN ²⁰²⁴ - 2026

No	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
				2023 (APBD)	2024	2025	2026
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	162.619	-6%	193.950	118.764	130.640	143.704
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-6%	193.950	118.764	130.640	143.704
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	162.619		-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-		-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023(diolah)



Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2023-2026, meliputi:

- 1) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 2) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 3) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 4) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 5) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 6) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 0,01$ % pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 0,01% bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.



Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Kabupaten Tapin masih perlu mengalokasikan Belanja Tak Terduga sebagai antisipasi kondisi ekonomi yang diisukan akan terjadi resesi pada tahun 2023 dan berakibat pada kondisi ekonomi pada tahun 2024-2026. Belanja transfer masih diprioritaskan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Setelah itu, belanja transfer digunakan untuk mewujudkan infrastruktur desa yang tidak menjadi kewenangan kabupaten. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Tapin tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini,



Tabel III.20

Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi (Juta Rupiah)			
				2023 (APBD)	2024	2025	2026
2	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	641.002	-3,02%	800.614	727.703	646.435	659.885
02.01	Belanja Operasi	448.970	0,01%	485.782	486.000	485.850	486.000
02.01.01	Belanja pegawai	448.970	0,01%	485.782	486.000	485.850	486.000
02.03	Belanja Tak Terduga	14.038	7,92%	20.200	25.000	25.000	25.000
02.03.01	Belanja Tak Terduga	14.038	7,92%	20.200	25.000	25.000	25.000
02.04	Transfer	165.138	-6,08%	196.475	121.490	133.585	146.885
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.520	8,00%	2.525	2.727	2.945	3.180
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.270	8,00%	2.525	2.727	2.945	3.180
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	250		-	-	-	-
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	162.619	-6,26%	193.950	118.764	130.640	143.704
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-6,26%	193.950	118.764	130.640	143.704
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	162.619	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	12.856	949,84%	98.158	95.213	2.000	2.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-		10.000	23.000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-40,83%	16.000	10.000	1.500	1.500
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	12.856		70.658	61.713	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-22,22%	1.500	500	500	500

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)



3.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapin tahun 2023-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 0 milyar, namun pada tahun 2024 diproyeksikan menjadi Rp. 249 milyar naik sebesar 50% dari realisasi tahun 2022 dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tapin tahun 2022-2026 antara lain dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
- c. Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel III.21
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi (Juta Rupiah)			
		2022		2023 (APBD)	2024	2025	2026
03.01	Penerimaan Pembiayaan	168.118	5496%	1.500	250.300	125.441	63.001
03.01.01	Penggunaan SILPA	132.793	-50%	-	249.800	124.941	62.501
03.01.02	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	35.305	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20	-22%	1.500	500	500	500
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	12.856	950%	98.158	95.213	2.000	2.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	15%	10.000	23.000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-41%	16.000	10.000	1.500	1.500
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	12.856	-56%	70.658	61.713	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-22%	1.500	500	500	500
	PEMBIAYAAN NETTO	155.262	-126%	(96.658)	155.088	123.441	61.001

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)



3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Tapin dari tahun 2023 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel III.22
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
 Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.777.376	1.396.770	1.412.339	1.539.747	1.679.771
2	Penerimaan Pembiayaan	168.118	1.500	250.300	125.441	63.001
	(Dikurangi):					
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	641.002	800.614	727.703	646.435	659.885
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.304.491	597.656	934.436	1.018.253	1.082.887

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)



Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/ subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.23
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Tapin
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.777.376	1.396.770	1.412.339	1.539.747	1.679.771
2	Penerimaan Pembiayaan	168.118	1.500	250.300	125.441	63.001
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.945.493	1.398.270	1.662.639	1.665.188	1.742.772

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin yang dirumuskan, akan memberikan jalan bagi Penjabat kepala daerah dalam melanjutkan tonggak penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Selanjutnya, kebijakan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah nantinya harus didasari berbagai permasalahan dan isu strategi pembangunan yang relevan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab problematika pelaksanaan pembangunan selama ini.

Perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin pada periode pembangunan berkenaan.

Isu-isu strategis baik berskala lokal, regional, nasional, maupun internasional merupakan suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.



Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan periode pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

4. 1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD/RPD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan empat tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran **Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, yakni: “Belum Optimalnya Pembangunan Tapin yang Religius dan Sejahtera”**.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapin tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:



1. Belum optimalnya kualitas SDM;
2. Belum optimalnya kemandirian perekonomian;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan; dan
5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV.1.
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026





Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Tapin berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

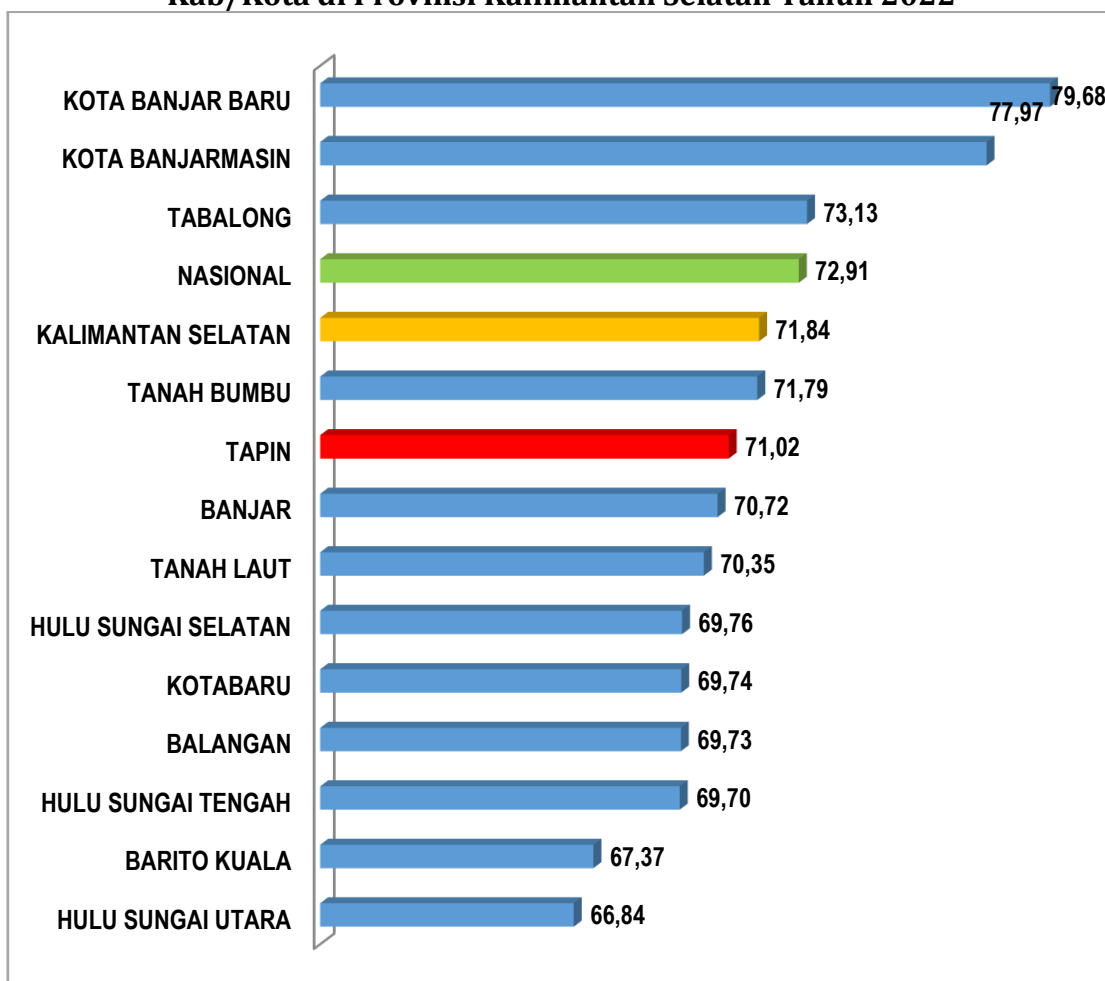
1. Belum Optimalnya Kualitas SDM

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin (71,02) berada di bawah capaian beberapa kabupaten/kota yang lain. IPM Kabupaten Tapin juga masih berada di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan (71,84), di level kabupaten angka IPM Kabupaten Tapin berada di bawah Kabupaten Tabalong (73,13) dan Kabupaten Tanah Bumbu (71,79). Baik angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun angka IPM Tapin, masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 72,91.



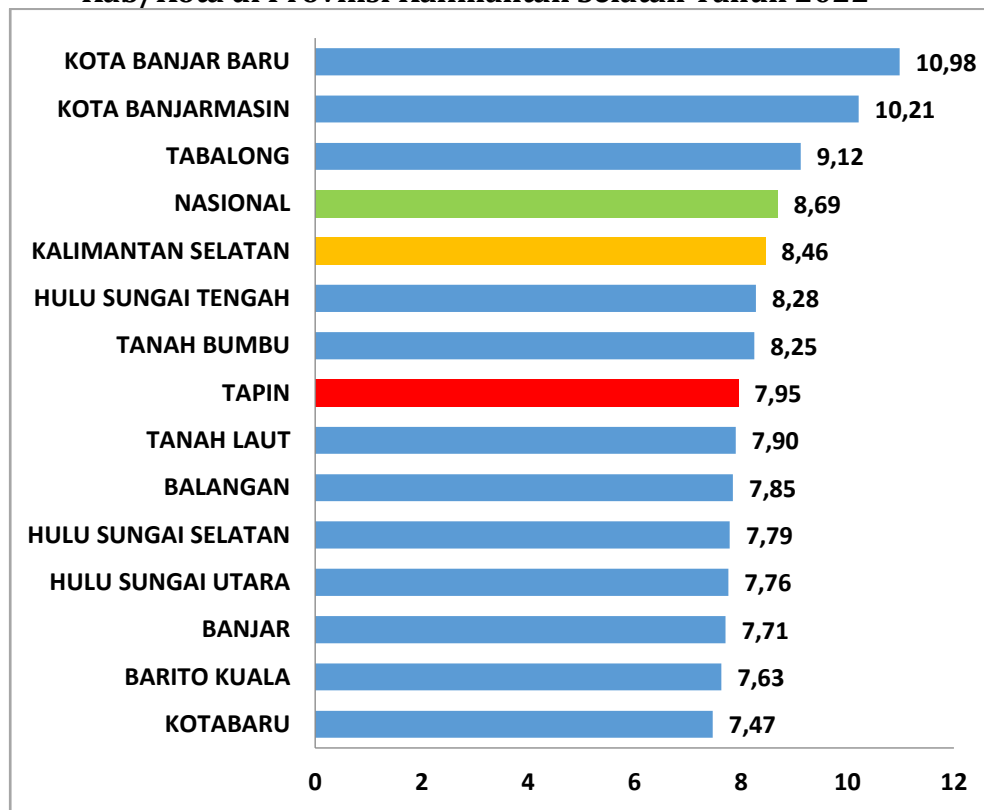
Gambar IV.2.
Indeks Pembangunan Manusia
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022



Gambar IV.3.
Rata-rata Lama Sekolah
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022

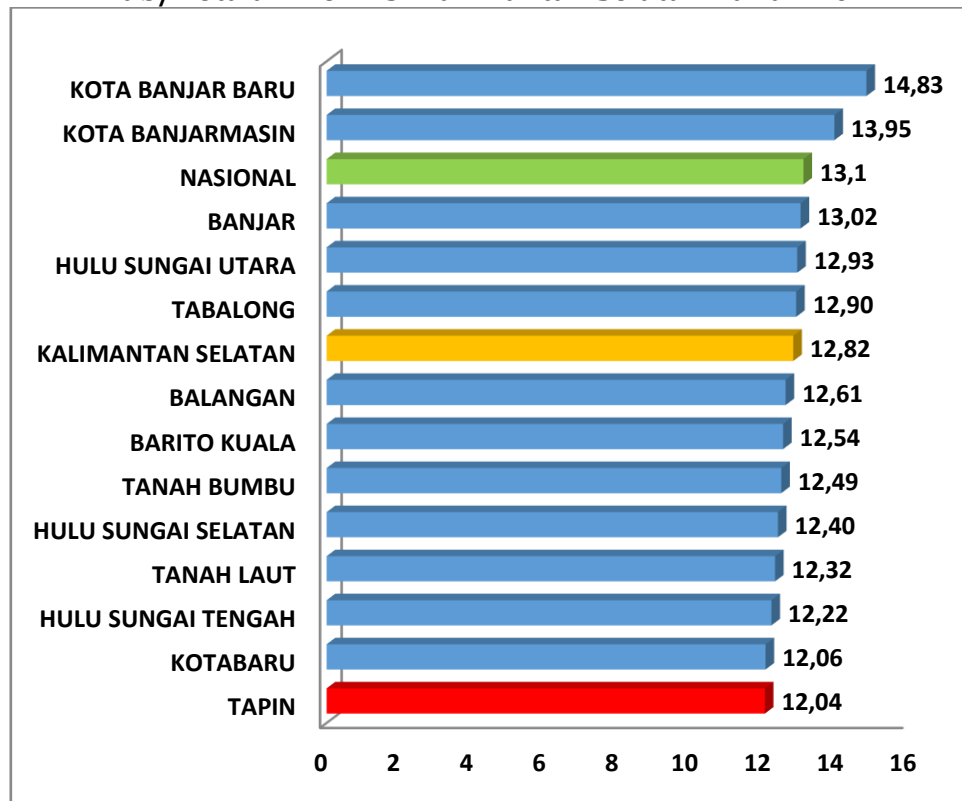
Dari aspek pendidikan, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin memiliki pola capaian yang hampir sama jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Capaian rata-rata lama sekolah Tapin sebesar 7,95 tahun masih belum setinggi Provinsi Kalimantan Selatan (8,46 tahun) serta jauh di bawah Kota Banjarbaru yang mencapai posisi tertinggi dengan capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 10,98 tahun. Angka Nasional (8,69 tahun) juga melebihi dari angka Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin.

Untuk capaian harapan lama sekolah juga memiliki pola yang sama dimana capaiannya masih lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan (12,82 tahun), terlebih angka nasional yang mencapai 13,10 tahun. Selain itu, pada tahun 2022 Kabupaten Tapin menempati posisi terendah dibandingkan seluruh wilayah di Kalimantan Selatan dengan capaian angka harapan lama sekolah sebesar 12,04 tahun. Masih minimnya pelayanan pendidikan seperti kapasitas tenaga pendidik kependidikan, keterbatasan biaya masyarakat miskin dalam menempuh pendidikan, fasilitas penunjang



pendidikan yang belum optimal, hingga aksesibilitas fasilitas pendidikan menjadikan permasalahan pendidikan perlu dirumuskan secara terinci.

Gambar IV.4.
Harapan Lama Sekolah
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

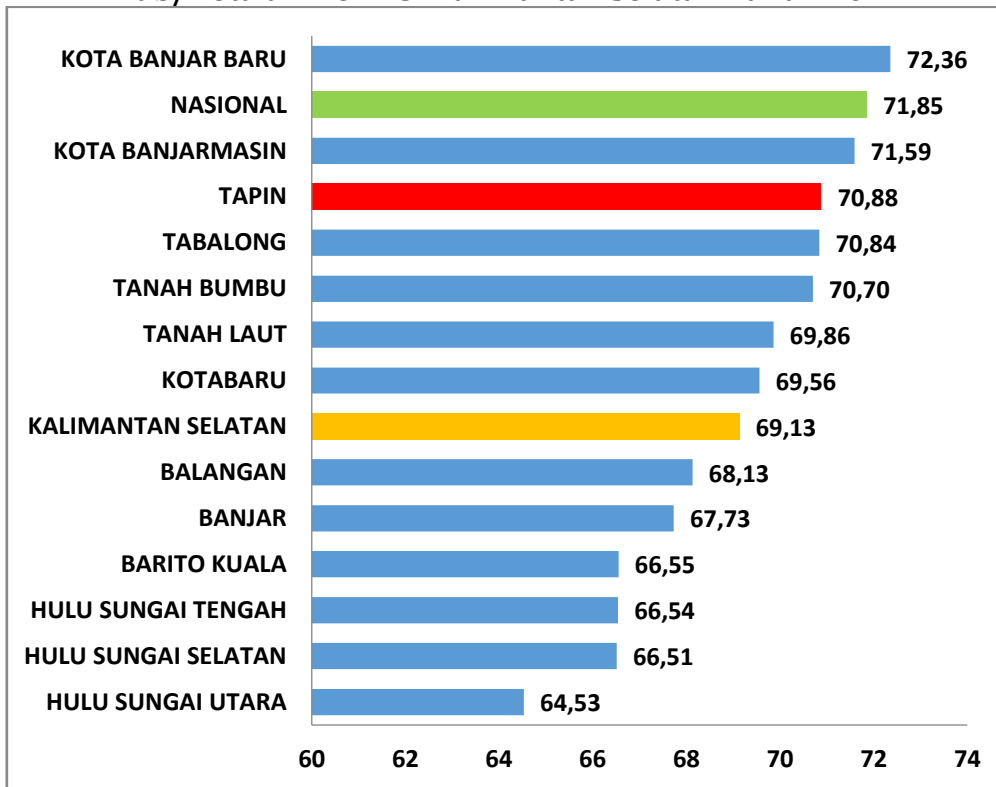


Sumber: BPS, Tahun 2022

Dari komponen kesehatan, terlihat bahwa angka harapan hidup Tapin relatif tinggi dengan capaian 71,01 tahun, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan (69,13 tahun) dan berada di peringkat ketiga di bawah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Namun capaian ini juga masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 71,85 tahun. Meskipun begitu, kondisi ini menjadikan posisi derajat kesehatan masyarakat Tapin menjadi salah satu unggulan dalam fokus pelaksanaan pembangunan ke depan. Dari sisi lain, masih terdapat beberapa kondisi terkait kesehatan masyarakat seperti semakin meningkatnya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, belum optimalnya layanan kesehatan, hingga kurangnya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tapin.



Gambar IV.5.
Angka Harapan Hidup
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



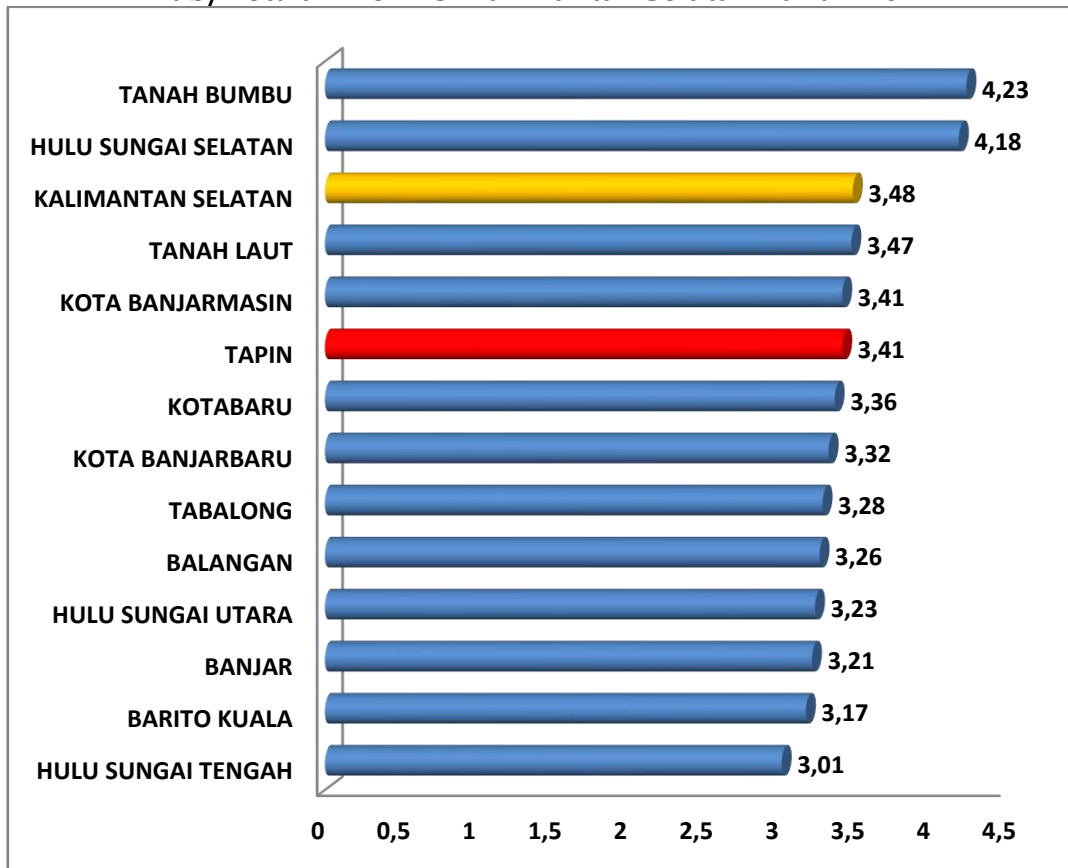
Sumber: BPS, Tahun 2022

2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah, terkhusus dalam mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat.



Gambar IV.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021



Sumber: BPS, Tahun 2021

Fase menuju endemi Covid-19 memperlihatkan pola pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tapin belum sepenuhnya pulih seperti semula, meskipun telah menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,41% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan belum seluruhnya sektor lapangan usaha telah pulih dengan masih adanya pertumbuhan sektoral yang mengalami kontraksi pertumbuhan.

Sektor yang dominan pada perekonomian daerah sekaligus potensial dalam pembangunan perekonomian Tapin seperti sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 28,45 persen, Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 18,93 persen. Sedangkan sektor dominan lain yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi sebesar 10,63 persen, sektor non dominan yang berhasil tumbuh tertinggi adalah sektor Industri Pengolahan dan Administrasi Pemerintahan, hal ini terjadi mengingat pandemi covid-19 yang berangsur pulih sehingga kegiatan di sektor formal maupun informal mulai menunjukkan pemulihan.



3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman sumber daya, termasuk sumber daya mineral, maka Kabupaten Tapin memiliki potensi dalam penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini tentu saja menjadi salah satu fokus utama dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup bahkan meningkatkannya. Berbagai kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi, telah membuktikan adanya degradasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam menjaga keberlangsungan generasi masa mendatang, perlu adanya berbagai kebijakan yang merujuk pada ketercapaian pembangunan berwawasan lingkungan dan memperketat dalam pengawasan dan perijinan berbagai usaha yang berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan di Tapin.

4. Belum Optimalnya Pemerataan pembangunan

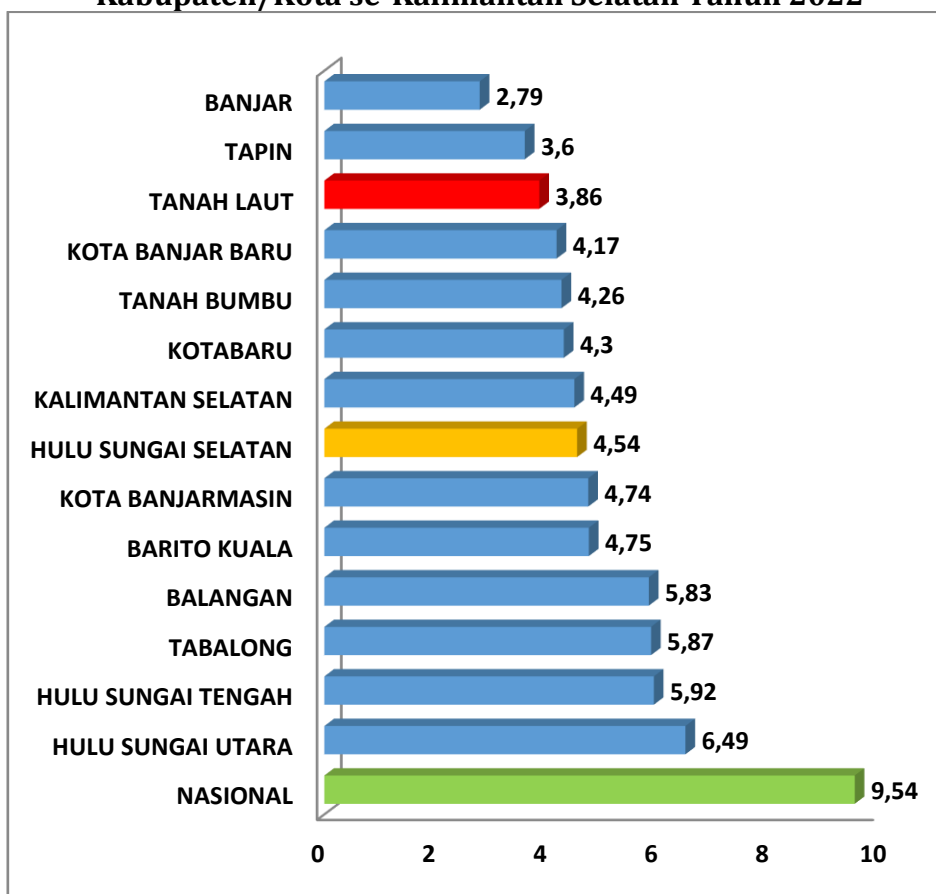
Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Terkait hal tersebut, terlihat bahwa angka kemiskinan di Tapin cukup baik dimana pada tahun 2022 mencapai 3,60 persen dan lebih baik dibandingkan angka Kalimantan Selatan yang mencapai 4,49 persen. Baik angka kemiskinan Tapin maupun Kalimantan Selatan, juga jauh berada di bawah angka Nasional yang mencapai 9,54 persen.

Adapun kesenjangan kesejahteraan di Kabupaten Tapin masih harus diturunkan dimana angka gini rasio Tapin tahun 2022 mencapai 0,291 meskipun berada di posisi yang lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerataan pembangunan daerah dapat ditingkatkan dengan mewujudkan infrastruktur konektivitas yang lebih baik serta memberikan kesempatan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk berkembang baik dari segi pendidikan maupun kesehatan.



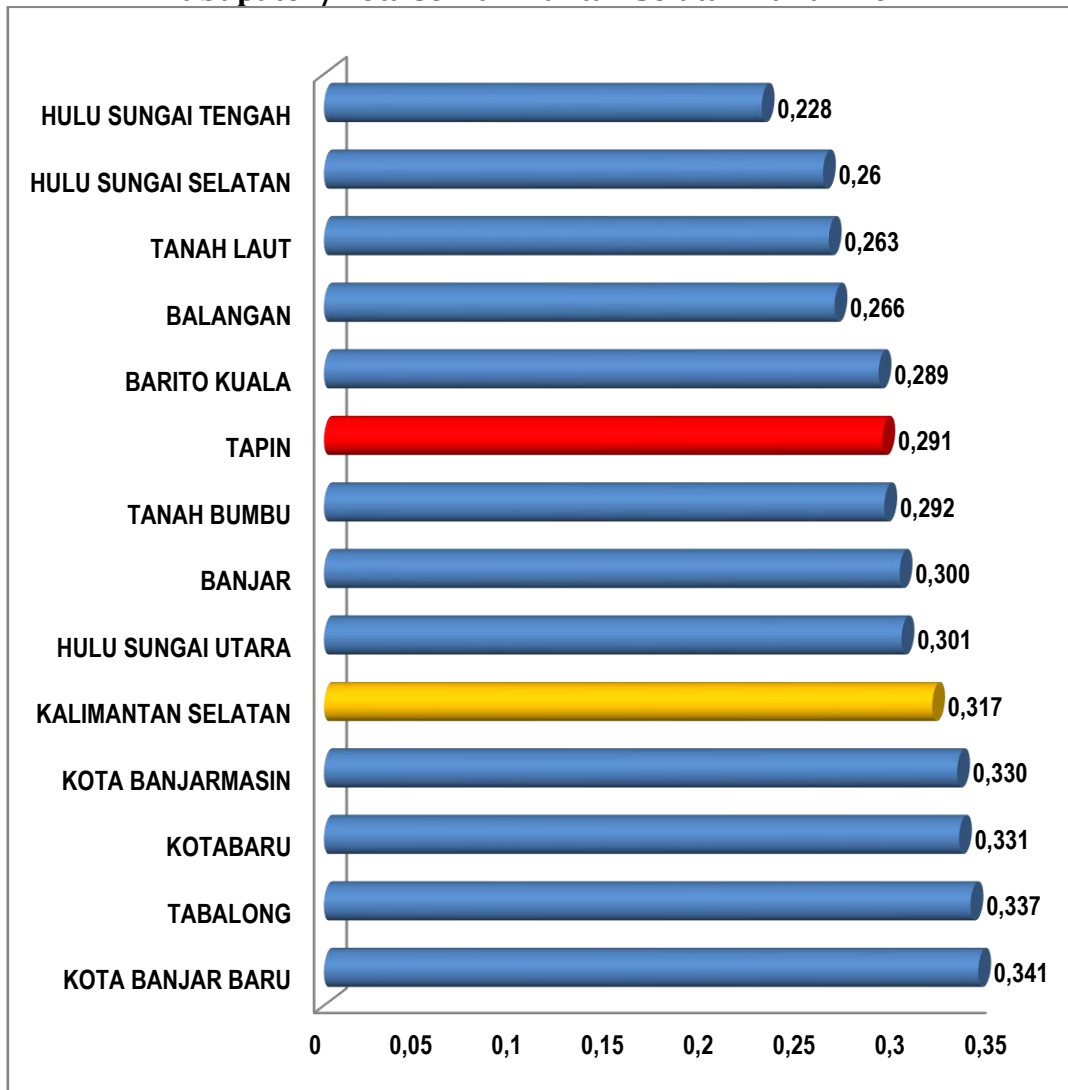
Gambar IV.7.
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022



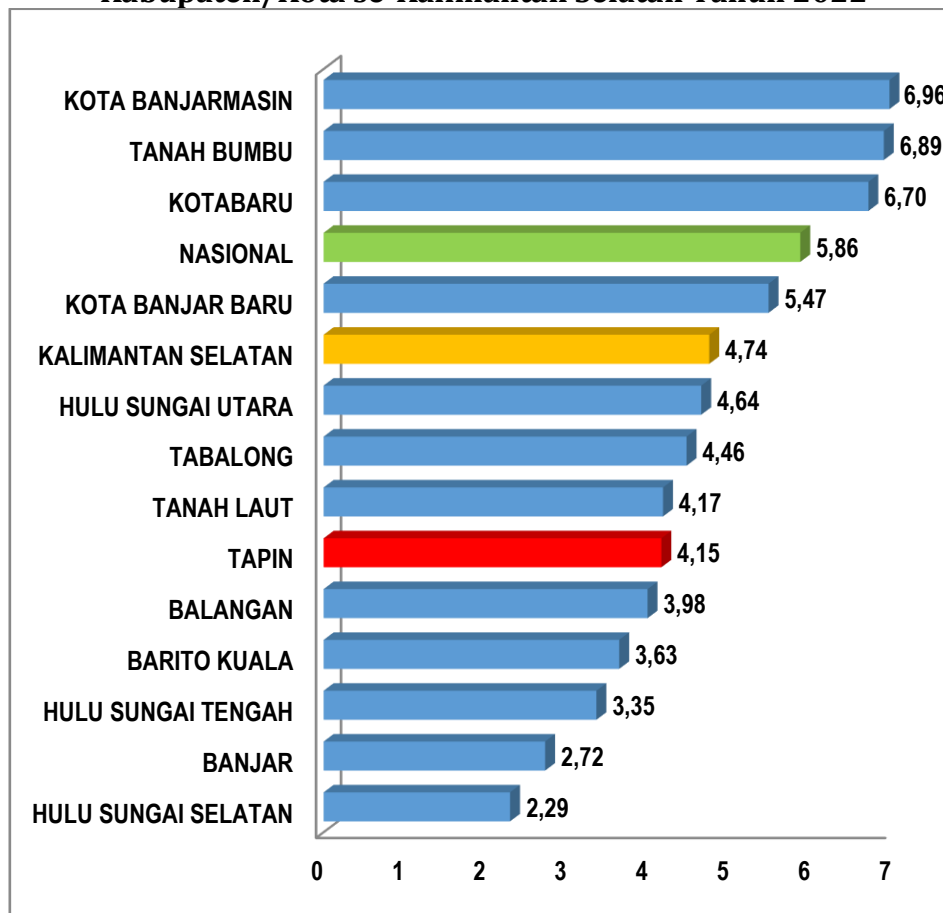
Gambar IV.8
Indeks Gini
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022



Gambar. IV.9.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022

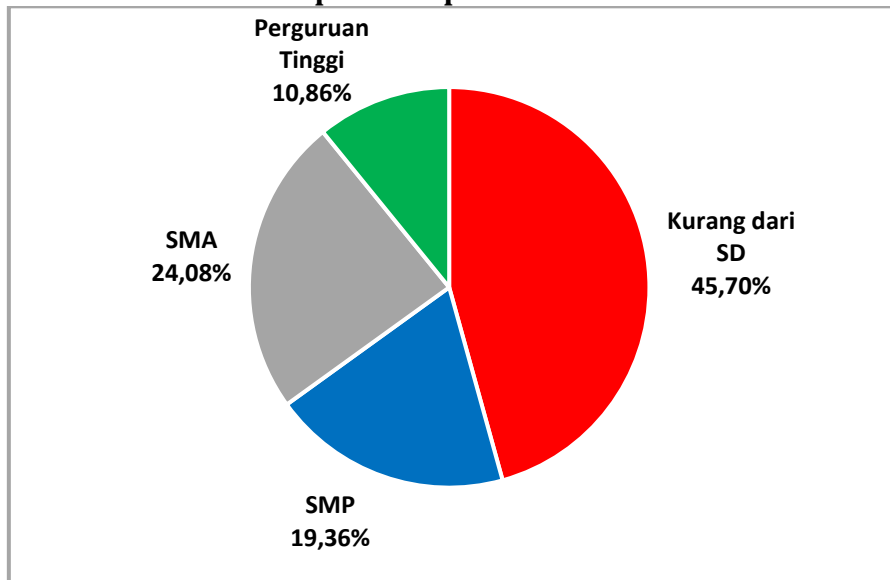
Dari sisi ketenagakerjaan, Pandemi COVID-19 cukup memberikan pengaruh pada peningkatan pengangguran pada Tahun 2022 Tapin memiliki tingkat pengangguran sebesar 4,15 persen, di bawah angka pengangguran provinsi sebesar 4,74 provinsi. Baik angka Tapin maupun Kalimantan Selatan, masih lebih baik dari sisi tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan angka Nasional yang mencapai 5,86 persen.

Dari sisi kompetensi tenaga kerja, maka terlihat dari gambar berikut bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tapin masih cukup jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari tenaga kerja yang memiliki pendidikan lulus SD atau tidak lulus (termasuk tidak sekolah) mencapai 45,70 persen dan mendominasi tenaga kerja dari segi pendidikan. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat perhatian dari stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Tapin sehingga mampu berkompetisi di dunia kerja yang lebih baik. Sedangkan tenaga kerja yang sudah memiliki



pendidikan yang cukup yakni lulusan SMA sebanyak 24,08 persen dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 10,86 persen.

Gambar IV.10.
Kompetensi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tapin Tahun 2021



Sumber: BPS, Tahun 2022

5. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam mengupayakan pembangunan yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, maka dibutuhkan beberapa prinsip dasar yang dilaksanakan dalam pemerintahan yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Mencermati pelaksanaan "tata kelola pemerintahan yang baik" di Kabupaten Tapin, selama ini mengalami beberapa kendala diantaranya belum mapannya budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan kota, belum baiknya kualitas laporan kinerja perangkat daerah yang mampu menggambarkan analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja secara komperhensif. dan belum jelasnya penjenjangan kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kota.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 mencapai 53,94 meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, beberapa catatan dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi Kabupaten Tapin masih terlihat. Beberapa faktor utama terhambatnya pencapaian reformasi birokrasi, antara lain: pelaksanaan reformasi yang belum merata pada tingkat instansi pemerintahan, tata kelola SDM Aparatur yang belum secara keseluruhan menerapkan prinsip merit,



rendahnya kebijakan pengawasan internal dan integritas, serta penilaian kepuasan masyarakat yang terhadap layanan publik yang belum dilakukan secara berkala dan komprehensif.

Pada sisi pencapaian Nilai SAKIP, dari Tahun 2020 hingga Tahun 2021 Kabupaten Tapin mengalami trend kenaikan. Keberhasilan peningkatan terjadi dikarenakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, namun disisi lain masih terdapat beberapa kendala yang perlu diantisipasi, diantaranya penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja belum berorientasi pada hasil dan belum relevan sesuai dengan level jabatannya terutama pada level perangkat daerah. Selain itu, yang menjadi perhatian adalah keselarasan antar dokumen strategis pada level daerah maupun perangkat daerah dengan diikuti penjejaran kinerja yang belum terlaksana secara menyeluruh pada perangkat daerah di Kabupaten Tapin.

Jika dilihat dari poin-poin komponen penyusun nilai SAKIP, maka nilai SAKIP Kabupaten Tapin yang mencapai 69,69, secara menyeluruh belum memiliki nilai komponen yang memadai. Hal ini terlihat dari masih tingginya gap antara nilai komponen dengan bobot komponen. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Tapin sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, pencapaian indikator kinerja pencapaian SPM juga belum optimal dimana masih banyak realisasi SPM di bawah target nasional.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Tapin.



Tabel IV.1
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya kualitas SDM	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
	Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Belum optimalnya kemandirian perekonomian	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
Belum optimalnya pemerataan pembangunan	Belum optimalnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak
	Masih adanya potensi ketimpangan kesejahteraan masyarakat
	Belum optimalnya daya saing angkatan kerja lokal
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan manajemen kinerja pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya pencapaian SPM
	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Adapun tiap permasalahan pembangunan dijabarkan dalam permasalahan tiap urusan yang merupakan kewenangan pemerintahan Kabupaten Tapin sebagai deteksi awal dalam penyusunan kebijakan di setiap urusan pembangunan. Berikut permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin menurut urusan pemerintahan.



Tabel IV.2
Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana Belum optimalnya partisipasi sekolah masyarakat Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan bayi Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW
4	Perumahan dan Pemukiman	Penanganan pemukiman kumuh belum optimal Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan Belum optimalnya wawasan masyarakat terkait kebangsaan dan politik Belum optimalnya ketahanan kebencanaan
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja) Meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan usaha yang berkualitas
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah Minimnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
9	Pangan	Belum optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
10	Pertanahan	Belum optimalnya pengadministrasian hak atas tanah
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan desa
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
		Adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor komunikasi dan informasi
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Kurangnya daya saing KUMKM, khususnya sektor unggulan
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi
		Belum optimalnya layanan perizinan penanaman modal
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
20	Statistik	Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas
		Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
23	Perpustakaan	Kurangnya tenaga ahli dan terampil perpustakaan (pustakawan, tenaga teknis dan penilai)
		Keterbatasan koleksi buku perpustakaan yang berkualitas
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Minimnya ketersediaan sumber daya arsiparis
C. URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
		Belum optimalnya promosi wisata Tapin
		Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan
		Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola sektor pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya fasilitas pemerintah daerah dalam peningkatan pembinaan IKM
D. URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah
31	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
		Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD
33	Kepegawaian	Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Masih minimnya ASN yang memiliki kompetensi sebagai APIP
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya pelayanan terhadap aktivitas dewan

4. 2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang



tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Tapin adalah belum berakhirnya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh wilayah nasional yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona merupakan virus yang tipikal dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal Maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-19. Selain isu strategis Pandemi



COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Tapin seperti:

a. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals (MDGs)* sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan *MDGs* adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Perbedaan yang terlihat jelas antara *MDGs* dan *SDGs* adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada *SDGs*. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program *MDGs* berjalan.

Konsep *SDGs* ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-*MDGs*. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan *SDGs* yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep *SDGs*, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;



- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Kinerja perekonomian global mengalami koreksi yang cukup tajam dikarenakan Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan hingga hanya menjadi 2,90% pada Tahun 2019. Seiring dengan kondisi pengendalian pandemi yang semakin membaik dan mobilitas kegiatan ekonomi masyarakat yang



meningkat, secara perlahan kinerja perekonomian juga menunjukkan perbaikan, pada Tahun 2021 ekonomi berhasil tumbuh hingga 5,7%. Pertumbuhan positif tersebut diprediksi tidak berlangsung lama, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan dalam laporan *Global Economic Prospect June 2022 (GEP)* menjadi 2,9% di Tahun 2022, akibat eskalasi berbagai risiko. Langkah ini juga dilakukan oleh *International Monetary Fund (IMF)* yang melandaikan proyeksi ekonomi menjadi 3,2% pada Juli 2022 dari sebelumnya di Bulan April diprediksi 3,6%.

Ekskalasi perlambatan pertumbuhan ekonomi diakibatkan memanasnya beberapa isu global yang mempengaruhi rantai pasok dunia. Perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia mempengaruhi geopolitik global yang memicu penguatan tekanan persistensi inflasi global. Fenomena tersebut direspon oleh berbagai negara maju yang melakukan pengendalian inflasi melalui pengetatan kebijakan moneter yang responsive dan progresif. Hal lain yang berpotensi memperparah keadaan, dengan penciptaan pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan biaya pinjaman (*cost of fund*). Kondisi ini memberikan kesimpulan bahwa pemulihan ekonomi global akan selalu dibayangi oleh berbagai tantangan besar.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia terjadi secara luas di berbagai negara, baik kelompok negara maju maupun berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah sebanyak 1,7 poin (dari 4,2% menjadi 2,5%), dengan pertumbuhan Rusia diproyeksi akan mengalami kontraksi 8,9% atau turun sangat dalam 11,3 poin dari prediksi sebelumnya. Dua perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, juga turut mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2022 masing-masing 1,2 poin dan 0,8 poin. Di kelompok negara berkembang, India, Meksiko, dan Thailand juga mengalami penurunan proyeksi yang cukup signifikan yakni 1,2 pp, 1,3 pp, dan 1,0 pp.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola



pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).



Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyetujui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "*Katowice Climate Package*" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris.

Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Tapin.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi



informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* saat ini dengan mayoritas pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara teleconference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional



belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.



9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:



- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pembangunan Wilayah Kalimantan masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (b) masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana terutama



kebakaran hutan dan lahan, serta banjir; (c) tingginya ancaman kerusakan hutan yang mengakibatkan terancamnya peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (d) belum optimalnya peran daerah perbatasan; (e) menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (c) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (d) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (e) pelaksanaan pembangunan afirmatif.



(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan budidaya dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (g) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; (i) pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan (j) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.

(4) Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan



pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Gambar IV.11.
Peta Pengembangan Wilayah Kalimantan





b. Perlambatan Perekonomian Nasional Menuju Endemi Covid-19

Indonesia sedang memasuki kondisi menuju endemi Covid-19, kondisi tersebut berdampak pada perekonomian yang mulai menunjukkan perbaikan yang stabil. Perekonomian sempat terpukul dengan kontraksi pada Tahun 2020 sebesar 2,07%, namun perlahan mulai menunjukkan kinerja positif pada Tahun 2021 sebesar 3,69%. Beberapa sektor penyumbang perbaikan kinerja pertumbuhan adalah naiknya harga komoditas pertambangan dunia dikarenakan berbagai batas-batas perdagangan dunia mulai dilakukan pembukaan, disisi lain Masyarakat menjadi semakin percaya diri ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi barang maupun jasa. Mengingat kebijakan pengetatan aktivitas oleh pemerintah juga mulai diregangkan. Sepanjang 2021, Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80% (YoY) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39% (YoY).

Memasuki Tahun 2022, perbaikan kinerja terus dilanjutkan, sampai dengan Triwulan ke-II perekonomian Indonesia mampu tumbuh impresif sebesar 5,44% (YoY) 2022 dan secara triwulanan ekonomi nasional tumbuh 3,73% (QoQ), ditengah pelemahan perekonomian global dan peningkatan inflasi dunia. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lainnya, tingkat pertumbuhan Indonesia dipandang relative lebih baik, berdasarkan laporan *East Asia and the Pacific Economic Update* edisi Oktober 2022 oleh Bank Dunia perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh positif hingga akhir tahun sebesar 5,1%. Dua negara dengan perekonomian terbesar dunia yaitu Tiongkok dan AS juga sedang dalam kondisi stasioner sehingga diharapkan tidak akan memberikan dampak jangka panjang bagi negara-negara di Kawasan ASEAN.

Menuju Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global nampaknya akan sulit untuk dipacu tetap tumbuh *on the track*. Pasalnya prediksi dari beberapa Lembaga internasional, bahwa dunia akan memasuki masa resesi. *International Monetary Fund (IMF)* melalui laporan *World Economic Outlook: Countering The Cost-Of-Living Crisis* memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya dapat tumbuh 2,7%, pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat tumbuh 1%, lebih parahnya Eropa hanya akan tumbuh 0,5%. Lesunya perekonomian tersebut disebabkan situasi yang tidak pasti





akibat pandemi dan perang Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan gencatan senjata. Lebih lanjut utang negara-negara yang semakin tinggi serta timbulnya kekhawatiran likuiditas di segmen utama pasar keuangan. Memperkuat prediksi tersebut, Bank Dunia juga memperingatkan akan terjadinya resesi global dan krisis keuangan bagi negara berkembang, hal tersebut timbul mengingat banyaknya Bank Sentral yang melakukan tindakan pengendalian inflasi cukup ekstrem dengan meningkatkan suku bunga hingga tahun kedepan, yang sebenarnya diyakini tidak akan mampu mengembalikan kondisi inflasi sebelum terjadinya pandemi dibawah 5%.

Berbeda dengan kondisi beberapa negara yang diprediksi mengalami perlambatan bahkan resesi. Menurut *Asian Development Bank (ADB)* pada laporan Bulan September 2022, perekonomian di Indonesia diprediksi masih akan tetap tumbuh positif sekitar 5%, hal ini juga terjadi beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Malaysia. Prediksi pertumbuhan yang cukup optimis di wilayah Indonesia tentunya tidak menghilangkan potensi Indonesia untuk mengikuti trend resesi global jika tidak mampu mengendalikan laju inflasi.

Peningkatan inflasi juga terjadi di Indonesia, dari Bulan Januari hingga September inflasi terus sampai dengan Juni 2022 inflasi menyentuh angka 4,35%, guna menekan inflasi Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 September 2022 telah sepakat untuk menaikkan *BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* tetap sebesar 50 bps menjadi 4,25%, suku bunga *Deposit Facility* naik 50 bps sebesar 3,50% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,0%, disisi lain Bank Indonesia juga menerbitkan beberapa regulasi sebagai upaya menjaga perekonomian yang masih dalam kondisi pemulihan diantaranya menjaga nilai tukar rupiah dengan melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder (*operation twist*) untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN, dan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya. Perlambatan perekonomian juga diprediksikan akan memberikan dampak pada melemahnya kinerja komoditas ekspor, dikarenakan akan banyak kecenderungan terbitnya kebijakan proteksi negara-negara pengimpor sebagai upaya penghematan berbagai cadangan devisa yang dimiliki.



4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1 Perencanaan Pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada periode pembangunan tahun 2021-2026 adalah **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan yakni:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
- 3) Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
- 5) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Tabel IV.3
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan, dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga
2		Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dan Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)
3		Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (Daratan dan Lautan)
4		Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Mendoorng Investasi
5		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Ketahanan Iklim, dan Pembangunan Rendah Korban serta Kebakaran Hutan Lahan Berbasis Teknologi



4.2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin

Perencanaan pembangunan jangka panjang Tapin sudah memasuki periode pamungkas pencapaian visi pembangunan jangka panjang yakni perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RPD Tahun 2024-2026 selain memuat tujuan, sasaran dan program prioritas Kabupaten Tapin, juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 dengan Visi: **“Tapin yang Religius dan Sejahtera”**.

Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005 - 2025 : **“Kabupaten Tapin yang Religius”** mengandung makna bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin.

“Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Rumusan visi RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 memiliki relevansi dan berkontribusi kepada perwujudan visi RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yakni **“Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri”**. Visi RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 juga relevan dan berkontribusi terhadap pencapaian visi RPJP Nasional 2005-2025 yakni **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”**

Substansi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 yakni **“Tapin sebagai daerah maju berlandaskan kebersamaan dan bernafaskan keagamaan”** diharapkan terwujud melalui sejumlah upaya yang melibatkan seluruh pihak terkait baik dari pihak masyarakat, pihak swasta maupun pihak pemerintah. Sejumlah upaya dimaksud dinyatakan dalam bentuk rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat.



2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam yang tersedia serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung sumber daya manusia yang handal

4. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan

Misi ini mengandung upaya-upaya peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, peningkatan prasarana kawasan Rantau Baru, Margasari Baru dan Binuang Baru yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan dan gerakan sadar hukum dimasyarakat.

4.2.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin 2020-2040

Program pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan dengan merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin tahun 2020-2040. RTRW Kabupaten Tapin merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pemanfaatan tata ruang pada skala nasional, Pulau Kalimantan, dan Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam struktur serta pola wilayah Kabupaten Tapin. RTRW bertujuan untuk mewujudkan terwujud sinergitas antar wilayah Kabupaten Tapin dalam rangka pentaan ruang wilayah.

RTRW Kabupaten Tapin tahun 2020-2040 memiliki tujuan pembangunan untuk menciptakan Kabupaten Tapin yang religius dan sejahtera dengan pemanfaatan sumber



daya yang tersedia serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu mencapai Kalimantan Selatan yang maju dan sejahtera. Dalam hal ini, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten sebagai daerah pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Terdapat beberapa kebijakan terkait penataan ruang Kabupaten Tapin yaitu sebagai berikut:

- 1) **Kebijakan 1:** Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
 - a) menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antarkawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - b) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
 - d) meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
 - e) fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
 - f) menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing – masing dapat berkembang sesuai potensinya;
 - g) menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
 - h) membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang;
 - i) meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat- pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.
- 2) **Kebijakan 2:** Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;



- b) melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
 - c) mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten.
 - d) mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal barang di lokasi jaringan jalan skala regional;
 - e) mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal agrobisnis di pusat kawasan agropolitan.
 - f) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir; dan
 - g) memperluas prasarana jaringan listrik ke desa-desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
 - h) memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
 - i) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - j) Meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.
- 3) **Kebijakan 3:** Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
- a) menumbuhkan dan mengembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
 - b) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c) mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - e) memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;



- f) menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g) meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
 - h) mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
 - i) mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
- 4) **Kebijakan 4:** Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
- a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
 - b) memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
 - c) meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - d) memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
 - e) meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
 - f) meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
 - g) mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
 - h) mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - i) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - j) meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - k) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
 - l) memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.
- 5) **Kebijakan 5:** Pengendalian kegiatan pertambangan di area kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/tambang rakyat. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
- a) memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di



- kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
- b) memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - c) menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
 - d) mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek 1 tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
 - e) mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan
 - f) memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.
- 6) **Kebijakan 6:** Pengembangan wisata berbasis lingkungan. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
 - b) membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata
 - c) meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata; dan
 - d) melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.
- 7) **Kebijakan 7:** Pengembangan kawasan strategis kabupaten. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
- a) menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten; dan
 - b) mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.



- 8) **Kebijakan 8:** Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung penetapan kawasan strategis provinsi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis provinsi untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI.

RTRW Kabupaten Tapin memuat rencana struktur ruang yang terdiri dari rencana pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pusat kegiatan berbicara mengenai potensi-potensi infrastruktur pelayanan di Kabupaten Tapin. Hasil analisis RTRW menunjukkan bahwa sistem kawasan perkotaan di Kabupaten Tapin memiliki tingkatan hierarki berdasarkan ketersediaan fasilitas di masing-masing Kawasan. Sistem Kawasan perkotaan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. PKL dengan lokasi berada di perkotaan Rantau Kecamatan Tapin Utara.
- b. PPK dengan lokasi meliputi:
 1. Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang;
 2. Perkotaan Baringin di Kecamatan Candi Laras Selatan;
 3. Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan;
 4. Perkotaan Bungur di Kecamatan Bungur;
 5. Perkotaan Margasari Ilir di Kecamatan Candi Laras Utara;
 6. Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun;
 7. Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
 8. Perkotaan Miawa di Kecamatan Piani;
 9. Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris;
 10. Perkotaan Pematang Karang Halu di Kecamatan Tapin Tengah; dan
 11. Perkotaan Tambarangan di Kecamatan Tapin Selatan



Selain rencana sistem perkotaan, RTRW juga merancang rencana sistem perdesaan. Sistem pusat pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki untuk mempercepat efek pertumbuhan. Sistem perdesaan terdiri dari pembentukan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan kawasan dengan kegiatan yang diarahkan. Rencana pusat-pusat permukiman perdesaan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.4
Rencana Pusat-Pusat Permukiman Perdesaan (PPL)

NO	KECAMATAN	DESA SEBAGAI PPL
1.	Kecamatan Bakarangan	1. Desa Parigi 2. Desa Gadung Karamat; dan 3. Desa Gadung.
2.	Kecamatan Bungur	1. Desa Linuh; 2. Desa Purut; dan 3. Desa Banua Padang
3.	Kecamatan Binuang	1. Desa Tungkap; 2. Desa Pulau Pinang; dan 3. Desa Pulau Pinang Utara.
4.	Kecamatan Hatungun	Desa Batu Hapu.
5.	Kecamatan Tapin Selatan	1. Desa Tatakan; 2. Desa Suato Tatakan; 3. Desa Sawang; dan 4. Desa Harapan Masa
6.	Kecamatan Salam Babaris	1. Desa Kambang HabangBaru; 2. Desa Pantai Cabe.
7.	Kecamatan Tapin Tengah	1. Desa Tirik; 2. Desa Kepyang; dan 3. Desa Pandahan.
8.	Kecamatan Piani	Desa Baramban
9.	Kecamatan Lokpaikat	1. Desa Ayunan Papan; dan 2. Desa Bitahan
10.	Kecamatan Tapin Utara	Desa Lumbu Raya
11.	Kecamatan Candi Laras Selatan	1. Desa Pabaungan Pantai; 2. Desa Baringin.
12.	Kecamatan Candi Laras Utara	Desa Pariok.

Sumber: RTRW Kabupaten Tapin 2020-2040

Rencana sistem jaringan prasarana ditujukan untuk merancang jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan evakuasi bencana. Pemeliharaan jalan diterapkan di seluruh jaringan jalan baik Jalan Kolektor maupun jalan desa yang terdapat di Kabupaten Tapin. Pemeliharaan jalan terdiri dari :



- Pemeliharaan rutin setiap tahunnya dari tahun pertama sejak dilaksanakannya pekerjaan berat pada jalan tersebut
- Pemeliharaan berkala setelah tiga tahun pemeliharaan rutin dilakukan pengoptimalan jalan di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:
 - a. Pengoptimalan ruas-ruas jalan nasional meliputi:
 - ruas jalan Ds. Tungkap (Batas Kabupaten Tapin – Batas Kota Rantau;
 - ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Rantau);
 - ruas jalan Kota Rantau
 - Jembatan Manggaris (batas Kabupaten HSS); dan
 - ruas jalan Rantau by pass (Rantau).
 - b. Pengoptimalan dan pemeliharaan jaringan Jalan kolektor primer (K-2) status provinsi meliputi ruas:
 - ruas jalan Jl. Darusalam (Rantau);
 - ruas jalan Jl. Tasa Nyanyi (Rantau);
 - ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Rantau);
 - ruas jalan Jl. Hasan Basri (Rantau);
 - ruas jalan Rantau – Muara Muning – Margasari;
 - ruas jalan Margasari - Banua Anyar;
 - c. Rencana pembangunan jaringan jalan kolektor primer 2 untuk jalan strategis provinsi yang menghubungkan Margasari – Buas-Buas;
 - d. Pengoptimalan ruas jaringan Jalan kabupaten meliputi 168 ruas jalan.

Rencana sistem jaringan energi dilakukan dengan menyediakan gardu induk GI Tatakan. Rencana pengembangan prasarana listrik ialah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Piani;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rantau di Kec. Tapin Utara;

2. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik 1

- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- b. Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan Jalur Desa Cabe (Batas Kabupaten Banjar) Kecamatan Lokpaikat dengan panjang 25,97 km;





c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan panjang kurang lebih 66,96 km;

3. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan panjang kurang lebih 42,23 km; b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan panjang kurang lebih 628,60 km;

c. Rencana Jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di setiap kecamatan dengan panjang kurang lebih 3,59 km; dan

d. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dengan panjang kurang lebih 1.026,52 km.

4. Gardu Induk Tegangan Menengah (GITM) di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

5. Penambahan kapasitas jaringan listrik dengan penyediaan tempat untuk tiang kabel dan gardu-gardu.

Rencana jaringan sistem telekomunikasi dilakukan dengan membangun sistem jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan bergerak yang dikembangkan meliputi:

- Sistem Jaringan Mikro Digital Kota Banjarmasin – Rantau;
- Sistem Jaringan Mikro Digital Kecamatan Tapin Utara – Kota Kandangan;
- Sistem Jaringan Mikro Digital Rantau di Kecamatan Tapin Utara - Kecamatan Binuang (batas Kabupaten Banjar);
- Pengembangan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator di seluruh Kecamatan yang belum terlayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- Pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (global system for mobile communications) maupun CDMA (code division multiple access) yang menjangkau seluruh wilayah.



Rencana sistem jaringan sumber daya air dilakukan dengan memperluas ketersediaan air bersih, membangun jaringan irigasi, dan pengembangan rawa. Kegiatan ini dilakukan dengan senantiasa memperhatikan dampak yang akan terjadi sehingga bersifat *suistainable* dan berwawasan lingkungan.

RTRW memuat rencana pola ruang wilayah yaitu distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Rencana pola ruang merupakan hasil pengukuran planimetris Peta Pola Ruang, namun luasan tersebut tidak menjadi acuan pasti, karena terdapat beberapa kawasan peruntukan yang pola ruangnya terjadi tumpang tindih dengan rencana pola ruang wilayah yakni antara potensi di lapangan dengan yang ditetapkan dalam rencana pola ruang seperti: kawasan hutan produksi dengan perkebunan, kawasan pertanian dengan perkebunan, dan pertanian dengan permukiman. Pendistribusian rencana pola ruang Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Lindung	13.088,60	6,23%
1	kawasan hutan lindung	6.544,30	3,11%
2	Sempadan sungai	2.651,43	1,26%
3	Sempadan danau/ waduk	317,07	0,15%
4	Situ/ Danau/ Waduk	665,41	0,32%
5	Kawasan cagar alam geologi	2.910,39	1,38%
B	Kawasan Budidaya	197.129,23	93,77%
1	Kawasan Hutan Produksi	13.180,71	6,27%
1.1	kawasan hutan produksi terbatas	881,54	0,42%
1.2	kawasan hutan produksi tetap	5.555,92	2,64%
1.3	kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	6.743,25	3,21%
2	Kawasan Pertanian	167.803,27	79,82%
2.1	kawasan tanaman pangan	27.588,62	13,12%
2.2	kawasan hortikultura	1.326,50	0,63%
2.3	kawasan perkebunan	138.888,15	66,07%
3	Kawasan Pertambangan (Batubara)	3.537,23	1,68%
4	Kawasan Permukiman	11.079,53	5,27%
4.1	kawasan permukiman perdesaan	8.566,54	4,08%
4.2	kawasan permukiman perkotaan	2.512,99	1,20%
5	kawasan industri	1.513,09	0,72%
6	kawasan pariwisata	15,40	0,01%

Sumber: RTRW Kabupaten Tapin 2020-2040

Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dilakukan dengan memperhatikan prioritas dan operasionalisasi perencanaan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tapin



telah menetapkan Langkah-langkah dan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang untuk mengaturnya.

4.2.3.4 Isu Strategis Regional Lainnya

Isu strategis regional lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Tapin adalah Penetapan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dan Food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Penetapan IKN di Provinsi Kalimantan Timur

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Rapat Paripurna DPR ke 13 masa sidang 2021-2022 tanggal 18 Januari 2022, menandai babak baru dari rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sejak 17 Agustus 2019. Lama terhambat dan tidak ada kemajuan, akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi secara global, pembahasan untuk pemindahan IKN mulai kembali menggeliat ketika DPR menerima Surat Presiden (Surpres) beserta Rancangan UU IKN pada 29 September 2021. Sejak menetapkan anggota Pansus RUU IKN pada sidang paripurna 7 Desember 2021, DPR hanya membutuhkan waktu 42 hari pembahasan hingga penetapan RUU IKN menjadi UU.

Adanya Ibukota Negara di Pulau Kalimantan memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan pembangunan di Kalimantan. Meskipun sebagian baru dirasakan ke depan, namun berbagai pembangunan telah dilaksanakan sebagai penopang IKN di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin juga memiliki keuntungan tersendiri dimana diharapkan pembangunan juga lebih meningkat, khususnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

b. Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah

Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah yang diimplementasikan oleh Kementerian Pertanian melalui program dan kegiatan yakni penataan kawasan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan korporasi petani peningkatan kapasitas dan diversifikasi usaha merupakan wujud upaya keberlanjutan usaha pertanian hulu-hilir berbasis kawasan dan klaster menurut kesesuaian agro-ekosistem. Progres peningkatan infrastruktur (irigasi, jalan produksi, alsintan & pendukung lainnya), rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi selama



tiga tahun terakhir berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan *Food Estate*.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus mendukung pengembangan program *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Dukungan di antaranya melalui infrastruktur Sumber Daya Air berupa rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan secara bertahap dimulai pada akhir September 2020. Terdapat dua pengembangan *food estate* di Kalteng yakni untuk tanaman padi berada di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dengan leading sektor Kementerian Pertanian dan tanaman singkong seluas 60.000 ha dengan leading sektor Kementerian Pertahanan. Adapun program ini akan berdampak positif pada ketahanan pangan di Kabupaten Tapin sebagai wilayah yang berdekatan dengan Kalimantan Tengah.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tapin

Perumusan isu strategis Kabupaten Tapin dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2024-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Tapin yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan dokumen perencanaan Kabupaten Tapin, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin periode pembangunan 2024-2026 dijabarkan sebagai berikut.

1. Menuju SDM yang Sehat dan Berdaya Saing

Masih belum optimalnya pencapaian pembangunan kualitas SDM di Tapin sangat terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia maupun komponen penyusunnya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah lebih concern dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menjadi wajib mengingat kemajuan suatu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Di samping faktor-faktor lain seperti sumber daya alam, infrastruktur dan sosial budaya serta modal dan kestabilan politik.



Sebagai subyek sekaligus obyek pelaksana pembangunan, sumber daya manusia memiliki peran untuk mengelola komponen pembangunan dan mendayagunakan seluruh potensi dalam pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perwujudan sumber daya manusia di suatu daerah yang berkualitas tinggi akan berpengaruh positif pada pengelolaan semua sumber daya alam yang ada sehingga memiliki hasil maksimal dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Pengembangan agribisnis dalam pembangunan industri hulu dan hilir pertanian

Sumberdaya alam dan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai modal pertumbuhan hidup (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agrasif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Tingginya sektor primer yang mendominasi perekonomian di Tapin menjadikan potensi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah barang/jasa menjadi terbuka. Kondisi ini terlihat dari tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur ekonomi makro meskipun sempat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dan 2021. Potret potensi ekonomi ini didukung dengan meningkatnya geliat sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan ekonomi sektoral mencapai 4,37 persen dengan kontribusi sebesar 6,82 persen. Kedua kondisi ini jika diolah dalam kebijakan maka akan terlihat potensi peningkatan usaha agribisnis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat yang berkecimpung di



bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) maupun IMK (Industri Mikro Kecil).

3. Pembangunan kewilayahan berbasis tata ruang wilayah dan ketahanan lingkungan hidup

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Adapun manfaat dari penataan ruang tersebut adalah mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Tapin; mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Tapin dengan wilayah sekitarnya; dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Tapin yang berkualitas.

Penataan ruang bagi pelaksanaan pembangunan merupakan poin penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tapin. Hal tersebut dapat terealisasi jika penataan ruang yang diimplementasikan menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan kewilayahan berbasis tata ruang sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin.

Berbagai fenomena alam yang menyangkut kebencanaan seperti gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun. Bencana tersebut menyebabkan kerugian yang besar seperti memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Berbagai keluhan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan tingkat kesulitan manajemen pemerintahan. Adanya upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup tentu menjadi solusi utama dalam mengantisipasi tingginya potensi bencana daerah.

Dari sisi pembangunan kewilayahan dalam aspek ekonomi, wilayah strategis dan cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara lebih cepat, karena memiliki



produk unggulan yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumberdaya dan masih terbelakang. Keterkaitan antar kecamatan dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Masih banyak diantaranya yang berdiri sendiri, atau bahkan saling merugikan. Akibat nyata dari ke semua hal tersebut adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan.

Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, dengan kota-kota menengah dan kecil juga menjadi salah satu isu yang penting untuk dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan. Pertumbuhan yang terjadi masih bertumpu di pusat kota, sedangkan pertumbuhan kecamatan-kecamatan lain berjalan lambat. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali.

4. Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan eskترم yaitu setara dengan USD 1.9 PPP. Secara keseluruhan di Indonesia sampai dengan Tahun 2021 terdapat 4 persen penduduk yang dikategorikan masuk dalam klasifikasi penduduk dengan kemiskinan ekstrim. Lebih dari permasalahan kemiskinan biasa, permasalahan ini menuntut kerja ekstra dari berbagai pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kabupaten Tapin.

Presiden Joko Widodo memberikan target dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem hingga Tahun 2024, kemiskinan ekstrem wajib terselesaikan atau 0 persen. Kabupaten Tapin menjadi salah satu dari 212 Wilayah Prioritas penanggulangan Kemiskinan ekstrem, dikarenakan terdapat 26.370 rumah tangga di Tapin dengan kategori miskin ekstrem. Isu ini tentu menjadi lebih mengemuka dimana Tapin memiliki beberapa wilayah sulit dan membutuhkan akses yang baik dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga infrastruktur pembangunan juga menjadi penting keberadaannya, khususnya dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat, menyetabilkan harga kebutuhan pokok, dan peningkatan akses pelayanan dasar.



5. Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi reformasi birokrasi, prioritas Kabupaten Tapin dalam menjalankan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Tapin adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal,



dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Kabupaten Tapin.

6. Percepatan Pencapaian TPB/SDG's

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Tapin, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Masih belum optimalnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadikan program prioritas pemerintah ini terus digalakkan realisasinya. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor perekonomian yang mampu menopang ekonomi kerakyatan menjadi salah satu awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2023. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Bab V dalam dokumen RPD ini memuat **Tujuan dan Sasaran**, di mana **Tujuan** harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi indikator kinerja utama Kabupaten Tapin, sedangkan **Sasaran** adalah penjabaran Tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Tapin dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama tahun perencanaan RPD.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2024-2026 berdasarkan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi



RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 adalah :

“TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”

Kata kunci dalam visi pembangunan tersebut antara lain :

1. **“Kabupaten Tapin yang Religius”** mengandung makna bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan batin.
2. **“Sejahtera”** mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Substansi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 yakni *“Tapin sebagai daerah maju berlandaskan kebersamaan dan bernafaskan keagamaan”* diharapkan terwujud melalui sejumlah upaya yang melibatkan seluruh pihak terkait baik dari pihak masyarakat, pihak swasta maupun pihak pemerintah.



Gambar V.1
Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan RPJPD Periode Ke IV



TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJPD PERIODE KE IV





Sejumlah upaya dimaksud dinyatakan dalam bentuk rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam yang tersedia serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung sumber daya manusia yang handal

4. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan

Misi ini mengandung upaya-upaya peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, peningkatan prasarana kawasan Rantau Baru, Margasari Baru dan Binuang Baru yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan dan gerakan sadar hukum dimasyarakat



Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Tapin dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Tapin, serta memperhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Tapin. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3 dan RPJMD ke - 4, pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Tapin yang religius dan sejahtera dengan tema di RPJMD tahap ke-4 adalah Momentum untuk pencapaian kualitas manusia dan memantapkan berbagai pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan landasan kebersamaan serta nafas keagamaan dalam tatanan sosial.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Amanat indikator makro juga tertuang dalam Surat Edaran Bersama Nomor: 050/3499/SJ Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang perlu ditindaklanjuti untuk menyelaraskan target sasaran Nasional dengan daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan target pembangunan Nasional (RPJMN).



Tabel V.1
Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024						Indikator	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan					RPD Kab. Tapin				
	Indikator	Target						Indikator	Target					Indikator	Target		
		2020	2021	2022	2023	2024			2022	2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	IPM	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54	IPM	71,70	72,20	72,65	73,05	73,50	IPM	71,74	72,13	72,51	
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7	7,5-8,0	8,5-7,5	6,0-7,0	Tingkat Kemiskinan (%)	4,880-4,60	4,60-4,40	4,40-4,22	4,22-4,05	4,05-3,77	Tingkat Kemiskinan (%)	3,43	3,34	3,25	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9-6,5	4,4-4,9	6,0-5,3	3,6-4,3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,95	3,85	3,75	
4	Indeks Gini	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,378-0,375	0,360-0,374	Indeks Gini	0,328	0,326	0,324	0,322	0,310	Indeks Gini	0,283	0,279	0,275	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	5,3-5,9	6,2-6,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,0-4,5	4,5-5,2	5,2-6,0	6,0-6,24	6,24-6,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,46	5,73	6,00	
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	47,50-49,61	49,61-51,60	51,60-53,66	53,66-55,81	55,81-57,48	PDRB per Kapita (Juta Rp)	67,81	68,90	70,00	
7	Tingkat penurunan emisi GRK	26	26,3	26,7	27	27,3	Tingkat penurunan emisi GRK	21	22,22	24,6	26,6	28,9	Tingkat penurunan emisi GRK	10	11	12	





RPD KABUPATEN TAPIN ²⁰²⁴ - 2026

No	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan					RPD Kab. Tapin					
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target			
		2020	2021	2022	2023			2024	2022	2023	2024	2025		2026	2024	2025	2026
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,58	70,9	71,22	71,54	71,86	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	65,06	65,09	





Sesuai dengan tahapan keempat RPJPD Kabupaten Tapin, maka dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 diharapkan fokus untuk dapat mencapai arahan tahap keempat RPJPD, yaitu pada periode ini peningkatan kualitas manusia yang telah dicapai melalui tiga tahapan perencanaan pembangunan sebelumnya diorientasikan untuk terciptanya tatanan yang membuka ruang bagi warganya untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta menyuarakan secara demokratis pilihan-pilihan tersebut. Artinya, kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk pemanusiaan manusia itu sendiri, bukan hanya sekedar melahirkannya sebagai sumberdaya handal untuk perekonomian, perpolitikan atau sosial budaya, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri. Pada periode 2020-2025 ini, tatanan dengan manusia berkualitas secara individual, diharapkan didukung penuh oleh landasan kebersamaan dan nafas keagamaan pada tingkat struktur sosial, sehingga kesejahteraan mewujud sebagai bagian dari kemanusiaan dan dalam tatanan sosial yang baik.

Tujuan pembangunan Kabupaten Tapin dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapin, sebagaimana berikut:

Tabel V.2
Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	SATUAN	DATA AWAL (2022)	TARGET (2026)
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	-	71,02	72,51
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	6,00
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	3,60	3,25
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	-	55,00	61,00



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	SATUAN	DATA AWAL (2022)	TARGET (2026)
Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	NA	87,50

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Daya Saing Masyarakat

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapin yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Maju dan Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha



semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Tapin termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat.

Peningkatan sektor perekonomian Kabupaten Tapin dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata, sektor perdagangan maupun subsektor ekonomi kreatif.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan

3. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Ketahanan sosial merupakan upaya untuk mengatasi perubahan, baik perubahan dari eksternal daerah maupun internal daerah. Dinamika dan perubahan menjadi banyak ragamnya saat ini, terlebih setelah masa gempuran teknologi dan pandemi covid-19 yang dialami oleh masyarakat dunia. Perubahan-perubahan dinamika tersebut tentu memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kabupaten Tapin di masa pandemi ini terkena imbasnya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapin turut berperan dan bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya taraf hidup keluarga
- b) Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
- c) Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah



4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
- b) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
- c) Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,
- d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik

5. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pengembangan wilayah dan pembangunan yang merata. Dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapin terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapin, yaitu dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan



Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel V.3

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TAHUN TARGET		
			2021	2022	2024	2025	2026
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas Pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	poin	70,31	71,02	71,74	72,13	72,51
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	poin	0,599	0,591	0,607	0,611	0,615
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	poin	0,708	0,705	0,712	0,715	0,717
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	4,91	5,46	5,73	6,00
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-1,57	-0,36	2,00	3,00	4,00
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	1,27	7,55	7,78	7,89	8,00
	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,37	2,69	3,35	3,67	4,00
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	5,72	5,74	5,76	5,78	5,78
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	3,60	3,60	3,43	3,34	3,25





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TAHUN TARGET		
			2021	2022	2024	2025	2026
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	47,17	65,61	67,81	68,90	70,00
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	poin	0,289	0,291	0,283	0,279	0,275
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,96	4,15	3,95	3,85	3,75
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	53,94	55,00	57,00	59,00	61,00
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	poin	69,69	68,93	70,72	71,61	72,50
	Nilai LPPD	poin		3,529	3,575	3,600	3,650
Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	54,02	NA	80,00	81,00	82,00
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,	Survey Penilaian Integritas	poin	70,17	73,92	79,00	80,00	81,00
Sasaran 4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik	Survey Kepuasan Masyarakat	poin	87,44	71,00	75,50	77,75	80,00
	Indeks SPBE	poin	1,89	2,29	3,1	3,3	3,5





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TAHUN TARGET		
			2021	2022	2024	2025	2026
Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	NA	NA	85,20	86,45	87,50
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	poin	NA	NA	80,00	85,00	90,00
	Tingkat penurunan emisi GRK	%	0	8,38	10	11	12
	Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	2,43	0,17	0,18	0,03	0,05





Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Tapin.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel V.4
Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan
			Rata-rata Lama Sekolah	
		Meningkatnya akses warga negara berpartisipasi dalam pendidikan	Persentase anak usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	
			Persentase anak usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	
		Meningkatkan Pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		





RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan kapasitas kepemudaan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya peran wirausaha muda dalam perekonomian	Pertumbuhan wirausaha muda	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan kapasitas keolahragaan daerah	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	Dinas Pemuda dan Olahraga
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
		Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kesehatan ibu dan bayi	Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Persentase penerapan PHBS	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan	Rata - rata waktu tunggu pelayanan	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	RSUD





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan	<i>Length Of Stay (LOS)</i>	RSUD
			Rasio Daya Tampung Tempat Tidur Di Fasilitas Kesehatan	RSUD
			Rata-rata waktu tunggu pelayanan	RSUD
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan komoditas pertanian	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Dinas Pertanian
		Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Jumlah Produksi Padi	Dinas Pertanian
			Jumlah Produksi jagung	
			Jumlah Produksi Cabai Rawit Hiyung	
			Jumlah Produksi Jahe	
			Jumlah Produksi Jeruk	
			Jumlah Produksi karet	
			Jumlah Produksi Kelapa Sawit	
			Jumlah Produksi Daging	
			Jumlah Produksi Telur	





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Termanfaatkannya teknologi pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi Pertanian	Dinas Pertanian
		Terpenuhinya sarana prasarana pertanian	Persentase pemenuhan sarana prasarana pertanian	Dinas Pertanian
		Meningkatkan kualitas pertumbuhan komoditas perikanan	LPE subkategori perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya mutu dan produksi perikanan	Persentase capaian produksi perikanan	Dinas Perikanan
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatkan daya saing perdagangan daerah	kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dinas Perdagangan
	LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatkan kapasitas Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Perindustrian
		Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh	Dinas Perindustrian
		Meningkatkan kapasitas UMKM daerah	Persentase UMKM binaan yang naik skala usaha	Dinas Perindustrian
		Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	Dinas Perindustrian
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM baru	Pertumbuhan UMKM baru	Dinas Perindustrian





RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Persentase peningkatan investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Meningkatkan PAD Usaha Pariwisata	Kontribusi Usaha Pariwisata terhadap PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	
			Rata-rata belanja wisatawan	
		Meningkatkan pelestarian cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya perlindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) /situs yang dilindungi			
	Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan		
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	Meningkatkan pendapatan Masyarakat	Rata - rata pendapatan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja
		Terwujudnya seluruh usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMR	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan UMR	Dinas Tenaga Kerja





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Menurunkan jumlah PPKS di Tapin	Tingkat penurunan jumlah PPKS	Dinas Sosial
		Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Dinas Sosial
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial
		Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dinas Sosial
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan	Indeks Desa Membangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan
		Meratanya cadangan pangan di seluruh wilayah	Persentase Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok	Tingkat Inflasi	Sekretariat Daerah
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok	Persentase rumusan kebijakan pengendalian harga pangan pokok yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan taraf hidup keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya perencanaan keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Partisipasi Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatnya Kesempatan kerja berkualitas bagi masyarakat	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan di setiap perangkat daerah	Indeks Merit Sistem	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatkan kompetensi kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Bappelitbang
		Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Rata - rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	Bappelitbang



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Rata - rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Bappelitbang
		Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Bappelitbang
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi syarat IGA	Bappelitbang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Semua OPD
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP(Perencanaan Kinerja)	Semua OPD
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	
			Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)	
	Nilai LPPD	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan administrasi umum	Persentase pelaksanaan urusan administrasi umum yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah





RPD KABUPATEN TAPIN - 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah
Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	
			Tingkat Kepuasan Pelayanan Penerbitan SP2D	
			Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu	
			Penurunan temuan kesalahan tata kelola administrasi	
			Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	
			Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Derajat Fiskal Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 4.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Survey Penilaian Integritas	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks Maturitas SPIP	Inspektorat
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	Inspektorat
Sasaran 4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		Menurunnya pelanggaran perda trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		Meningkatkan kesejahteraan anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan stabilitas ipoleksosbudhankam daerah Kab. Tapin	Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat kab. Tapin	Persentase masyarakat yang paham terhadap wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya pemahaman politik masyarakat Kab. Tapin	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya partisipasi ormas dalam pembangunan daerah kab. Tapin	Persentase ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan Kab. Tapin	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, dan aman di masyarakat	Persentase antisipasi dan penanganan konflik yang diselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-El	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan KIA	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
			Persentase Penerbitan Akta Kematian	
		Meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan	Persentase Dokumen Yang Telah Diarsipkan Dengan Baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Tapin	Persentase Peningkatan SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan Sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Fasilitasi pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang berhasil diselesaikan	Sekretariat DPRD
			Persentase Pembahasan Anggaran yang terselesaikan	





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Pengawasan DPRD yang berhasil diselesaikan	
	Indeks SPBE	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informasi	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya data statistik sektoral yang disajikan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya layanan informasi pemerintah yang diamankan	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Persentase Ketertiban Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Sarana Transportasi	Persentase Moda Transportasi yang Laik Jalan	Dinas Perhubungan





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Akses Air Bersih dan Akses Sanitasi Layak	Prosentase Infrastruktur Dasar Pelayanan Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Prosentase Infrastruktur Dasar Pelayanan Air Limbah	
		Meningkatnya infrastruktur dasar (air bersih dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang Mendapatkan Pelayanan Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	
		Meningkatnya kualitas Jaringan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya perijinan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	Persentase perijinan yang telah divalidasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kapasitas konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase kemantapan jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Sarpras Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	
			Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi	
		Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Sarpras Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	
		Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	
		Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat	Persentase luasan kawasan kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan		
	Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	Tingkat penurunan emisi GRK		Persentase keberhasilan aksi mitigasi perubahan iklim		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan sampah dan limbah	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas RTH	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Indeks kapasitas Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	





Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin periode 2024-2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.





Tabel V.5
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengehuaran}} \times 100$
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p>
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{PDRB_{(IP+Pd)t} - PDRB_{(IP+Pd)t-1}}{PDRB_{(IP+Pd)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p>



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL
		IP= Kategori Industri Pengolahan Pd= Kategori Perdagangan
	LPE Kategori Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	$\frac{PDRB \text{ adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</p> <p>G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL
<p>Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL																																					
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Tindakan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CAPAIAN KINERJA</th> <th>OUTPUT</th> <th>OUTCOME</th> <th>LAINNYA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5 %</td> <td>5 %</td> <td>10 %</td> <td>20 %</td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP		FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL	Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %	Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %	Tindakan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %	CAPAIAN KINERJA		OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL		5 %	5 %	10 %	20 %
Sistem AKIP		FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																		
Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30 %																																			
Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25 %																																			
Tindakan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15 %																																			
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10 %																																			
CAPAIAN KINERJA		OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																		
	5 %	5 %	10 %	20 %																																			
	Nilai LPPD	Penilaian LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																																					
Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah: a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) d) Penyerapan anggaran (20) e) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15)																																					
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas	Survey Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK																																					





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL																									
<p>pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,</p>		<p>Survei Penilaian Integritas (SPI) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis responden yaitu Internal (Pegawai ASN/Non-ASN), Eksternal (Masyarakat Pengguna Layanan), dan Ekspert Pakar/Ahli/Stakeholder).</p>																									
<p>Sasaran 4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Analisa Perhitungan : $IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}} \times \text{Bobot}$</p> <p>Bobot = $1 / \text{Jumlah Parameter}$ $= 1 / 9$ $= 0,111$</p> <p style="text-align: center;">IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" data-bbox="1339 655 2045 807"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Buruk Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan :</p> <p>a. Parameter Pelayanan : Faktor atau aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pemohon sebagai variabel penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>b. Kuisioner : Suatu daftar pertanyaan (untuk diisi) dijawab oleh pemohon layanan.</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Buruk Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																							
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																							
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Buruk Baik																							
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																							
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																							





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL																																																													
	Indeks SPBE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Domain dan Aspek Penilaian</th> <th>Bobot</th> <th colspan="2">Predikat Indeks SPBE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domain 1 - Kebijakan SPBE</td> <td>13%</td> <td rowspan="2">NO</td> <td rowspan="2">NILAI INDEKS</td> <td rowspan="2">PREDIKAT</td> </tr> <tr> <td>Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</td> <td>25%</td> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>Aspek 2 - Perencanaan Strategis</td> <td>10%</td> <td>2</td> <td>3,0 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi</td> <td>10%</td> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,0</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE</td> <td>5%</td> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>Domain 3 - Manajemen SPBE</td> <td>16,5%</td> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE</td> <td>12%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Aspek 6 - Audit TIK</td> <td>4,5%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Domain 4 - Layanan SPBE</td> <td>45,5%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</td> <td>27,5%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Aspek 8 - Layanan Publik</td> <td>18%</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (Indeks minimal 2,6)</p>	Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,0 - < 4,2	Sangat Baik	Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 - < 3,0	Baik ^{*)}	Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup	Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	5	< 1,8	Kurang	Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%				Aspek 6 - Audit TIK	4,5%				Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%				Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%				Aspek 8 - Layanan Publik	18%			
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																																																													
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																																																											
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																																																														
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	1	4,2 - 5,0	Memuaskan																																																											
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,0 - < 4,2	Sangat Baik																																																											
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 - < 3,0	Baik ^{*)}																																																											
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup																																																											
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	5	< 1,8	Kurang																																																											
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																																																														
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																																																														
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																																																														
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																																																														
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																																																														
Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat																																																													
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	<p>Indeks Infrastruktur =</p> $0,3255 \times \text{jalan} + 0,3343 \times \text{air} + 0,5133 \times \text{sanitasi} + 0,5033 \times \text{pkpl} + 0,5153 \times \text{i_kom_inv}$ <p>Variabel Indeks Infrastruktur :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Definisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td> </tr> </tbody> </table>	Definisi	% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x																																																									
Definisi																																																															
% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x																																																															
% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x																																																															
% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x																																																															





TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL
		% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)
	Tingkat penurunan emisi GRK	$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \frac{\text{Emisi GRK}_{(n)} - \text{Emisi GRK}_{(n-1)}}{\text{Emisi GRK}_{(n-1)}} \times 100\%$ Ket: n= tahun berjalan n-1= tahun sebelumnya
	Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{IKLH}_{(n)} - \text{IKLH}_{(n-1)}}{\text{IKLH}_{(n-1)}} \times 100\%$ Ket: n= tahun berjalan n-1= tahun sebelumnya IKLH= ANGKA IKLH



Tabel V.6

Penanggung Jawab Utama Indikator Kinerja Utama Daerah dan Penanggung Jawab Data dan Pelaporan Indikator Kinerja Utama Daerah

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					OPD Penanggung Jawab Indikator	OPD Penanggung Jawab Data dan Pelaporan
			Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 TRI III	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode		
Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	poin	70,31	71,02	71,43	71,74	72,13	72,51	72,51	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda Dan Olahraga	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	poin	0,599	0,591	0,603	0,607	0,611	0,615	0,615	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	poin	0,708	0,705	0,710	0,712	0,715	0,717	0,717	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,43	4,91	4,5	5,46	5,73	6,00	6,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	-1,57	-0,36	1	2	3	4	4	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan	Dinas Pertanian
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	persen	1,27	7,55	2,95	7,55	7,78	7,89	7,89	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
	LPE Kategori Industri Pengolahan	persen	4,37	2,69	3,35	3,35	3,67	4	4	Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perindustrian
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	persen	5,72	5,74	5,74	5,75	5,76	5,78	5,78	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	poin	3,60	3,60	3,59	3,43	3,34	3,25	3,25	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial
Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	47,17	65,61	50,55	67,81	68,90	70	70	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	poin	0,289	0,291	0,346	0,283	0,279	0,275	0,275	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	poin	4,96	4,15	4,13	3,95	3,85	3,75	3,75	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	53,94	55,00	55,00	57,00	59,00	61,00	61,00	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	poin	69,69	68,93	70,72	70,72	71,61	72,50	72,50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Nilai LPPD	point	0	3,529	3,550	3,575	3,6	3,650	3,650	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					OPD Penanggung Jawab Indikator	OPD Penanggung Jawab Data dan Pelaporan
			Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 TRI III	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode		
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	54,02	-	80	80	81	82	82	Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,	Survei Penilaian Integritas	poin	70,17	73,92	78	79	80	81	81	Inspektorat	Inspektorat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik	Survei Kepuasan Masyarakat	poin	87,44	71,00	75,5	75,5	77,75	80	80	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	Indeks SPBE.	poin	1,89	2,29	0	3,1	3,3	3,5	3,5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	0	0	0	85,20	86,45	87,50	87,50	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	poin	-	-	-	80	85	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tingkat Penurunan Emisi GRK.	persen	0	8,38	9	10	11	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen	2,43	0,17	0,18	0,18	0,03	0,05	0,05	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS



Dengan rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada bab sebelumnya maka selanjutnya bab ini akan menjabarkan rumusan strategi dan arah kebijakan serta implementasi pada program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah pemerintah Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian langkah strategis yang dilaksanakan melalui program – program indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026. Strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran – sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut:



Tabel VI.1.
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat		
	Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan		
	Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Pengembangan potensi agroindustri daerah
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat		
	Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	
	Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		
	Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin
	Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	
	Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,	
	Sasaran 4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan	



TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI
	publik dan pemerintahan berbasis elektronik	
Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah		
	Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026:

1. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tapin untuk memudahkan masyarakat untuk menjangkau fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah, nyaman untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang maksimal. Mengingat bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting dalam hidupnya. Dengan pelayanan pendidikan yang terstandar dan terjangkau diharapkan pendidikan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga jenjang pendidikan tertinggi (perguruan tinggi). Hal ini juga dilakukan pada bidang kesehatan harus mampu melayani masyarakat sesuai dgn SOP kesehatan yang professional, tepat dan melayani dengan hati. Sehingga membuat rasa nyaman masyarakat Kabupaten Tapin yang ingin berobat sehingga mencapai kesembuhan.

Dengan akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ini sangat penting dilaksanakan untuk menjamin fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mumpuni diharapkan kualitas SDM Kabupaten Tapin dapat meningkat. Sehingga mampu mengembangkan minat, bakat, serta mencetak SDM yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan usaha.



2. Pengembangan potensi agroindustri daerah

Kabupaten Tapin mempunyai sektor unggulan daerah yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan, sector ini memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah yang cukup dominan. Hal ini perlu diperhatikan pemerintah daerah Tapin agar pembangunan perekonomian daerah mampu mengoptimalkan potensi-potensi pada sektor unggulan. Pertanian merupakan sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi, selain mencukupi kebutuhan pangan, sektor pertanian dapat berkembang menjadi sektor industri (agroindustry) unggulan daerah. Agroindustri merupakan proses pengolahan produk (hasil pertanian) yang berupa bahan mentah ke sektor industri. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan adalah proses dari agroindustri. Dengan upaya pengembangan potensi agroindustri maka diharapkan mampu memberikan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk pertanian, meningkatkan kesejahteraan para petani, pekebun dan peternak. Dengan ini diharapkan pengembangan potensi agroindustri di Kabupaten Tapin ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kualitas masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraannya, hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sejahtera memiliki kehidupan yang mapan, sehat, dan produktif. Masyarakat yang perekonomiannya stabil, merupakan masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan baik. Dengan beragam kondisi masyarakat tentunya tidak semua memiliki kemampuan yang sama, sehingga beberapa diantaranya masih memerlukan dukungan dan atau bantuan dari pemerintah daerah dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin dengan kondisi yang terbatas masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga dapat hidup dengan layak. Perlindungan sosial harus diiringi oleh pemberdayaan masyarakat, pada hakikatnya masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya. Sehingga dengan pemberdayaan masyarakat ini akan menggiring pada kegiatan masyarakat yang lebih produktif dan memberikan dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi yang



lebih baik. Dengan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja. Sehingga angkatan kerja ini mampu memenuhi kualifikasi dari bidang usaha yang dibutuhkan sehingga peluang dan kesempatan kerja yang tersedia cukup tinggi. Dengan demikian diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tapin.

4. Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin

Birokrasi menjadi instrument sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih professional, efektif dan efisien.

5. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk melakukan aksesibilitas dan mobilisasi untuk aktivitas sehari-hari. Hingga saat ini, Kabupaten Tapin masih terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, terutama untuk jalan penghubung dan daerah perbatasan, jembatan, kemudian drainase dan pembangunan perumahan/pemukiman yang layak huni. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan pergerakan aktivitas masyarakat, pergerakan barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus memperhatikan kondisi alam sekitar, perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Sehingga pembangunan ini dapat dirasakan hingga masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah yang berkelanjutan ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Tapin.



6.2 ARAH KEBIJAKAN

Dengan rumusan strategi diatas maka langkah berikutnya adalah menjabarkan strategi dalam arah kebijakan yang menjadi rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan akan dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPd dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar VI.1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026



Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.

1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pembangunan tahun pertama (2024), berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat kualitas daya saing SDM masyarakat Kabupaten Tapin, maka tema pembangunan tahun ini adalah

“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Masyarakat”



Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2024 pembangunan Kabupaten Tapin fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan kualitas SDM dan penguatan reformasi birokrasi. Pada tahun ini tata kelola pemerintahan yang mumpuni dan kualitas SDM yang unggul menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan ditahun berikutnya. Birokrasi yang mampu melayani dengan profesional dan kesungguhan hati dan didukung dengan kualitas aparatur baik, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kualitas SDM yang mampu berdaya saing diharapkan mampu mengakselerasi dengan meningkatnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Pembangunan tahun kedua (2025) ini merupakan estafet pembangunan tahun 2024, pada tahun ini mengusung tema pembangunan,

**“Pemantapan perekonomian kerakyatan guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat”**

Merujuk tema pembangunan ini Kabupaten Tapin pada tahun ini akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Pada tahun ini fokus utama pembangunan Kabupaten Tapin adalah meningkatkan perekonomian daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin. Dengan fondasi yang kuat dari capaian pembangunan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tahun ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan perekonomian yang merata dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

3) Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Pada tahun 2026, menjadi tahun terakhir dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Tapin, pada tahun ini diharapkan banyak capaian pembangunan yang tercapai. Dengan demikian tahun 2026 ini mengusung tema pembangunan,

“Tapin yang Religius dan Sejahtera”

Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Tapin difokuskan pembangunan yang merata pada beberapa aspek terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dengan kolaborasi dan terintegrasi



kebijakan yang kemudian dilaksanakan dengan optimal melalui program dan kegiatan diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Sehingga akan mempercepat meningkatkan kualitas kehidupan pada seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tapin akan semakin sejahtera.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Tabel VI.2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2024	TAHAPAN 2025	2026
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat						
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pengembangan kawasan pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan berbasis IT	√	√	-	
		Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT	√	√	√	
		Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan	√	-	-	
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan						
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Optimalisasi diversifikasi pertanian	√	-	-	
		Pengembangan perkebunan kerakyatan	√	√	-	
		Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem	-	√	-	





RPD KABUPATEN TAPIN 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
			2024	2025	2026
		logistik rantai persediaan			
		Peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi produk	-	√	√
		Peningkatan iklim investasi daerah	√	√	-
		Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata	-	√	√
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat					
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah	√	-	-
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	√	√	-
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah		Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja	-	√	√





TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2024	TAHAPAN 2025	2026
Tujuan 4						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik						
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	√	-	-	
Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah		Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin	√	√	-	
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	√	√	-	
Sasaran 4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	√	√	
		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	-	-	√	
		Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada	√	-	-	





TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
			2024	2025	2026
Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah					
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	√		
		Mengoptimalkan pengawasan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	√		



6.3 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Dengan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijabarkan diatas, maka perlu adanya langkah nyata dari rumusan tersebut melalui program prioritas daerah. Program prioritas daerah ini merupakan program yang menggambarkan keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut penjabaran program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin selama Tahun 2024-2026:

**Tabel VI.3.
Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program pembangunan daerah
beserta target dan pagu Tahun 2024-2026**

2023-11-14

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat														
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pengembangan Kawasan pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 (Dengan Satuan:Persentase)	65,68	67,98	150.000.000	68,00	200.000.000	68,35	250.000.000	68,35	600.000.000	Dinas Pendidikan
				Persentase pendidik (guru) yang bersertifikasi (Dengan Satuan:%)	40,97	41,15		41,50		41,90		41,90		Dinas Pendidikan
				Persentase pendidik (guru) yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Dengan Satuan:%)	91,77	86,15		86,75		87,00		87,00		Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Pengembangan Kawasan pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (Dengan Satuan:Persentase)	95,87	100,20	35.386.088.511	100,25	36.413.337.360	100,30	45.191.415.498	100,30	116.990.841.369	Dinas Pendidikan
		Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (Dengan Satuan:%)	89,62	91,62		92,62		93,62		93,62		Dinas Pendidikan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (Dengan Satuan:Persentase)	90,15	92,40		92,50		92,60		92,60		Dinas Pendidikan
				Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:Persentase)	62,92	63,75		64,25		64,75		64,75		Dinas Pendidikan
				Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	52,88	57,97		60,50		63,05		63,05		Dinas Pendidikan
				Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Dengan Satuan:%)	40,67	43,58		45,04		46,95		46,95		Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Dengan Satuan:Persentase)	105,67	81		82		83		83		Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (Dengan Satuan:Persentase)	74	76		77		78		78		Dinas Pendidikan
				Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:Persentase)	53,85	55		55		56		56		Dinas Pendidikan
				Persentase PNF dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:Persentase)	35,71	44		45		46		46		Dinas Pendidikan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (Dengan Satuan:Persentase)	64,42	64,48		64,50		64,52		64,52		Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Dengan Satuan:%)	72,86	74,86		75,86		76,86		76,86		Dinas Pendidikan
				Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:%)	92,00	93,00		95,00		100		100		Dinas Pendidikan
				Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	61,98	68,02		71,07		74,12		74,12		Dinas Pendidikan
				Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	53,04	57,01		58,95		60,98		60,98		Dinas Pendidikan
				Indeks Iklim Keamanan SD (Dengan Satuan:%)	80,07	87,15		90,69		94,23		94,23		Dinas Pendidikan
				Indeks Iklim Kebinekaan SD (Dengan Satuan:%)	85,59	90,57		93,06		95,55		95,55		Dinas Pendidikan
				Indeks Inklusivitas SD (Dengan Satuan:%)	73,29	79,49		82,59		85,69		85,69		Dinas Pendidikan
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Dengan Satuan:%)	78,94	85,62		88,96		92,30		92,30		Dinas Pendidikan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Indeks Iklim Kebinekaan SMP (Dengan Satuan:%)	80,15	84,57		86,78		88,99		88,99		Dinas Pendidikan
				Indeks Inklusivitas SMP (Dengan Satuan:%)	76,49	82,69		85,79		88,89		88,89		Dinas Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan tidak menular dan menular (hepatitis, cacangan, malaria, kusta, ispa, dan DBD) (Dengan Satuan:persen)	0	100%	28.197.282.577	100%	18.197.282.577	100%	40.097.282.577	100%	86.491.847.731	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (Dengan Satuan:persen)	7%	23%		30%		53%		53%		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan kepesertaan BPJS (Dengan Satuan:persen)	87,05 %	90%		93 %		95,01%		95,01%		Dinas Kesehatan
				Persentase laporan monitoring dan evaluasi profil yang tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentasi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dengan Satuan:persen)	23.18%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	79%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentasi Desa yang UCI (Universal Child Immunization) (Dengan Satuan:persen)	78,9%	82,5%		85%		90%		90%		Dinas Kesehatan
				Persentasi Desa yang Kejadian Luar biasa (KLB) dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	100%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus (Dm) (Dengan Satuan:persen)	78.59%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Dengan Satuan:persen)	143.89%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar (Dengan Satuan:persen)	82.34%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Terduga Tbc Yang Mendapatkan Pelayanan Tbc Sesuai Standar (Dengan Satuan:persen)	29,36%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:persen)	16.48%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase balita yang berstatus gizi baik (Dengan Satuan:persen)	80%	82 %		83%		84%		84%		Dinas Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	95.46%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	99.57%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	64.47%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	92.01%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%	2.500.325.150	100%	2.500.325.150	100%	2.500.325.150	100%	7.500.975.450	Dinas Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dinas kesehatan (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%	216.815.763	100%	216.815.763	100%	216.815.763	100%	650.447.289	Dinas Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Karyawan yang mendapatkan pelatihan/diklat (BLUD) (Dengan Satuan:Persen)	-	100	62.436.493.019	100	65.756.317.670	100	69.242.133.553	100	197.434.944.242	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
				Persentase Kualitas Barang Milik Daerah yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	-	100		100		100		100		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Survei Kepuasan Kualitas Layanan Jaringan Informasi Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persen)	-	80		85		90		90		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
				Persentase Komplain pasien yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	-	100		100		100		100		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
				Persentase hasil laporan indikator mutu dan keselamatan pasien (Dengan Satuan:Persen)	-	75		80		85		85		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
				Persentase Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan dengan coverage Anggaran 100% (Dengan Satuan:Persen)	-	80		80		80		80		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
				Persentase peningkatan pendapatan (Dengan Satuan:Persen)	0	5		5		5		5		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
				Persentase sarana prasarana yang sesuai standar pada penunjang medik dan non medik (Dengan Satuan:Persen)	0	70		75		80		80		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Karyawan yang mendapatkan pelatihan/diklat (Dengan Satuan:Persen)	-	100	3.960.000.000	100	3.960.000.000	100	3.960.000.000	100	11.880.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan														
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Optimalisasi diversifikasi pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:%)	98,21	100	365.341.880	100	186.764.191	100	204.088.142	100	756.194.213	Dinas Perikanan
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Optimalisasi diversifikasi pertanian	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terlaksananya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dengan Satuan:%)	84,77	100	661.907.741	100	338.369.813	100	369.756.463	100	1.370.034.017	Dinas Perikanan
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Optimalisasi diversifikasi pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan fungsional yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	0	119,22	24.288.554.558	122,09	23.894.554.017	125,02	18.075.609.534	125,02	66.258.718.109	Dinas Pertanian
		Pengembangan perkebunan kerakyatan		Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (Dengan Satuan:Persen)	7,17	6,02		5,88		5,74		5,74		Dinas Pertanian
				Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Dengan Satuan:Persen)	1,5	1,28		1,25		1,22		1,22		Dinas Pertanian
				Persentase Usulan Pupuk bersubsidi yang disetujui pusat (Dengan Satuan:Persen)	46,42	80		80		80		80		Dinas Pertanian

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Peningkatan daya saing produk lokal melalui standarisasi produk	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka (Dengan Satuan:%)	5,13	4,01	63.995.400	4,05	63.995.400	4,07	63.995.400	4,07	191.986.200	Dinas Perindustrian
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	66,03	55	2.484.565.000	60	10.942.615.956	70	33.853.187.783	70	47.280.368.739	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (Dengan Satuan:%)	18,86	45	204.909.770	48	895.000.000	50	1.210.000.000	50	2.309.909.770	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Persentase Calender Of Event Pariwisata yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	55		60		65		65		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:%)	0	2,6	30.000.000	2,7	230.000.000	2,8	445.000.000	2,8	705.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan		Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kelompok Sadar Wisata yang aktif (Dengan Satuan:%)	39,13	45	372.000.000	50	805.000.000	55	1.195.000.000	55	2.372.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Pertumbuhan Pelaku Usaha Pariwisata. (Dengan Satuan:%)	0	2,6		2,7		2,8		2,8		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis (Dengan Satuan:Persen)	59,68	63,75	5.381.668.441	70	5.303.623.461	100	4.272.701.621	100	14.957.993.523	Dinas Pertanian
				Persentase Kelas kelompok tani Lanjut (Dengan Satuan:Persen)	62,5	76,98		80,87		84,76		84,76		Dinas Pertanian
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat														
Meningkatnya taraf hidup keluarga	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	96,12	100	6.817.000.000	100	7.304.000.000	100	14.252.500.000	100	28.373.500.000	Dinas Sosial
				Persentase Anak Telantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
				Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
				Persentase Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	93,76	100		100		100		100		Dinas Sosial

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (Dengan Satuan:%)	0	14		16		18		18		Dinas Sosial
Meningkatnya taraf hidup keluarga		Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100	4.530.000.000	100	4.610.000.000	100	1.600.000.000	100	10.740.000.000	Dinas Sosial
				Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100				100		Dinas Sosial
				Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan (Dengan Satuan:%)	1,01	2,2		2,4		2,6		2,6		Dinas Sosial
				Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Sosial
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	0	100	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Per Unadang-Undangan (Dengan Satuan:%)	90	95	4.744.615.316	100	2.688.430.903	100	4.352.763.878	100	11.785.810.097	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Bumdes yang Menghasilkan Laba (Dengan Satuan:%)	53	61		64		67		67		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Posyandu Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	90	1.942.838.760	90	1.942.838.760	90	1.942.838.760	90	5.828.516.280	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase TP-PKK yang berkualitas (Dengan Satuan:%)	78	80		80		80		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	32	30		30		30		30		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang kompeten (Dengan Satuan:%)	25	25		25		25		25		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase Bumdes Aktif (Dengan Satuan:%)	67	74		78		82		82		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase hasil rekomendasi lembaga keagamaan dan sosial masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	19.617.546.182	100%	13.706.780.624	100%	22.610.869.526	100%	55.935.196.332	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kegiatan pembinaan mental (Dengan Satuan:Indeks)	84%	86%		87%		88%		88%		Sekretariat Daerah
				Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	0	100	3.973.929.515	100	1.975.000.000	100	2.156.228.500	100	8.105.158.015	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
				Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.620.093.988	100	1.178.143.000	100	1.287.362.000	100	5.085.598.988	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
				Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
				Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra konomi dan Infrastrukturnya yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
				Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan Struktural (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.391.652.082	100	3.467.905.625	100	2.693.466.363	100	17.553.024.070	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi (Dengan Satuan:point)	83	87		88		90		90		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur (Dengan Satuan:point)	83	87		88		90		90		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point)	83	87		88		90		90		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah Diklat Jabatan (Dengan Satuan:Persen)	73,29	80	492.683.331	85	392.683.331	90	492.683.331	90	1.378.049.993	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	6.339.790.111	100	5.629.889.871	100	4.079.630.340	100	16.049.310.322	Inspektorat

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP (Dengan Satuan:Nilai)	3,7	3,6		3,7		3,8		3,8		Inspektorat
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase KUA PPAS, Perda, dan Perbup APBD yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	91,66	100	114.673.366.179	100	110.677.101.879	100	111.706.144.579	100	337.056.612.637	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase Pencairan Dana SKPD (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase kejadian komplain yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP). (Dengan Satuan:Persen)	3,23	0,50	1.453.587.415	0,50	5.171.950.370	0,50	8.375.438.412	0,50	15.000.976.197	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Penerimaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Persen)	-5,47	1,50		1,50		1,50		1,50		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dengan Satuan:Persen)	113,97	100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai)	88,76	80		80		80		80		Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	IKM terhadap pelayanan akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan (Dengan Satuan:Poin)	89,21	90	400.820.771	91	421.822.847	92	444.925.132	92	1.267.568.750	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	90	1.261.748.800	90	1.261.748.800	95	2.460.000.000	100	4.983.497.600	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Terhadap Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Low Spot (Dengan Satuan:%)	37.3	50	437.435.400	60	478.424.482	70	33.519.640.000	70	34.435.499.882	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Layanan SPBE (Dengan Satuan:%)	83.33	93		98		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,		Optimalisasi Kinerja pelayanan publik berbasis IT	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP (Dengan Satuan:%)	0	100	960.000.000	100	870.000.000	100	736.000.000	100	2.566.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Pengaduan yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,		Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) (Dengan Satuan:Persen)	22,72	30	2.188.283.985	32	2.241.119.246	33	4.449.001.926	33	8.878.405.157	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
				Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada (Dengan Satuan:Persen)	71,63	30		32		33		33		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
				Persentase desa dan kelurahan yang memiliki Satlinmas (Dengan Satuan:Persen)	70	80		85		87		87		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,		Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peserta yang paham terhadap politik (Dengan Satuan:Persen)	0	83	1.315.583.800	85	4.902.889.770	90	1.440.583.800	90	7.659.057.370	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah														
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya infrastruktur irigasi (Dengan Satuan:%)	18,62	10	51.347.369.256	12	97.543.219.931	14	95.543.219.931	14	253.086.439.862	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air (Dengan Satuan:%)	12,65	11,90		12		13		13		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih Melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (Dengan Satuan:%)	40,18	65	9.000.000.000	70	10.560.000.000	80	10.560.000.000	80	30.120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan:%)	70.1	72	175.800.277.875	73	213.596.624.281	74	212.400.297.509	74	601.797.199.665	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentasi jumlah dokumen yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	90	100	6.000.000.000	100	6.538.343.753	100	10.605.720.046	100	18.076.687.506	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Persentasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang (Dengan Satuan:%)	45	78		80		85		85		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100	865.000.000	100	370.000.000	100	2.535.000.000	100	3.770.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
				Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan kumuh (Dengan Satuan:Persentase (%))	0,15	5,54	3.425.000.000	2,89	4.634.916.500	3,63	2.810.371.500	12,17	10.870.288.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Dengan Satuan:Persentase (%))	2,59	3,9	5.926.116.700	3,9	5.890.500.000	2,59	2.014.772.000	14,49	13.831.388.700	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Mengoptimalkan pengawasan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air (Dengan Satuan:%)	0	27,50	1.792.270.927	27,50	2.066.245.809	27,50	1.810.761.936	27,50	5.669.278.672	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Titik Pantau Udara Yang Memenuhi Baku Mutu (Dengan Satuan:%)	0	87,5		87,5		87,5		87,5		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luasan Lahan yang Terpulihkan dari Kerusakan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	0	2		4		6		6		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	0	25		50		75		75		Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Parameter Pengujian Air dan Udara yang Termasuk dalam Lingkup Akreditasi (Dengan Satuan:%)	61	80		85		85		85		Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Mengoptimalkan pengawasan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	147.000.000	100	405.000.000	100	161.000.000	100	713.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Usaha Kecil dan Menengah yang Menghasilkan Limbah B3 (bengkel) dapat Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	0	62		65		70		70		Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Mengoptimalkan pengawasan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (Dengan Satuan:%)	66,67	83,33	5.039.872.497	91,67	5.759.750.476	100	6.454.633.334	100	17.254.256.307	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang ditangani (Dengan Satuan:%)	55,64	71		70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang dikurangi (Dengan Satuan:%)	16,09	28		30		30		30		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase areal publik bebas sampah (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				persentase TPS zero sampah pada waktu tertentu (siang hari) (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS3R, rumah kompos) yang beroperasi (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (Dengan Satuan:%)	10	70		80		90		90		Dinas Lingkungan Hidup



6.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Penetapan Kawasan Strategis, menjelaskan mengenai kriteria kawasan strategis dan penetapan kawasan strategis yang ada di RTRW Kabupaten Tapin yang dijabarkan sebagai berikut.

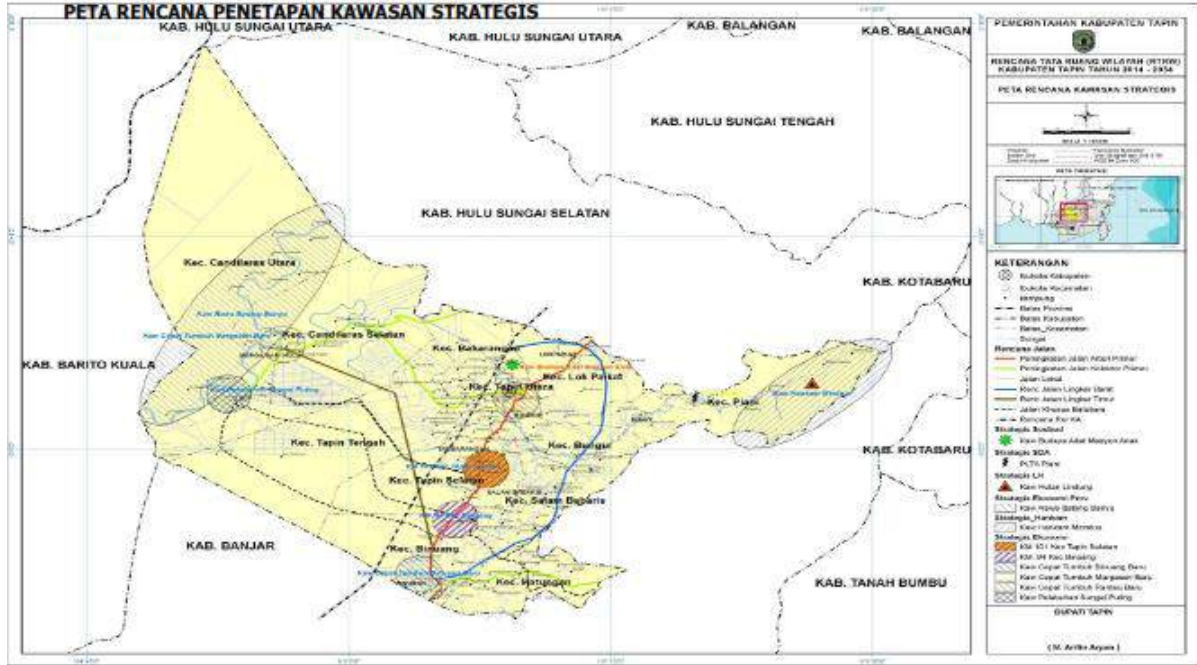
Rencana penetapan Kawasan strategis diwilayah kabupaten terdiri atas:

- I. Kawasan strategis provinsi (KSP), yang ada di Kabupaten Tapin terdiri atas
 - A. Kawasan strategis provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi berada dikawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi;
 - ✓ Kecamatan Candi Laras Selatan
 - ✓ Kecamatan Candi Laras Utara
 - ✓ Kecamatan Tapin Tengah
 - B. Kawasan strategis provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan dijabarkan sebagai berikut:
 - ✓ Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada dikawasan tertentu dipegunungan meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, Gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan.
- II. Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - A. Kawasan strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:
 - a. Kawasan Rantau Baru
 - b. Kawasan Binuang Baru
 - c. Kawasan Margasari Baru
 - d. Kawasan Pelabuhan sungai putting
 - e. Km 94 Kecamatan Binuang dan
 - f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan
 - B. Kawasan strategis kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara.
 - C. Kawasan strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa waduk Tapin sebagai pembangkit energi listrik berada di desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.



D. Kawasan strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa hutan lindung di Kecamatan Piani.

Gambar VI.2.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tapin





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



Bab Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat daerah memuat indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Tapin. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan



daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 dan Tabel VII. 2 berikut ini :



Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi (Juta Rupiah)			
				2023 (APBD)	2024	2025	2026
2	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	641.002	-3,02%	800.614	727.703	646.435	659.885
02.01	Belanja Operasi	448.970	0,01%	485.782	486.000	485.850	486.000
02.01.01	Belanja pegawai	448.970	0,01%	485.782	486.000	485.850	486.000
02.03	Belanja Tak Terduga	14.038	7,92%	20.200	25.000	25.000	25.000
02.03.01	Belanja Tak Terduga	14.038	7,92%	20.200	25.000	25.000	25.000
02.04	Transfer	165.138	-6,08%	196.475	121.490	133.585	146.885
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.520	8,00%	2.525	2.727	2.945	3.180
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.270	8,00%	2.525	2.727	2.945	3.180
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	250		-	-	-	-
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	162.619	-6,26%	193.950	118.764	130.640	143.704
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-6,26%	193.950	118.764	130.640	143.704
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	162.619	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	12.856	949,84%	98.158	95.213	2.000	2.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-		10.000	23.000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-40,83%	16.000	10.000	1.500	1.500
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	12.856		70.658	61.713	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-22,22%	1.500	500	500	500

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)





Tabel VII.2
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
 Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.777.376	1.396.770	1.412.339	1.539.747	1.679.771
2	Penerimaan Pembiayaan	168.118	1.500	250.300	125.441	63.001
	<i>(Dikurangi):</i>					
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	641.002	800.614	727.703	646.435	659.885
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.304.491	597.656	934.936	1.018.753	1.082.887

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)



Dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel VII.3
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Tapin
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.777.376	1.396.770	1.412.339	1.539.747	1.679.771
2	Penerimaan Pembiayaan	168.118	1.500	250.300	125.441	63.001
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.945.493	1.398.270	1.662.639	1.665.188	1.742.772

Sumber: BKAD Kabupaten Tapin, 2023 (diolah)

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tapin berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana



yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada lampiran 7.2.

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				807.916.609.790		917.485.855.991		976.915.849.861		2.705.903.570.093	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				205.056.693.936		228.770.000.000		273.056.985.082		706.883.679.018	
	DINAS PENDIDIKAN				205.056.693.936		228.770.000.000		273.056.985.082		706.883.679.018	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100	169.520.605.425	100	192.156.662.640	100	227.615.569.584	100	818.748.696.858	Dinas Pendidikan
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretaria (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (Dengan Satuan:Persentase)	95,87	100,20	35.386.088.511	100,25	36.413.337.360	100,30	45.191.415.498	100,30	158.836.785.380	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (Dengan Satuan:%)	89,62	91,62		92,62		93,62		93,62		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (Dengan Satuan:Persentase)	90,15	92,40		92,50		92,60		92,60		Dinas Pendidikan
		Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:Persentase)	62,92	63,75		64,25		64,75		64,75		Dinas Pendidikan
		Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	52,88	57,97		60,50		63,05		63,05		Dinas Pendidikan
		Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Dengan Satuan:%)	40,67	43,58		45,04		46,95		46,95		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Dengan Satuan:Persentase)	105,67	81		82		83		83		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (Dengan Satuan:Persentase)	74	76		77		78		78		Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:Persentase)	53,85	55		55		56		56	Dinas Pendidikan	
		Persentase PNF dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:Persentase)	35,71	44		45		46		46	Dinas Pendidikan	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (Dengan Satuan:Persentase)	64,42	64,48		64,50		64,52		64,52	Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Dengan Satuan:%)	72,86	74,86		75,86		76,86		76,86	Dinas Pendidikan	
		Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B (Dengan Satuan:%)	92,00	93,00		95,00		100		100	Dinas Pendidikan	
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	61,98	68,02		71,07		74,12		74,12	Dinas Pendidikan	
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	53,04	57,01		58,95		60,98		60,98	Dinas Pendidikan	
		Indeks Iklim Keamanan SD (Dengan Satuan:%)	80,07	87,15		90,69		94,23		94,23	Dinas Pendidikan	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD (Dengan Satuan:%)	85,59	90,57		93,06		95,55		95,55	Dinas Pendidikan	
		Indeks Inklusivitas SD (Dengan Satuan:%)	73,29	79,49		82,59		85,69		85,69	Dinas Pendidikan	
		Indeks Iklim Keamanan SMP (Dengan Satuan:%)	78,94	85,62		88,96		92,30		92,30	Dinas Pendidikan	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP (Dengan Satuan:%)	80,15	84,57		86,78		88,99		88,99	Dinas Pendidikan	
		Indeks Inklusivitas SMP (Dengan Satuan:%)	76,49	77,49		82,69		85,79		88,89	Dinas Pendidikan	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 (Dengan Satuan:Persentase)	65,68	67,98	150.000.000	68,00	200.000.000	68,35	250.000.000	68,35	703.405.926	Dinas Pendidikan
		Persentase pendidik (guru) yang bersertifikasi (Dengan Satuan:%)	40,97	41,15		41,50		41,90		41,90	Dinas Pendidikan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase pendidik (guru) yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Dengan Satuan:%)	91,77	86,05		86,15		86,75		87,00		Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				172.115.052.862		165.444.877.513		190.830.693.396		528.390.623.771	
	DINAS KESEHATAN				105.718.559.843		95.728.559.843		117.628.559.843		319.075.679.529	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:persen)	0	100%	74.369.276.403	100%	74.379.276.403	100%	74.379.276.403	100%	297.374.105.612	Dinas Kesehatan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran dinas Kesehatan (Dengan Satuan:persen)	0	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat dinas kesehatan (Dengan Satuan:persen)	0	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan tidak menular dan menular (hepatitis, cacangan, malaria, kusta, ispa, dan DBD) (Dengan Satuan:persen)	0	100%	28.197.282.577	100%	18.197.282.577	100%	40.097.282.577	100%	111.258.060.045	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (Dengan Satuan:persen)	7%	23%		30%		53%		53%		Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan kepesertaan BPJS (Dengan Satuan:persen)	87,05 %	90%		93 %		95,01%		95,01%		Dinas Kesehatan
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi profil yang tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentasi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dengan Satuan:persen)	23.18%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	79%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentasi Desa yang UCI (Universal Child Immunization) (Dengan Satuan:persen)	78,9%	82,5%		85%		90%		90%	Dinas Kesehatan	
		Persentasi Desa yang Kejadian Luar biasa (KLB) dilakukan Penyeledikan Epidemologi < 24 Jam (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	100%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Dm) (Dengan Satuan:persen)	78.59%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Dengan Satuan:persen)	143.89%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar (Dengan Satuan:persen)	82.34%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Orang Terduga Tbc Yang Mendapatkan Pelayanan Tbc Sesuai Standar (Dengan Satuan:persen)	29,36%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:persen)	16.48%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase balita yang berstatus gizi baik (Dengan Satuan:persen)	80%	82 %		83%		84%		84%	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	95.46%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	99.57%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	64.47%	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	92.01%	100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%	2.500.325.150	100%	2.500.325.150	100%	2.500.325.150	100%	10.001.300.600	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dinas kesehatan (Dengan Satuan:persen)	100 %	100%	216.815.763	100%	216.815.763	100%	216.815.763	100%	863.263.052	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Dengan Satuan:Persen)	47,78%	69 %	434.859.950	70,5%	434.859.950	71,6%	434.859.950	71,6%	1.734.439.800	Dinas Kesehatan
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL				66.396.493.019		69.716.317.670		73.202.133.553		209.314.944.242	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Karyawan yang mendapatkan pelatihan/diklat (BLUD) (Dengan Satuan:Persen)	-	100	62.436.493.019	100	65.756.317.670	100	69.242.133.553	100	197.434.944.242	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase Kualitas Barang Milik Daerah yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	-	100		100		100		100		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase Survei Kepuasan Kualitas Layanan Jaringan Informasi Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persen)	-	80		85		90		90		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase Komplain pasien yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	-	100		100		100		100		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase hasil laporan indikator mutu dan keselamatan pasien (Dengan Satuan:Persen)	-	75		80		85		85		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan dengan coverage Anggaran 100% (Dengan Satuan:Persen)	-	80		80		80		80		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
		Persentase peningkatan pendapatan (Dengan Satuan:Persen)	0	5		5		5		5		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase sarana prasarana yang sesuai standar pada penunjang medik dan non medik (Dengan Satuan:Persen)	0	65		70		75		80		Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Karyawan yang mendapatkan pelatihan/diklat (Dengan Satuan:Persen)	-	100	3.960.000.000	100	3.960.000.000	100	3.960.000.000	100	11.880.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				365.083.369.256		454.320.000.000		450.816.376.293		1.273.805.000.000	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				365.083.369.256		454.320.000.000		450.816.376.293		1.273.805.000.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	89	100	17.359.722.125	100	17.595.416.125	100	17.359.742.897	100	69.674.657.272	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya infrastruktur irigasi (Dengan Satuan:%)	18,62	10	51.347.369.256	12	97.543.219.931	14	95.543.219.931	14	348.129.659.793	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air (Dengan Satuan:%)	12,65	11,84		11,90		12		13		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih Melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (Dengan Satuan:%)	40,18	65	9.000.000.000	70	10.560.000.000	80	10.560.000.000	80	41.101.327.509	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sarpras Sistem Pengelolaan Persampahan yang berfungsi (Dengan Satuan:%)	100	100	1.400.000.000	100	1.660.000.000	100	1.710.000.000	100	7.876.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki Sarana Pengolahan Air Limbah (Dengan Satuan:%)	12,84	20	2.099.000.000	25	2.690.000.000	30	2.591.000.000	30	10.070.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	0,1	1.654.000.000	0,1	1.661.000.000	0,2	1.107.000.000	0,4	4.483.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman dengan Sistem Jaringan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	0	0,1	1.200.000.000	0,1	1.200.000.000	0,2	1.200.000.000	0,4	3.601.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi (Dengan Satuan:%)	55	65	86.703.000.000	70	95.215.412.471	75	92.188.412.471	75	364.322.237.413	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang berfungsi (Dengan Satuan:%)	15	22	11.420.000.000	24	4.810.000.000	26	4.801.000.000	26	27.376.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan:%)	70.1	72	175.800.277.875	73	213.596.624.281	74	212.400.297.509	74	804.956.169.665	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator /teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	96	100	1.100.000.000	100	1.249.983.439	100	749.983.439	100	3.849.950.317	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rasio proyek yang menjadikewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Dengan Satuan:%)	95	100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentasi jumlah dokumen yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	90	100	6.000.000.000	100	6.538.343.753	100	10.605.720.046	100	23.365.077.296	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang (Dengan Satuan:%)	45	75		78		80		85		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				32.448.418.483		33.527.718.364		22.550.265.666		88.526.402.513	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				32.448.418.483		33.527.718.364		22.550.265.666		88.526.402.513	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100	5.485.100.183	100	5.585.100.264	100	5.585.100.666	100	21.489.838.386	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100	865.000.000	100	370.000.000	100	2.535.000.000	100	4.152.077.500	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan kumuh (Dengan Satuan:Persentase (%))	0,15	5,54	3.425.000.000	2,89	4.634.916.500	3,63	2.810.371.500	12,17	11.685.743.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Dengan Satuan:Persentase (%))	2,59	3,9	5.926.116.700	3,9	5.890.500.000	2,59	2.014.772.000	14,49	21.955.588.700	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (Dengan Satuan:Persentase (%))	2,17	21,28	16.747.201.600	31,91	16.897.201.600	10,64	9.455.021.500	63,83	54.390.802.684	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase (%))	0	0	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.742.546.651		13.718.737.952		16.797.618.587		43.258.903.190	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN				8.006.771.213		8.200.007.062		10.952.495.780		27.159.274.055	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	5.448.767.468	100	5.580.325.823	100	6.090.141.704	100	24.348.286.938	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban ,Ketentrman, keindahan) (Dengan Satuan:Persen)	22,72	30	2.188.283.985	32	2.241.119.246	33	4.449.001.926	33	11.781.670.657	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada (Dengan Satuan:Persen)	71,63	30		32		33		33		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase desa dan kelurahan yang memiliki Satlinmas (Dengan Satuan:Persen)	70	75		80		85		87		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase kejadian kebakaran yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	369.719.760	100	378.561.993	100	413.352.150	100	1.647.509.232	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
		Persentase layanan penyelamatan pada kondisi yang membahayakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					4.735.775.438		5.518.730.890		5.845.122.807		16.099.629.135	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	4.105.775.438	100	2.888.730.890	100	3.215.122.807	100	14.781.035.475	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100	630.000.000	100	2.630.000.000	100	2.630.000.000	100	6.520.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase peralatan perlindungan kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Masyarakat yang mendapatkan wawasan dan informasi pencegahan bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 jam setelah kejadian (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase korban bencana yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi daerah pasca bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase terlaksananya Koordinasi rekonstruksi daerah pasca bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				20.470.528.602		21.704.522.162		22.863.910.837		65.038.961.601	
	DINAS SOSIAL				20.470.528.602		21.704.522.162		22.863.910.837		65.038.961.601	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat Dinsos (Dengan Satuan:%)	100	100	6.581.134.039	100	7.129.026.697	100	5.552.534.810	100	24.535.776.558	Dinas Sosial
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	78,48	100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100	1.834.600.000	100	1.995.900.000	100	1.158.540.000	100	6.202.702.426	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	96,12	100	6.817.000.000	100	7.304.000.000	100	14.252.500.000	100	32.748.898.318	Dinas Sosial
		Persentase Anak Telantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	93,76	100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (Dengan Satuan:%)	0	12		14		16		18		Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100	4.530.000.000	100	4.610.000.000	100	1.600.000.000	100	12.474.263.242	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100				100		Dinas Sosial
		Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan (Dengan Satuan:%)	1,01	2,2		2,4		2,6		2,6		Dinas Sosial
		Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan/atau Sosial yg mendapatkan Perlindungan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	636.478.086	100	590.000.000	100	255.000.000	100	1.716.578.456	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang fasilitas sarana dan prasarana terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	71.316.477	100	75.595.465	100	45.336.027	100	239.792.287	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			179.279.562.970		193.224.340.522		227.760.850.192		600.264.753.684		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.548.272.423		20.305.810.435		25.997.509.790		55.851.592.648		
	DINAS TENAGA KERJA			9.548.272.423		20.305.810.435		25.997.509.790		55.851.592.648		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)	0	95	6.159.272.423	100	9.687.010.435	100	12.286.765.653	0	34.709.837.468	Dinas Tenaga Kerja
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:Persen)	0	90		95		100		100		Dinas Tenaga Kerja
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	0	0		95		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang berkualitas dan berkompetensi (Dengan Satuan:Persen)	90 %	93%	1.308.000.000	94 %	4.081.200.000	95 %	5.021.800.000	95 %	11.569.541.646	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Di tempatkan (Dengan Satuan:Persen)	70,31	70,79%	1.704.000.000	70,95%	5.593.800.000	71,11%	7.340.700.000	71,11%	18.548.853.222	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan (Dengan Satuan:Persen)	28%	25%	377.000.000	23%	943.800.000	20%	1.348.244.137	20%	3.385.897.545	Dinas Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.812.731.984		7.326.519.051		7.674.219.330		21.813.470.365		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.812.731.984		7.326.519.051		7.674.219.330		21.813.470.365		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:Persen)	0	90	5.339.269.739	90	5.764.911.528	90	6.072.852.531	0	17.177.033.798	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % (Dengan Satuan:Persen)	0	0		80		80		80		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:persen)	0	30	240.190.095	32	281.123.680	35	294.562.555	35	815.876.330	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Prosentase Keterlibatan Perempuan di parlemen (Dengan Satuan:persen)	16	20		20		28		30		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Dengan Satuan:Point)	0,042	0,040	56.032.572	0,039	118.124.800	0,030	118.124.800	0,030	292.282.172	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Perkawinan Anak di Kabupaten Tapin (Dengan Satuan:Persen)		8,70	472.939.382	8,65	450.997.743	8,60	477.318.144	8,60	1.401.255.269	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Jumlah OPD yang mengakses data terpilah Gender (Dengan Satuan:Persen)	100	100	118.138.642	100	123.135.700	100	123.135.700	100	364.410.042	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (Dengan Satuan:persen)	100	100	510.814.335	100	500.933.500	100	500.933.500	100	1.512.681.335	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dibina (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Perusahaan Sahabat Anak yang dibina (Dengan Satuan:Persen)		10		20		30		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Point)	0.32	0.30	75.347.219	0.29	87.292.100	0.25	87.292.100	0,25	249.931.419	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				15.274.984.474		13.383.533.657		15.049.355.848		43.707.873.979	
	DINAS KETAHANAN PANGAN				15.274.984.474		13.383.533.657		15.049.355.848		43.707.873.979	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	5.024.984.474	100	4.703.533.657	100	3.346.220.893	100	16.528.866.804	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Efisiensi Penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	0	100	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Penguatan Cadangan Pangan (Dengan Satuan:%)	-	100	7.700.000.000	100	6.400.000.000	100	11.480.058.333	100	27.888.811.090	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase kenaikan Konsumsi Bahan Pangan Non-Beras/Terigu (Dengan Satuan:%)	-	5		10		15		20		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	300.000.000	100	230.000.000	100	143.145.742	100	816.291.484	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji (Dengan Satuan:%)	100	100	1.250.000.000	100	1.050.000.000	100	79.930.880	100	2.459.861.760	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			8.281.990.000		8.681.990.000		4.284.000.000		21.247.980.000		
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			8.281.990.000		8.681.990.000		4.284.000.000		21.247.980.000		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terfasilitasi dan terinventarisasi. (Dengan Satuan:Persentase (%))	100	100	600.000.000	100	700.000.000	100	150.000.000	100	1.656.290.150	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	6.981.990.000	100	7.331.990.000	100	3.634.000.000	100	17.947.980.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase jumlah objek redistribusi tanah yang terealisasi (Dengan Satuan:%)	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase persil aset tanah pemda terukur, tersurvei, terpetakan yang telah diajukan proses sertifikasi ke BPN dan terverifikasi BPN. (Dengan Satuan:Persentase (%))	24,31	100	600.000.000	100	550.000.000	100	400.000.000	100	1.658.973.900	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Persentase penataan perencanaan tanah pemerintah daerah kabupaten / kota yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persentase (%))	0	0		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			23.633.478.775		21.943.840.529		27.972.997.806		73.550.317.110		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			23.633.478.775		21.943.840.529		27.972.997.806		73.550.317.110		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	13.398.476.548	100	9.130.277.475	100	10.882.203.567	100	41.672.531.377	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:%)	130,74	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan. (Dengan Satuan:%)	74,29	100	739.926.604	100	741.926.604	100	1.065.684.599	100	2.967.464.411	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase dokumen lingkungan yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air (Dengan Satuan:%)	0	27,50	1.792.270.927	27,50	2.066.245.809	27,50	1.810.761.936	27,50	6.802.000.807	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Titik Pantau Udara Yang Memenuhi Baku Mutu (Dengan Satuan:%)	0	87,5		87,5		87,5		87,5		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Luasan Lahan yang Terpulihkan dari Kerusakan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	0	2		4		6		6		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	0	25		50		75		75		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Parameter Pengujian Air dan Udara yang Termasuk dalam Lingkup Akreditasi (Dengan Satuan:%)	61	61		80		85		85		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keaneekaragaman Hayati (Dengan Satuan:%)	0	7,5	1.852.000.000	7,5	3.152.000.000	7,5	6.885.000.000	7,5	13.350.392.515	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	147.000.000	100	405.000.000	100	161.000.000	100	771.588.019	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Usaha Kecil dan Menengah yang Menghasilkan Limbah B3 (bengkel) dapat Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	0	60,5		62		65		70		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara (Dengan Satuan:%)	88	100	28.000.000	100	28.500.000	100	29.000.000	100	113.431.745	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya (Dengan Satuan:%)	14.29	37,5	180.000.000	50	190.000.000	62	200.000.000	62	701.299.867	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	14.29	25		37,5		50		62		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	82,5	82,5	27.000.000	82,5	28.000.000	82,5	29.000.000	82,5	110.220.878	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	90	75	406.932.199	75	419.140.165	75	431.714.370	75	1.652.866.539	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata (Dengan Satuan:%)	31,6	30		35		41		46		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	22.000.000	100	23.000.000	100	24.000.000	100	90.913.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (Dengan Satuan:%)	66,67	83,33	5.039.872.497	91,67	5.759.750.476	100	6.454.633.334	100	22.393.043.554	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase volume sampah yang ditangani (Dengan Satuan:%)	55,64	71		70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase volume sampah yang dikurangi (Dengan Satuan:%)	16,09	28		30		30		30		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase areal publik bebas sampah (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
		persentase TPS zero sampah pada waktu tertentu (siang hari) (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS3R, rumah kompos) yang beroperasi (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (Dengan Satuan:%)	10	60		70		80		90		Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.938.641.842		8.387.106.444		8.519.059.535		24.844.807.821	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.938.641.842		8.387.106.444		8.519.059.535		24.844.807.821	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6.899.573.289	100	7.305.331.036	100	7.390.306.585	100	27.105.063.649	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:Poin)	89,23	90	284.687.577	91	289.396.335	92	294.575.969	92	1.151.105.193	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	IKM terhadap pelayanan akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan (Dengan Satuan:Poin)	89,21	90	400.820.771	91	421.822.847	92	444.925.132	92	1.658.388.531	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	343.560.205	100	360.556.226	100	379.251.849	100	1.432.435.142	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tingkat akurasi elemen data perorangan pada Kartu Keluarga (Dengan Satuan:Persentase)	95	95,15		95,20		95,25		95,25		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi pelayanan dokumen kependudukan (Dengan Satuan:Persentase)	0	5		7		10		12		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian Data Kependudukan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.378.970.383		12.337.101.677		14.145.784.474		40.861.856.534		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.378.970.383		12.337.101.677		14.145.784.474		40.861.856.534		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	5.483.196.243	100	5.554.176.950	100	5.641.861.772	100	21.853.686.439	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase ASN dengan capaian kinerja diatas 90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang dilakukan penataan wilayahnya (Dengan Satuan:%)	0	25	116.630.000	25	59.965.000	25	116.630.000	25	726.847.666	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pihak ketiga (Dengan Satuan:%)	100	100	2.091.690.064	100	2.091.690.064	100	2.091.690.064	100	31.907.241.818	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Per Undang-Undangan (Dengan Satuan:%)	90	95	4.744.615.316	100	2.688.430.903	100	4.352.763.878	100	12.789.294.684	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Bumdes yang Menghasilkan Laba (Dengan Satuan:%)	53	57		61		64		67		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Posyandu Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	90	1.942.838.760	90	1.942.838.760	90	1.942.838.760	90	6.834.978.274	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase TP-PKK yang berkualitas (Dengan Satuan:%)	78	80		80		80		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif (Dengan Satuan:%)	32	30		30		30		30		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang kompeten (Dengan Satuan:%)	25	25		25		25		25		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Bumdes Aktif (Dengan Satuan:%)	67	74		78		82		82		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Desa yang memiliki Inovasi TTG (Dengan Satuan:%)	10	12		15		18		20		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.738.764.823		5.877.325.052		7.822.496.435		19.438.586.310	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.738.764.823		5.877.325.052		7.822.496.435		19.438.586.310	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat. (Dengan Satuan:Persen)	0	100	4.088.066.392	100	4.193.612.653	100	5.463.912.796	100	17.283.229.989	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	0	0		100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemanfaatan data Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berkualitas yang tersedia (Dengan Satuan:Persen)	0	90	426.996.465	95	435.536.395	100	479.090.034	100	1.562.196.985	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Dengan Satuan:Persen)	72,66	73,5	573.047.915	74	584.508.873	74,5	937.959.760	74,5	2.503.370.218	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet need) (Dengan Satuan:Persen)	14,01	9,98		8,98		8		8		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase masyarakat yang tersentuh Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) (Dengan Satuan:Persen)	60,49	85		90		95		100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang aktif dalam kelompok kegiatan (Dengan Satuan:Persen)	0	77	650.654.051	79	663.667.131	80	941.533.845	80	3.230.059.078	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				28.759.695.163		29.952.381.321		10.949.244.180		69.661.320.664	
	DINAS PERHUBUNGAN				28.759.695.163		29.952.381.321		10.949.244.180		69.661.320.664	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	11.040.000.000	100	9.090.000.000	100	4.390.500.000	100	24.520.500.000	Dinas Perhubungan
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Perhubungan
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (Dengan Satuan:Persen)	100	58	15.219.695.163	64	16.462.381.321	67	5.808.744.180	67	37.490.820.664	Dinas Perhubungan
		Persentase sosialisasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Perhubungan
		Persentase razia (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Perhubungan
		Persentase pengamanan dan pengaturan lalu lintas (Dengan Satuan:Persen)	102	79		84		90		90		Dinas Perhubungan
		Persentase fasilitas perhubungan yang laik fungsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan/dermaga yang sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	2.500.000.000	100	4.400.000.000	100	750.000.000		7.650.000.000	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.267.473.936		6.421.658.018		49.815.982.497		62.505.114.451	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.267.473.936		6.421.658.018		49.815.982.497		62.505.114.451	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	4.568.289.736	100	4.681.484.736	100	13.836.342.497	100	27.823.719.451	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:%)	105	100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	90	1.261.748.800	90	1.261.748.800	95	2.460.000.000	100	6.242.546.300	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Terhadap Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Low Spot (Dengan Satuan:%)	37.3	50	437.435.400	60	478.424.482	70	33.519.640.000	70	36.744.253.054	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Layanan SPBE (Dengan Satuan:%)	83.33	90		93		98		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				213.829.700		213.829.700		281.418.931		709.078.331	
	DINAS PERINDUSTRIAN				213.829.700		213.829.700		281.418.931		709.078.331	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (1) (Dengan Satuan:%)	-	48,65	30.372.200	49,66	30.372.200	50,33	43.789.600	50,33	121.488.800	Dinas Perindustrian
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2) (Dengan Satuan:%)	0	100	17.767.000	100	17.767.000	100	18.746.306	100	71.068.000	Dinas Perindustrian
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3) (Dengan Satuan:%)	0	26,38	60.572.600	27,78	60.572.600	30,56	76.478.950	30,56	242.290.400	Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (Dengan Satuan:%)	16,91	17,55	105.117.900	18,05	105.117.900	18,55	142.404.075	18,55	420.471.600	Dinas Perindustrian
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				17.812.334.294		15.982.146.794		7.889.012.233		41.683.493.321	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				17.812.334.294		15.982.146.794		7.889.012.233		41.683.493.321	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	0	100	15.742.334.294	100	14.078.646.794	100	6.327.726.633	100	36.148.707.721	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Hasil Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	0	100	600.000.000	100	548.500.000	100	506.859.100	100	1.655.359.100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase MOU Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan perusahaan yg terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase deregulasi penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Fasilitasi Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan (Dengan Satuan:%)	0	100	270.000.000	100	245.000.000	100	182.418.400	100	697.418.400	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP (Dengan Satuan:%)	0	100	960.000.000	100	870.000.000	100	736.000.000	100	2.566.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pengaduan yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu (Dengan Satuan:%)	96	100	185.000.000	100	185.000.000	100	85.372.100	100	455.372.100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid (Dengan Satuan:%)	0	100	55.000.000	100	55.000.000	100	50.636.000	100	160.636.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				23.298.546.257		23.861.080.530		26.074.396.649		73.234.023.436	
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				23.298.546.257		23.861.080.530		26.074.396.649		73.234.023.436	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:persen)	100	100	5.610.532.806	100	5.891.059.448	100	6.185.612.417	100	23.030.569.248	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Rata-rata capaian kinerja sekretariat (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pemuda yang mendaftar sebagai calon Wirausaha Muda (Dengan Satuan:persen)	0	20	2.023.276.106	23,07	2.166.084.821	23,52	2.230.661.995	23,52	8.346.952.546	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar (Dengan Satuan:persen)	80,95	86,36	15.192.237.346	90,90	15.349.456.174	95,45	17.137.191.073	95,45	70.869.507.740	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Persentase induk organisasi olahraga tradisional dan rekreasi, dan cabang olahraga khusus yang memperoleh prestasi tingkat provinsi (Dengan Satuan:persen)	63	75		80		84,27		84,27		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Persentase Cabang Olahraga yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (Dengan Satuan:persen)	30	40		50		60		70		Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan (Dengan Satuan:persen)	0	100	472.499.999	100	454.480.087	100	520.931.164	100	1.897.911.250	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				73.117.900		73.117.900		450.000.000		596.235.800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				73.117.900		73.117.900		450.000.000		596.235.800	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100	90	73.117.900	95	73.117.900	100	450.000.000	100	685.865.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				45.267.900		45.267.900		450.000.000		540.535.800	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Informasi Yang Diamankan (Dengan Satuan:%)	7.6	30	45.267.900	40	45.267.900	50	450.000.000	50	617.823.996	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.145.202.696		12.277.434.274		13.845.838.474		31.268.475.444	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				5.145.202.696		12.277.434.274		13.845.838.474		31.268.475.444	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	4.003.202.696	100	4.977.434.274	100	10.370.838.474	100	24.023.030.018	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90 (Dengan Satuan:%)	86,95	100		100		100		100		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (Dengan Satuan:%)	41,7	43	355.000.000	45	1.295.000.000	48	1.710.000.000	48	4.335.393.936	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilindungi (Dengan Satuan:%)	28,75	40		43		45		48		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (Dengan Satuan:%)	24,13	48	290.000.000	50	520.000.000	52	620.000.000	52	1.800.790.460	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif. (Dengan Satuan:%)	88,57	43	60.000.000	45	105.000.000	48	195.000.000	48	360.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	78	172.000.000	80	230.000.000	85	280.000.000	85	874.791.436	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik. (Dengan Satuan:%)	0	78	265.000.000	80	5.150.000.000	85	670.000.000	85	6.085.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.898.736.391		4.968.168.001		5.321.513.512		15.188.417.904	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4.898.736.391		4.968.168.001		5.321.513.512		15.188.417.904	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:persen)	109	100	3.572.365.787	100	3.611.186.747	100	3.948.147.599	100	15.546.202.220	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90 % (Dengan Satuan:persen)	100	95		95		95		95		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Rata-rata Capaian kinerja sekretariat (Dengan Satuan:persen)	95	90		90		90		90		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Berstandar Nasional Perpustakaan (Dengan Satuan:persen)	3,52	5,88	1.326.370.604	7,05	1.356.981.254	8,23	1.373.365.913	8,23	4.638.366.727	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perpustakaan (Dengan Satuan:poin)	85,22	85,25		85,30		85,35		85,45		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.157.524.029		1.186.029.239		1.218.020.498		3.561.573.766	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis/statis SKPD (Dengan Satuan:persen)	50	25	1.124.453.696	20	1.144.497.966	16,67	1.158.028.288	16,67	3.676.526.724	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis/statis SKPD. (Dengan Satuan:persen)	50	25	33.070.333	20	41.531.273	16,67	59.992.210	16,67	219.203.210	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				90.229.047.823		111.537.574.629		114.001.951.619		315.768.574.071	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				13.482.599.335		6.903.018.419		7.528.721.099		27.914.338.853	
	DINAS PERIKANAN				13.482.599.335		6.903.018.419		7.528.721.099		27.914.338.853	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	91,96	100	8.943.007.985	100	4.346.009.189	100	4.734.527.733	100	23.653.597.186	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:%)	98,21	100	365.341.880	100	186.764.191	100	204.088.142	100	998.138.515	Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:%)	97,95	100	3.243.202.489	100	1.894.290.199	100	2.070.001.564	100	9.661.458.887	Dinas Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan (Dengan Satuan:%)	98,95	100	269.139.240	100	137.585.027	100	150.347.197	100	735.306.452	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terlaksananya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dengan Satuan:%)	84,77	100	661.907.741	100	338.369.813	100	369.756.463	100	1.808.376.335	Dinas Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.091.474.770		12.872.615.956		36.703.187.783		52.667.278.509	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				3.091.474.770		12.872.615.956		36.703.187.783		52.667.278.509	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	66,03	55	2.484.565.000	60	10.942.615.956	70	33.853.187.783	70	48.084.072.263	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (Dengan Satuan:%)	18,86	45	204.909.770	48	895.000.000	50	1.210.000.000	50	3.010.547.887	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Calender Of Event Pariwisata yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	50		55		60		65		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:%)	0	2,6	30.000.000	2,7	230.000.000	2,8	445.000.000	2,8	765.398.525	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kelompok Sadar Wisata yang aktif (Dengan Satuan:%)	39,13	45	372.000.000	50	805.000.000	55	1.195.000.000	55	2.871.125.327	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pertumbuhan Pelaku Usaha Pariwisata. (Dengan Satuan:%)	0	2,5		2,6		2,7		2,8		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				60.617.332.120		59.664.021.457		55.646.884.495		175.928.238.072	
	DINAS PERTANIAN				60.617.332.120		59.664.021.457		55.646.884.495		175.928.238.072	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (1) (Dengan Satuan:persen)	100	100	16.548.640.190	100	16.289.448.450	100	12.583.192.907	100	62.858.021.960	Dinas Pertanian
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:persen)	0	100		100		100		100		Dinas Pertanian
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:persen)	0	100		100		100		100		Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Karet (Dengan Satuan:Kg/Ha)	662	662,51	12.994.852.481	662,89	12.784.054.473	663,26	19.670.805.186	663,26	62.784.202.835	Dinas Pertanian
		Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit (Dengan Satuan:Kg Tbs /Ha)	1,068	1,102		1,118		1,135		1,135		Dinas Pertanian
		Produktivitas Cabe Rawit hiyung (Dengan Satuan:Ku/Ha)	90	68,17		68,85		69,54		69,54		Dinas Pertanian
		Produktivitas Jahe (Dengan Satuan:Ku/Ha)	133	94		96		98		98		Dinas Pertanian
		Produktivitas Jeruk (Ku/ha) (Dengan Satuan:Ku/Ha)	248,06	241		244		247		247		Dinas Pertanian
		Luas Tanaman Karet (Dengan Satuan:Ha)	12.850	13565		13690		13815		13815		Dinas Pertanian
		Luas Panen Jeruk (Dengan Satuan:Ha)	740	709		711		714		2134		Dinas Pertanian
		Luas Panen Padi (Dengan Satuan:Ton)	87.462	37.477		38.376		39.297		115.150		Dinas Pertanian
		Luas Panen Jagung (Dengan Satuan:Ton)	542	199		202		206		607		Dinas Pertanian
		Produktivitas Padi (Dengan Satuan:Ku/Ha)	50,55	51,85		51,9		52,00		51,35		Dinas Pertanian
		Produktivitas Jagung (Dengan Satuan:Ku/Ha)	51,37	51,85		51,9		52,00		52,00		Dinas Pertanian
		Persentase RMU yang menghasilkan Beras dengan mutu baik (Dengan Satuan:Persen)	1	1		1		1		3		Dinas Pertanian
		Jumlah Kemitraan Pemasaran yang dibentuk (MoU) (Dengan Satuan:Persen)	1	1		1		1		1		Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Luas Panen Cabe Rawit hiyung (Ha) (Dengan Satuan:Ha)	202	190		192		194		576	Dinas Pertanian	
		Luas Panen Jahe (Dengan Satuan:Ha)	70	61		64		67		192	Dinas Pertanian	
		Luas Tanaman Kelapa Sawit (Dengan Satuan:Ha)	11.688	12.491		12.541		12.591		12591	Dinas Pertanian	
		Persentase UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) kategori baik (Dengan Satuan:persen)	4,5	5,5		6		6,6		6,6	Dinas Pertanian	
		Populasi kambing (Dengan Satuan:ekor)	5496	5.903		6.091		6.260		23939	Dinas Pertanian	
		Populasi Sapi (Dengan Satuan:ekor)	8663	9.339		9.712		10.116		38041	Dinas Pertanian	
		Populasi Unggas (Dengan Satuan:ekor)	3061120	3.113.812		3.157.933		3.169.754		12533610	Dinas Pertanian	
		Angka konsumsi daging per kapita (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Th)	4	4,10		4,20		4,30		4,40	Dinas Pertanian	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan fungsional yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	0	119,22	24.288.554.558	122,09	23.894.554.017	125,02	18.075.609.534	125,02	82.112.491.785	Dinas Pertanian
		Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (Dengan Satuan:Persen)	7,17	6,02		5,88		5,74		5,74	Dinas Pertanian	
		Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Dengan Satuan:Persen)	1,5	1,28		1,25		1,22		1,22	Dinas Pertanian	
		Persentase Usulan Pupuk bersubsidi yang disetujui pusat (Dengan Satuan:Persen)	46,42	80		80		80		80	Dinas Pertanian	
		Persentase usulan Pembiayaan dan Investasi yang di setujui (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100	Dinas Pertanian	
		Persentase lahan sawah fungsional yang terairi (Dengan Satuan:persen)	32,37	33,15		33,93		34,71		35,49	Dinas Pertanian	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yg tertangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100	629.018.560	100	618.814.838	100	468.117.353	100	2.763.392.684	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Hewan Ternak Bebas Penyakit (%) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Intensitas Serangan OPT Tanaman Pangan (Dengan Satuan:Persen)	0	2,5	708.533.607	2,5	708.533.607	2,5	527.292.672	2,5	2.705.847.091	Dinas Pertanian
		Persentase Intensitas Serangan OPT Hortikultura (Dengan Satuan:Persen)	0	1,5		1,5		1,5		1,5		Dinas Pertanian
		Persentase Intensitas Serangan OPT Perkebunan (Dengan Satuan:Persen)	3	2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas Pertanian
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perijinan yang dipenuhi (Dengan Satuan:persen)	0	100	66.064.283	100	64.992.611	100	49.165.222	100	298.374.756	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis (Dengan Satuan:Persen)	59,68	63,75	5.381.668.441	70	5.303.623.461	100	4.272.701.621	100	16.278.245.903	Dinas Pertanian
		Persentase Kelas kelompok tani Lanjut (Dengan Satuan:Persen)	62,5	73,09		76,98		80,87		84,76		Dinas Pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6.930.412.928		25.860.535.664		7.756.120.646		40.547.069.238	
	DINAS PERDAGANGAN				6.930.412.928		25.860.535.664		7.756.120.646		40.547.069.238	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100	4.162.812.297	100	7.748.625.800	100	4.322.812.297	100	21.244.278.621	Dinas Perdagangan
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Perdagangan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Izin Usaha (Dengan Satuan:%)	65,27	80	38.000.000	90	67.152.400	100	48.000.000	100	198.004.400	Dinas Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (Dengan Satuan:IKM)	76,7	78	2.150.000.000	79	13.267.837.381	80	2.775.707.718	80	21.715.475.380	Dinas Perdagangan
		Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak (Dengan Satuan:%)	80,56	85		86		87		87		Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase penerimaan retribusi pasar (Dengan Satuan:%)	94,51	95		100		100		100		Dinas Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok (Dengan Satuan:%)	0,54	1	50.000.000	1	1.328.560.200	1	50.000.000	1	1.497.917.082	Dinas Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina (Dengan Satuan:%)	0	20	138.000.000	20	751.195.352	20	138.000.000	20	1.135.136.685	Dinas Perdagangan
		Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah (Dengan Satuan:%)	10	12		15		18		20		Dinas Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	55,71	70	139.068.400	70	2.444.632.300	75	169.068.400	75	2.946.003.800	Dinas Perdagangan
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif (Dengan Satuan:%)	0	15,56	252.532.231	17,31	252.532.231	18,03	252.532.231	18,03	1.005.052.043	Dinas Perdagangan
		Pertumbuhan Jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah (Dengan Satuan:%)	10	15		20		22,5		25		Dinas Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				6.107.228.670		6.237.383.133		6.367.037.596		18.711.649.399	
	DINAS PERINDUSTRIAN				6.107.228.670		6.237.383.133		6.367.037.596		18.711.649.399	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:%)	0	80	4.825.771.744	80	4.945.926.207	80	5.065.580.670	80	19.367.850.774	Dinas Perindustrian
		Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	0	80		80		80		80		Dinas Perindustrian
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (Dengan Satuan:%)	0,55	0,66	1.074.110.526	0,67	1.084.110.526	0,68	1.094.110.526	0,68	3.979.258.450	Dinas Perindustrian
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (Dengan Satuan:%)	0,5	0,65		0,67		0,68		0,69		Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka (Dengan Satuan:%)	5,13	4,01	63.995.400	4,05	63.995.400	4,07	63.995.400	4,07	253.345.542	Dinas Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka (Dengan Satuan:%)	4,42	2,55	143.351.000	2,65	143.351.000	2,69	143.351.000	2,69	568.422.986	Dinas Perindustrian
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			117.431.274.519		99.059.790.331		133.703.996.214		350.195.061.064		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			86.711.496.942		67.646.584.975		99.562.468.414		253.920.550.331		
	SEKRETARIAT DAERAH			86.711.496.942		67.646.584.975		99.562.468.414		253.920.550.331		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum (Dengan Satuan:Indeks)	93,75	93,85	66.044.351.160	93,90	53.193.014.236	94	75.605.621.610	94	251.840.117.056	Sekretariat Daerah
		Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana (Dengan Satuan:Indeks)	88,48	90,2		91,1		92		92		Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh (Dengan Satuan:Indeks)	88,94	90,2		91,1		92		92		Sekretariat Daerah
		Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi (Dengan Satuan:Persen)	35	67		71		77,7		35		Sekretariat Daerah
		Persentase SKPD yg melaksanakan penataan kelembagaan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	15,6	26,7		33,3		37,8		15,6		Sekretariat Daerah
		Persentase SKPD dengan nilai kinerja pelayanan minimal 80 (Dengan Satuan:Persen)	80	90		93		95		80		Sekretariat Daerah
		Persentase SKPD dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik (Dengan Satuan:Persen)	84	100		100		100		84		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase SKPD dengan nilai RB SKPD berkategori baik (Dengan Satuan:Persen)	0	22,2		26,7		33		0		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase hasil rekomendasi lembaga keagamaan dan sosial masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	19.617.546.182	100%	13.706.780.624	100%	22.610.869.526	100%	85.159.331.863	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kegiatan pembinaan mental (Dengan Satuan:Indeks)	84%	86%		87%		88%		88%		Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan pengadaan melalui sistem elektronik (Dengan Satuan:persen)	30	60	1.049.599.600	70	746.790.115	80	1.345.977.278	40	4.573.656.865	Sekretariat Daerah
		Persentase alternatif kebijakan pengendalian harga pangan pokok yang menjadi rekomendasi kebijakan (Dengan Satuan:Persen)	0	100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD				30.719.777.577		31.413.205.356		34.141.527.800		96.274.510.733	
	SEKRETARIAT DPRD				30.719.777.577		31.413.205.356		34.141.527.800		96.274.510.733	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	80	24.283.734.748	85	24.283.734.748	90	24.283.734.748	90	99.230.444.087	Sekretariat DPRD
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	80		80		80		80		Sekretariat DPRD
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	80		80		80		85		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	100	6.436.042.829	100	7.129.470.608	100	9.857.793.052	100	35.147.502.849	Sekretariat DPRD
		Persentase Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	75	100		100		100		100		Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Kegiatan DPRD yang terpublikasi & terdokumentasi (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	90		90		90		90		Sekretariat DPRD
		Persentase Fasilitas Aspirasi masyarakat yang teakomodir (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	80		90		90		90		Sekretariat DPRD
		Persentase fasilitasi kegiatan reses yang sesuai masa sidang (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
		Persentase pokok pikiran yang dinyatakan selaras dengan RPJMD (Dengan Satuan:PERSENTASE (%))	0	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				174.184.706.161		170.114.124.550		187.821.772.127		532.120.602.838	
5.01	PERENCANAAN				18.826.006.076		11.168.206.964		12.204.341.367		42.198.554.407	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				18.826.006.076		11.168.206.964		12.204.341.367		42.198.554.407	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.231.982.573	100	8.015.063.964	100	8.760.750.867	100	39.662.418.898	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	0	100	3.973.929.515	100	1.975.000.000	100	2.156.228.500	100	10.687.597.832	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		90		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.620.093.988	100	1.178.143.000	100	1.287.362.000	100	6.113.938.788	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra ekonomi dan Infrastrukturnya yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.02	KEUANGAN				134.803.499.048		149.828.173.551		166.527.652.642		451.159.325.241	
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				126.539.617.918		122.601.973.618		123.709.896.318		372.851.487.854	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (BKAD) (Dengan Satuan:%)	100	100	10.349.398.009	100	10.408.018.009	100	10.486.898.009	100	42.124.873.220	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	125.6	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	90	95		95		95		95		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase KUA PPAS, Perda, dan Perbup APBD yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	91.66	100	114.673.366.179	100	110.677.101.879	100	111.706.144.579	100	561.982.591.640	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Pencairan Dana SKPD (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase kejadian komplain yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan barang milik daerah Pemkab Tapin (Dengan Satuan:%)	97,43	100	1.516.853.730	100	1.516.853.730	100	1.516.853.730	100	5.799.411.440	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH				8.263.881.130		27.226.199.933		42.817.756.324		78.307.837.387		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (bapenda) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6.810.293.715	100	22.054.249.563	100	34.442.317.912	100	63.306.861.190	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)	90	95		95		95		95		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	90	95		95		95		95		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP). (Dengan Satuan:Persen)	3,23	0,50	1.453.587.415	0,50	5.171.950.370	0,50	8.375.438.412	0,50	15.000.976.197	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Penerimaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Persen)	-5,47	1,50		1,50		1,50		1,50		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dengan Satuan:Persen)	113,97	100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai)	88,76	80		80		80		80		Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN				16.590.640.506		8.080.060.704		7.892.454.787		32.563.155.997	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				16.590.640.506		8.080.060.704		7.892.454.787		32.563.155.997	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point)	85,2	87	5.198.988.424	89	4.612.155.079	90	5.198.988.424	90	20.209.120.351	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja diatas 90% (Dengan Satuan:Persen)	92	100		100		100		100		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan Struktural (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.391.652.082	100	3.467.905.625	100	2.693.466.363	100	20.246.490.433	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi (Dengan Satuan:point)	83	87		88		90		90		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur (Dengan Satuan:point)	83	87		88		90		90		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point)	83	85		87		88		90		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				492.683.331		392.683.331		492.683.331		1.378.049.993	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah Diklat Jabatan (Dengan Satuan:Persen)	73,29	80	492.683.331	85	392.683.331	90	492.683.331	90	1.870.733.324	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.471.877.200		645.000.000		704.640.000		4.821.517.200	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.471.877.200		645.000.000		704.640.000		4.821.517.200	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang direplikasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.471.877.200	100	645.000.000	100	704.640.000	100	5.859.574.896	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				22.604.882.878		21.414.554.194		17.354.163.446		61.373.600.518	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				22.604.882.878		21.414.554.194		17.354.163.446		61.373.600.518	
	INSPEKTORAT				22.604.882.878		21.414.554.194		17.354.163.446		61.373.600.518	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capain kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	14.558.111.652	100	14.189.354.870	100	12.118.511.763	100	52.667.323.124	Inspektorat
		Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:Nilai)	80,3	82		82		83		84		Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	6.339.790.111	100	5.629.889.871	100	4.079.630.340	100	20.129.440.662	Inspektorat
		Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP (Dengan Satuan:Nilai)	3,7	3,8		3,6		3,7		3,8		Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Dengan Satuan:Level)	3,65	3	1.706.981.115	3	1.595.309.453	3	1.156.021.343	3	5.614.333.254	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN				60.476.935.845		66.296.837.678		72.130.639.726		198.904.413.249	
	KECAMATAN PIANI				3.683.464.807		4.088.645.935		4.497.510.529		12.269.621.271	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat . (Dengan Satuan:%)	100	100	3.189.485.412	100	3.547.379.140	100	3.903.238.472	100	13.477.900.122	Kecamatan Piani
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Piani
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Piani
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Piani) (Dengan Satuan:%)	100	100	43.433.280	100	43.433.280	100	43.433.280	100	173.733.120	Kecamatan Piani
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Piani) (Dengan Satuan:%)	100	100	255.657.158	100	281.944.558	100	321.949.820	100	1.103.137.944	Kecamatan Piani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Piani) (Dengan Satuan:%)	100	100	24.173.797	100	27.173.797	100	29.173.797	100	101.695.188	Kecamatan Piani
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Piani) (Dengan Satuan:%)	100	100	85.516.800	100	92.516.800	100	97.516.800	100	353.067.200	Kecamatan Piani
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Piani) (Dengan Satuan:%)	100	100	85.198.360	100	96.198.360	100	102.198.360	100	348.895.560	Kecamatan Piani
KECAMATAN TAPIN SELATAN				5.444.399.616		6.043.283.574		6.647.611.932		18.135.295.122		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	4.216.465.646	100	4.652.593.453	100	5.173.627.448	100	17.786.223.627	Kecamatan Tapin Selatan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Tapin Selatan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Tapin Selatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Tapin Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	18.116.640	100	18.116.640	100	18.116.640	100	72.466.560	Kecamatan Tapin Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Tapin Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.119.166.840	100	1.221.710.803	100	1.305.005.166	100	4.674.649.685	Kecamatan Tapin Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	7.999.776	100	7.999.776	100	7.999.776	100	26.999.104	Kecamatan Tapin Selatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.620.900	100	50.833.088	100	50.833.088	100	182.907.976	Kecamatan Tapin Selatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Tapin Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	42.029.814	100	92.029.814	100	92.029.814	100	253.119.256	Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
KECAMATAN BINUANG				8.169.437.008		9.068.075.078		9.974.882.586		27.212.394.672		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat. (Dengan Satuan:%)	100	100	5.335.048.073	100	5.990.021.167	100	6.651.688.823	100	22.640.864.975	Kecamatan Binuang
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Binuang
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Binuang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Binuang). (Dengan Satuan:%)	100	100	36.300.000	100	36.400.000	100	36.500.000	100	145.466.000	Kecamatan Binuang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Binuang). (Dengan Satuan:%)	100	100	2.691.118.445	100	2.931.446.911	100	3.175.248.763	100	11.331.620.208	Kecamatan Binuang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Binuang). (Dengan Satuan:%)	100	100	8.835.000	100	8.835.000	100	8.835.000	100	30.922.500	Kecamatan Binuang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Binuang) (Dengan Satuan:%)	100	100	65.065.490	100	67.400.000	100	68.000.000	100	223.530.980	Kecamatan Binuang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Binuang). (Dengan Satuan:%)	100	100	33.070.000	100	33.972.000	100	34.610.000	100	141.742.194	Kecamatan Binuang
KECAMATAN BUNGUR				4.054.831.434		4.222.453.350		4.588.268.455		12.865.553.239		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat.. (Dengan Satuan:%)	100	100	3.584.978.419	100	3.910.772.956	100	4.232.128.385	100	14.826.297.597	Kecamatan Bungur
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Bungur
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Bungur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik. (Dengan Satuan:%)	100	100	45.262.800	100	49.789.080	100	54.767.988	100	190.967.868	Kecamatan Bungur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B. (Dengan Satuan:%)	100	100	137.422.590	100	154.349.777	100	174.082.079	100	585.687.646	Kecamatan Bungur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan. (Dengan Satuan:%)	100	100	11.463.950	100	15.702.620	100	19.516.948	100	49.881.618	Kecamatan Bungur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan. (Dengan Satuan:%)	100	100	28.818.815	100	33.047.717	100	38.103.590	100	125.227.072	Kecamatan Bungur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan. (Dengan Satuan:%)	100	100	246.884.860	100	58.791.200	100	69.669.465	100	411.228.217	Kecamatan Bungur
	KECAMATAN TAPIN UTARA				10.144.812.654		11.260.742.047		12.386.816.251		33.792.370.952	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat. (Dengan Satuan:%)	100	100	6.666.198.158	100	7.481.484.955	100	8.304.183.451	100	28.372.140.489	Kecamatan Tapin Utara
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Tapin Utara
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Tapin Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Tapin Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	159.735.600	Kecamatan Tapin Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Tapin Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	3.336.614.496	100	3.637.257.092	100	3.940.632.800	100	13.946.500.004	Kecamatan Tapin Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	32.959.500	Kecamatan Tapin Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	75.787.900	Kecamatan Tapin Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Tapin Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	263.115.900	Kecamatan Tapin Utara
	KECAMATAN BAKARANGAN				3.865.767.678		4.278.588.734		4.445.502.619		12.589.859.031	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat. (Dengan Satuan:%)	100	100	3.640.870.286	100	4.041.366.017	100	4.197.605.805	100	15.092.364.104	Kecamatan Bakarangan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Bakarangan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Bakarangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Bakarangan) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.928.152	100	43.920.967	100	48.313.064	100	168.460.503	Kecamatan Bakarangan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Bakarangan) (Dengan Satuan:%)	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	307.500.000	Kecamatan Bakarangan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Bakarangan) (Dengan Satuan:%)	100	100	14.208.750	100	14.208.750	100	14.208.750	100	47.043.750	Kecamatan Bakarangan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Bakarangan) (Dengan Satuan:%)	100	100	65.065.490	100	67.400.000	100	68.000.000	100	223.530.980	Kecamatan Bakarangan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Bakarangan) (Dengan Satuan:%)	100	100	30.695.000	100	31.693.000	100	32.375.000	100	157.965.490	Kecamatan Bakarangan
	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN				4.241.984.997		4.685.574.804		5.131.872.809		14.059.432.610	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat, (Dengan Satuan:%)	100	100	3.689.579.981	100	4.069.019.788	100	4.449.197.793	100	15.368.174.961	Kecamatan Candi Laras Selatan
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%, (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Candi Laras Selatan
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran, (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Candi Laras Selatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Candi Laras Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	186.233.280	Kecamatan Candi Laras Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Candi Laras Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	162.465.086	100	176.465.086	100	192.465.086	100	675.959.920	Kecamatan Candi Laras Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	14.008.358	100	17.008.358	100	19.008.358	100	60.824.682	Kecamatan Candi Laras Selatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.742.724	100	50.742.724	100	61.742.724	100	180.970.896	Kecamatan Candi Laras Selatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Candi Laras Selatan) (Dengan Satuan:%)	100	100	296.188.848	100	322.338.848	100	349.458.848	100	1.228.879.528	Kecamatan Candi Laras Selatan
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA					3.578.110.325		3.971.702.461		4.368.872.707		11.918.685.493	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	3.076.639.505	100	3.413.588.007	100	3.757.966.846	100	12.970.598.679	Kecamatan Candi Laras Utara
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Candi Laras Utara
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Candi Laras Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	79.200.000	100	118.800.000	100	158.400.000	100	435.600.000	Kecamatan Candi Laras Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Candi Laras Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	222.144.490	100	213.577.574	100	216.767.250	100	831.120.354	Kecamatan Candi Laras Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	101.126.550	Kecamatan Candi Laras Utara
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	181.225.431	Kecamatan Candi Laras Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Candi Laras Utara) (Dengan Satuan:%)	100	100	134.294.530	100	149.294.530	100	154.294.530	100	581.655.781	Kecamatan Candi Laras Utara
KECAMATAN HATUNGUN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		11.756.838.306		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat . (Dengan Satuan:%)	100	100	3.253.522.157	100	3.607.769.595	100	3.965.546.554	100	13.732.644.311	Kecamatan Hatungun
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Hatungun
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Hatungun
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	171.233.280	Kecamatan Hatungun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	565.080.423	Kecamatan Hatungun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	37.000.666	Kecamatan Hatungun

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	168.500.630	Kecamatan Hatungun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	233.738.065	Kecamatan Hatungun
	KECAMATAN SALAM BABARIS				4.968.004.416		4.995.775.265		5.039.105.765		15.002.885.446	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	0	100	4.747.035.176	100	4.766.473.515	100	4.803.522.015	100	18.994.674.499	Kecamatan Salam Babaris
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Kecamatan Salam Babaris
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	0	0		100		100		100		Kecamatan Salam Babaris
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Salam Babaris) (Dengan Satuan:%)	100	100	36.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	144.000.000	Kecamatan Salam Babaris
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Salam Babaris) (Dengan Satuan:%)	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	307.500.000	Kecamatan Salam Babaris
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Salam Babaris) (Dengan Satuan:%)	100	100	14.208.750	100	14.208.750	100	14.208.750	100	47.043.750	Kecamatan Salam Babaris
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Salam Babaris) (Dengan Satuan:%)	100	100	65.065.490	100	67.400.000	100	68.000.000	100	223.530.980	Kecamatan Salam Babaris
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Salam Babaris) (Dengan Satuan:%)	100	100	30.695.000	100	31.693.000	100	32.375.000	100	155.709.934	Kecamatan Salam Babaris
	KECAMATAN TAPIN TENGAH				3.513.529.104		3.900.017.305		4.290.019.036		11.703.565.445	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	3.045.240.604	100	3.393.001.205	100	3.767.001.205	100	12.898.305.071	Kecamatan Tapin Tengah
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Tapin Tengah
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Tapin Tengah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	41.327.880	100	41.327.880	100	42.327.880	100	166.311.520	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	321.722.320	100	328.839.370	100	332.839.370	100	1.296.055.630	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	24.847.400	100	28.847.400	100	31.847.400	100	105.321.850	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	40.984.400	100	47.594.950	100	49.596.681	100	179.160.431	Kecamatan Tapin Tengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	39.406.500	100	60.406.500	100	66.406.500	100	195.490.500	Kecamatan Tapin Tengah
	KECAMATAN LOKPAIKAT				5.283.071.649		5.864.209.530		6.450.630.483		17.597.911.662	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat. (Dengan Satuan:%)	100	100	4.236.375.027	100	4.573.824.686	100	4.990.951.239	100	17.485.366.662	Kecamatan Lokpaikat
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Lokpaikat
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Lokpaikat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Lokpaikat) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.600.000	100	39.600.000	100	39.600.000	100	162.000.000	Kecamatan Lokpaikat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Lokpaikat) (Dengan Satuan:%)	100	100	902.776.546	100	1.122.464.768	100	1.278.759.168	100	4.212.542.194	Kecamatan Lokpaikat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Lokpaikat) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.399.632	100	10.399.632	100	14.399.632	100	33.198.896	Kecamatan Lokpaikat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Lokpaikat) (Dengan Satuan:%)	100	100	28.797.530	100	42.797.530	100	44.797.530	100	143.190.120	Kecamatan Lokpaikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Lokpaikat) (Dengan Satuan:%)	100	100	67.122.914	100	75.122.914	100	82.122.914	100	278.642.048	Kecamatan Lokpaikat
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				9.902.722.314		13.704.125.635		11.082.558.828		34.689.406.777	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.902.722.314		13.704.125.635		11.082.558.828		34.689.406.777	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:persen)	0	94	4.992.899.614	96	5.081.996.965	98	5.422.736.128	0	20.593.642.200	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:persen)	0	100		100		100		0		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:Skor)	0	95		96		97		0		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peserta kegiatan yang paham wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pancasila (Dengan Satuan:Persen)	0	80	2.659.168.198	85	2.684.168.200	85	2.784.168.202	90	12.925.300.850	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peserta yang paham terhadap politik (Dengan Satuan:Persen)	0	83	1.315.583.800	85	4.902.889.770	90	1.440.583.800	90	9.401.705.060	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yg aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan (Dengan Satuan:Persen)	0	63,7	237.049.300	64	262.049.300	65	362.049.300	65	929.569.900	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase saran dan masukan kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	0	80	207.729.200	85	232.729.200	85	332.729.200	90	1.104.547.100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Deteksi dini atas potensi kerawanan konflik yg diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	0	83	490.292.202	85	540.292.200	85	740.292.198	85	3.071.877.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL:					1.462.025.742.300		1.592.837.203.530		1.740.771.782.013		4.799.219.982.294	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator Kinerja makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Tapin tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	71,02	71,74	72,13	72,51
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	5,46	5,73	6,00
3	Tingkat Kemiskinan	%	3,60	3,43	3,34	3,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,15	3,95	3,85	3,75
5	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	65,61	67,81	68,90	70,00
6	Gini Ratio	poin	0,291	0,283	0,279	0,275
7	Tingkat penurunan emisi GRK	%	8,38	10	11	12
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	65,25	65,04	65,06	65,09

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut.



Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Tahun Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	71,02	71,74	72,13	72,51
2	Indeks Pendidikan	poin	0,591	0,607	0,611	0,615
3	Indeks Kesehatan	poin	0,705	0,712	0,715	0,717
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	5,46	5,73	6
5	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0,36	2	3	4
6	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,55	7,78	7,89	8
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2,69	3,35	3,67	4
8	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	5,74	5,76	5,78	5,78
9	Tingkat Kemiskinan	%	3,6	3,43	3,34	3,25
10	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	65,61	67,81	68,9	70
11	Indeks Gini	poin	0,291	0,283	0,279	0,275
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,15	3,95	3,85	3,75
13	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	55	57	59	61
14	Nilai SAKIP	poin	68,93	70,72	71,61	72,5
15	Nilai LPPD	poin	3,529	3,575	3,6	3,65
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	NA	80	81	82
17	Survey Penilaian Integritas	poin	73,92	79	80	81
18	Survey Kepuasan Masyarakat	poin	71	75,5	77,75	80
19	Indeks SPBE	poin	2,29	3,1	3,3	3,5
20	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	NA	85,2	86,45	87,5
21	Indeks Infrastruktur	poin	NA	80	85	90
22	Tingkat penurunan emisi GRK	%	8,38	10	11	12
23	Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	0,17	0,18	0,03	0,05

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.



Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VIII.3.
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	70,31	71,74	72,13	72,51	71,02
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,43	5,46	5,73	6,00	4,91
3	Tingkat Kemiskinan	poin	3,60	3,43	3,34	3,25	3,60
4	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	53,94	57,00	59,00	61,00	55,00
5	Indeks Pendidikan	poin	0,599	0,607	0,611	0,615	0,591
6	Indeks Kesehatan	poin	0,708	0,712	0,715	0,717	0,705
7	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	-1,57	2	3	4	-0,36
8	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	persen	1,27	7,55	7,78	7,89	7,55
9	LPE Kategori Industri Pengolahan	persen	4,37	3,35	3,67	4	2,69
10	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	persen	5,72	5,75	5,76	5,78	5,74
11	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	47,17	67,81	68,90	70	65,61
12	Indeks Gini	poin	0,289	0,283	0,279	0,275	0,291
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	poin	4,96	3,95	3,85	3,75	4,15
14	Nilai SAKIP	poin	69,69	70,72	71,61	72,50	68,93
15	Survei Kepuasan Masyarakat	poin	87,44	75,5	77,75	80	71,00
16	Nilai LPPD	point	0	3,575	3,6	3,650	3,529
17	Indeks SPBE.	poin	1,89	3,1	3,3	3,5	2,29

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	0	85,20	86,45	87,50	0
2	Indeks Infrastruktur	poin	-	80	85	90	-
3	Tingkat Penurunan Emisi GRK.	persen	0	10	11	12	8,38
4	Survei Penilaian Integritas	poin	70,17	79	80	81	73,92
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	54,02	80	81	82	-
6	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen	2,43	0,18	0,03	0,05	0,17
III	ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
Dinas Pendidikan							
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,95	12,50	12,75	13	12,04
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,77	8,50	8,75	9	7,95
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,40	76,60	76,70	76,80	0
4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persentase	75,41	100	100	100	69,33
5	Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,60	100	100	100	98,73
6	Persentase anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase	25,06	100	100	100	37,16
7	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Angka	24,60	24,70	24,70	24,70	0
8	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Angka	24	24	24,10	24,15	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Angka	12,30	12,35	12,35	12,40	0

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Angka	15,50	15,55	15,55	15,55	0
11	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretaria	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persentase	95,87	100,20	100,25	100,30	100,30
15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	89,62	91,62	92,62	93,62	93,62
16	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persentase	90,15	92,40	92,50	92,60	92,60
17	Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B	Persentase	62,92	63,75	64,25	64,75	64,75
18	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	52,88	57,97	60,50	63,05	63,05
19	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	40,67	43,58	45,04	46,95	46,95
20	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase	105,67	81	82	83	83
21	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persentase	74	76	77	78	78
22	Persentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	Persentase	53,85	55	55	56	56
23	Persentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	Persentase	35,71	44	45	46	46
24	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	64,42	64,48	64,50	64,52	64,52
25	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	72,86	74,86	75,86	76,86	76,86
26	Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	%	92,00	93,00	95,00	100	100
27	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,98	68,02	71,07	74,12	74,12
28	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	53,04	57,01	58,95	60,98	60,98
29	Indeks Iklim Keamanan SD	%	80,07	87,15	90,69	94,23	94,23

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	Indeks Iklim Kebinekaan SD	%	85,59	90,57	93,06	95,55	95,55
31	Indeks Inklusivitas SD	%	73,29	79,49	82,59	85,69	85,69
32	Indeks Iklim Keamanan SMP	%	78,94	85,62	88,96	92,30	92,30
33	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	%	80,15	84,57	86,78	88,99	88,99
34	Indeks Inklusivitas SMP	%	76,49	82,69	85,79	88,89	88,89
35	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persentase	65,68	67,98	68,00	68,35	68,35
36	Persentase pendidik (guru) yang bersertifikasi	%	40,97	41,15	41,50	41,90	41,90
37	Persentase pendidik (guru) yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,77	86,15	86,75	87,00	87,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
Dinas Kesehatan							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan Puskesmas	Skor	76,1	78,5	79	81	-
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,57	71,25	71,50	71,70	70,88
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dinkes	skor	83,6	80	80	80	0
4	Angka Kesakitan	Persen	9,39	9,10	9,00	8,1	9,28
5	Angka Kematian Bayi	Per 1000	10/1000 KH	12/1000 KH	11/1000 KH	10/1000 KH	13/1000 KH
6	Angka Kematian Ibu	Per 100.000	384/100.000 KH	289/100.000 KH	243/100.000 KH	196/100.000 KH	273/100.000 KH
7	Rata-rata waktu tunggu pelayanan	Menit	-	≤ 59	≤ 58	≤ 57	-
8	Persentase penerapan PHBS	persen	67,40 %	69 %	70,5%	71,6 %	-
9	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	skor	83,6	28,55	28,55	28,55	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	0	20,63	20,63	20,63	0

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	0	13,21	13,21	13,21	0
12	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Skor	0	7,75	7,75	8,25	0
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	persen	0	100%	100%	100%	100%
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran dinas Kesehatan	persen	0	100%	100%	100%	100%
15	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat dinas kesehatan	persen	0	100%	100%	100%	100%
16	Persentase pelayanan tidak menular dan menular (hepatitis, cacingan, malaria, kusta, ispa, dan DBD)	persen	0	100%	100%	100%	100%
17	Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	persen	100 %	100%	100%	100%	100%
18	Persentase puskesmas yang terakreditasi utama	persen	7%	23%	30%	53%	53%
19	Persentase cakupan kepesertaan BPJS	persen	87,05 %	90%	93 %	95,01%	95,01%
20	Persentase laporan monitoring dan evaluasi profil yang tepat waktu	persen	100 %	100%	100%	100%	100%
21	Persentasi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	23.18%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar	persen	79%	100%	100%	100%	100%
23	Persentasi Desa yang UCI (Universal Child Immunization)	persen	78,9%	82,5%	85%	90%	90%
24	Persentasi Desa yang Kejadian Luar biasa (KLB) dilakukan Penyeledikan Epidemiologi < 24 Jam	persen	100 %	100%	100%	100%	100%
25	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar	persen	100%	100%	100%	100%	100%
26	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus (Dm)	persen	78.59%	100%	100%	100%	100%
27	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	persen	143.89%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar	persen	82.34%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase Orang Terduga Tbc Yang Mendapatkan Pelayanan Tbc Sesuai Standar	persen	29,36%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen	16.48%	100%	100%	100%	100%

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Persentase balita yang berstatus gizi baik	persen	80%	82 %	83%	84%	84%
32	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar	persen	95.46%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar	persen	99.57%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	64.47%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	92.01%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar	persen	100 %	100%	100%	100%	100%
37	Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dinas kesehatan	persen	100 %	100%	100%	100%	100%
38	Persentase rumah tangga penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	47,78%	69 %	70,5%	71,6%	71,6%
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Skor	82	81,5	82	82,5	
2	Length Of Stay (LOS)	hari	3,93	7	6	6	3,50
3	Rasio Daya Tampung Tempat Tidur Di Fasilitas Kesehatan	Tempat Tidur(TT)	1,01	1,04	1,05	1,06	1,02
4	Rata-Rata Waktu Tunggu Pelayanan	Menit	0	≤ 59	≤ 58	≤ 57	0
5	Persentase Karyawan yang mendapatkan pelatihan/diklat (BLUD)	Persen	-	100	100	100	100
6	Persentase Kualitas Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Persen	-	100	100	100	100
7	Persentase Survei Kepuasan Kualitas Layanan Jaringan Informasi Rumah Sakit	Persen	-	80	85	90	90
8	Persentase Komplain pasien yang diselesaikan	Persen	-	100	100	100	100
9	Persentase hasil laporan indikator mutu dan keselamatan pasien	Persen	-	75	80	85	85
10	Persentase Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan dengan coverage Anggaran 100%	Persen	-	80	80	80	80
11	Persentase peningkatan pendapatan	Persen	0	5	5	5	5

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Persentase sarana prasarana yang sesuai standar pada penunjang medik dan non medik	Persen	0	70	75	80	80
13	Persentase Karyawan yang mendapatkan pelatihan/diklat	Persen	-	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	0,57	0,62	0,65	0,67	0,58
2	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	%	0	98	98	98	98
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Ha	0,14	0,32	0,34	0,36	0,32
4	Prosentase Infrastruktur Dasar Pelayanan Air Bersih	%	68,12	74	76	78	70,14
5	Prosentase Infrastruktur Dasar Pelayanan Air Limbah	%	86,68	92	94	96	88,08
6	Persentase Sarpras Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	%	0	100	100	100	100
7	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	%	28,35	65	70	75	55
8	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi	%	0	22	24	26	15
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	96
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	100	100	100	0
11	Nilai SAKIP perangkat Daerah	Score	89	100	100	100	100
12	Persentase kemandapan jalan kabupaten	%	69,1	73	74	75	71,6
13	Persentase perijinan yang telah di validasi	%	97	100	100	100	97
14	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	6,82	20	21	22	15,58
15	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang Mendapatkan Pelayanan Air Bersih	%	26,37	50	75	100	40,18
16	Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	%	9,24	50	75	100	12,84

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Meningkatnya Sarpras Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	%	0	100	100	100	100
18	Meningkatnya sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	%	28,35	65	70	75	55
19	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
20	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	68	78.5	78.6	78.7	0
21	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10,75	11	11,25	11,50	0
22	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	23.25	23.50	23.75	24	0
23	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.50	19	19.25	20	0
24	Jumlah Realisasi Bangunan Lingkungan yang terbangun / jumlah Target bangunan gedung yang terbangun	%	15	22	24	26	0
25	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	100	100	100	100	100
26	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	%	89	100	100	100	100
27	Meningkatnya infrastruktur irigasi	%	18,62	10	12	14	14
28	Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	%	12,65	11,90	12	13	13
29	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih Melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	40,18	65	70	80	80
30	Persentase Sarpras Sistem Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	%	100	100	100	100	100
31	Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki Sarana Pengolahan Air Limbah	%	12,84	20	25	30	30
32	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	0	0,1	0.1	0.2	0.4
33	Persentase Kawasan Permukiman dengan Sistem Jaringan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	%	0	0.1	0.1	0.2	0.4
34	Persentase sarana prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	%	55	65	70	75	75
35	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang berfungsi	%	15	22	24	26	26
36	Presentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	70.1	72	73	74	74

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Rasio tenaga operator /teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	96	100	100	100	100
38	Rasio proyek yang menjadikewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	95	100	100	100	100
39	Persentasi jumlah dokumen yang ditetapkan	%	90	100	100	100	100
40	Persentasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	%	45	78	80	85	85
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan							
1	Persentase luasan kawasan kumuh	Persentase (%)	2,32	2,19	2,08	2,01	2,32
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	0	79,00	81,00	85,00	0
3	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,258	0,261	0,263	0,263	0,259
4	Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	Persentase (%)	0,05	10,3	13,19	16,82	0,05
5	Persentase penanganan konflik konflik pertanahan	Persentase (%)	100	100	100	100	100
6	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Skor	0	25,5	26,5	27,5	0
7	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	0	20	20,5	21,5	0
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	0	14	15	16	0
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Skor	0	10	10,5	11,5	0
10	Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)	Skor	0	13	14	15	0
11	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	Persentase (%)	100	100	100	100	100
12	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persentase (%)	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persentase (%)	100	100	100	100	100
14	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%)	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%)	100	100	100	100	100
16	Persentase penanganan kawasan kumuh	Persentase (%)	0,15	5,54	2,89	3,63	12,17
17	Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Persentase (%)	2,59	3,9	3,9	2,59	14,49
18	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	Persentase (%)	2,17	21,28	31,91	10,64	63,83
19	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi	Persentase (%)	0	0	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan							
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran							
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11 menit 14 detik	13 menit	12 menit	11 menit	13 menit 25 detik
2	Persentase penegakan perda dan perkada	Persen	26,47	51,51	54,54	57,57	45,45
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	-	78,00	78,50	79	-
4	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
6	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	-	23,40	23,55	23,60	-
7	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	-	23,20	23,40	23,60	-
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	-	11,72	11,77	11,85	-
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	-	19,70	19,78	19,85	-
10	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat.	Persen	100	100	100	100	100
11	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persen	100	100	100	100	100
12	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase Penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban ,Ketentraman, keindahan)	Persen	22,72	30	32	33	33

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	71,63	30	32	33	33
15	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki Satlinmas	Persen	70	80	85	87	87
16	Persentase kejadian kebakaran yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100
17	Persentase layanan penyelamatan pada kondisi yang membahayakan	Persen	100	100	100	100	100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1	Indeks Risiko Bencana	Point	0,37	0,32	0,31	0,30	0,34
2	Nilai SAKIP Daerah	score	-	76,76	77,28	77,33	-
3	Indeks kapasitas Daerah	Point	0,43	0,47	0,48	0,49	0,45
4	Nilai Komponen AKIP (perencanaan Kinerja)	score	-	24,75	24,85	24,95	-
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	score	-	23,25	23,50	23,55	-
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	score	-	10,75	10,85	10,85	-
7	Nilai Komponen AKIP (evaluasi Internal)	score	-	18,01	18,08	18,08	-
8	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100
9	Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100
10	Persentase peralatan perlindungan kesiapsiagaan bencana	persen	100	100	100	100	100
11	Persentase Masyarakat yang mendapatkan wawasan dan informasi pencegahan bencana	persen	100	100	100	100	100
12	Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 Jam setelah kejadian	persen	100	100	100	100	100
13	Persentase korban bencana yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
14	Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi daerah pasca bencana	persen	100	100	100	100	100
15	Persentase terlaksananya Koordinasi rekonstruksi daerah pasca bencana	persen	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
Dinas Sosial							
1	Tingkat penurunan jumlah PPKS	Persentase	-	0,03	0,02	0,01	-
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	-	81	82	83	-
3	Persentase PPKS yang tertangani	Persentase	53,6	75	80	85	63,12
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	95,81	100	100	100	63,59
5	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase	100	100	100	100	100
6	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	-	25,11	25,25	25,5	-
7	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	-	25	25,25	25,50	-
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	-	11	11,5	12	-
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	-	19,89	20	20	-
10	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat Dinsos	%	100	100	100	100	100
11	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	78,48	100	100	100	100
12	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
13	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100
14	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial	%	96,12	100	100	100	100
15	Persentase Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial	%	93,76	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	0	14	16	18	18
19	Persentase Anak Terlantar yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100
20	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100		100
21	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	%	1,01	2,2	2,4	2,6	2,6
22	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	%	80	100	100	100	100
23	Persentase Korban Bencana Alam dan/atau Sosial yg mendapatkan Perlindungan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100
24	Persentase Taman Makam Pahlawan yang fasilitas sarana dan prasarana terpelihara dengan baik	%	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
Dinas Tenaga Kerja							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen (%)	70,31	70,79	70,95	71,11	0
2	Rata - rata pendapatan masyarakat	Rp/ Org	4,7	4,74	4,75	4,76	0
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,25	82	84	86	0
4	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan UMR	Persen (%)	75	80	85	90	77
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen (%)	64	67	68	70	64,5
6	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Angka	24,60	26,14	26,64	27,14	0
7	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Angka	21,60	22,36	22,86	23,36	0
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Angka	10,80	14	14,5	15	0
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Angka	19,25	19,50	20	20,5	0
10	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persen	0	95	100	100	0

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	Persen	0	90	95	100	100
12	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persen	0	95	100	100	100
13	Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang berkualitas dan berkompetensi	Persen	90 %	93%	94 %	95 %	95 %
14	Persentase Tenaga Kerja yang Di tempatkan	Persen	70,31	70,79%	70,95%	71,11%	71,11%
15	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persen	28%	25%	23%	20%	20%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
1	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Poin	84,15	85,4	85,5	85,6	-
2	INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK	Indeks	-	70,00	73,00	75,00	-
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	80,48	83,50	83,70	0
4	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Point	73,19	73,57	73,67	73,77	-
5	Skor Kabupaten Layak Anak	Scor	480	650	701	750	580
6	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja	Nilai	0	26,10	26,50	26,55	0
7	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja	Nilai	0	20,00	21,00	21,00	0
8	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja	Nilai	0	13,50	14,50	14,50	0
9	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal	Nilai	0	7,58	8,00	8,10	0
10	Nilai Komponen AKIP - Capaian Kinerja	Nilai	0	13,30	13,50	13,55	0
11	NILAI KOMPONEN AKIP	Nilai	0	0	0	0	0
12	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	Persen	0	90	90	90	0
13	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	Persen	0	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %	Persen	0	80	80	80	80
15	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	0	30	32	35	35
16	Prosentase Keterlibatan Perempuan di parlemen	persen	16	20	28	30	30
17	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Point	0.042	0.040	0.039	0.030	0,030
18	Prosentase Perkawinan Anak di Kabupaten Tapin	Persen		8,70	8,65	8,60	8,60
19	Prosentase Jumlah OPD yang mengakses data terpilah Gender	Persen	100	100	100	100	100
20	Prosentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA	persen	100	100	100	100	100
21	Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dibina	Persen	100	100	100	100	100
22	Persentase Perusahaan Sahabat Anak yang dibina	Persen		20	30	50	50
23	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Point	0.32	0.30	0.29	0.25	0,25
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
Dinas Ketahanan Pangan							
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,4	88	89	90	86,2
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,72	74	75	76	-
3	Persentase Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100
4	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	23,49	22,9	22,9	22,9	-
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	17,8	21,9	21,9	21,9	-
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	10,42	10,95	11,95	12,95	-
7	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Nilai	18,25	18,25	18,25	18,25	-
8	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Persentase Efisiensi Penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
10	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Insfrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan	%	100	100	100	-	100
12	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	-	100	100	100	100
13	Persentase kenaikan Konsumsi Bahan Pangan Non-Beras/Terigu	%	-	10	15	20	20
14	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
15	Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	%	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanian							
1	Persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terfasilitasi dan terinventarisasi.	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi	persentase (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah objek redistribusi tanah yang terealisasi	%	0	100	100	100	100
4	Persentase persil aset tanah pemda terukur, tersurvei, terpetakan yang telah diajukan proses sertifikasi ke BPN dan terverifikasi BPN.	Persentase (%)	24,31	100	100	100	100
5	Persentase penataan perencanaan tanah pemerintah daerah kabupaten / kota yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota	Persentase (%)	0	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
Dinas Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,58	65,04	65,06	65,09	65,25
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,60	73	75	78	-
3	Persentase keberhasilan aksi mitigasi perubahan iklim	Persen	92,2	92,5	92,5	92,5	0
4	Indeks Kualitas Udara	Poin	92,02	92,13	92,14	92,15	92,05

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Indeks Kualitas Air	Poin	52,80	56,16	56,20	56,24	56,84
6	Indeks Kualitas Lahan	Poin	29,50	30,19	30,21	30,23	30,09
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	50,51	53,00	55,00	57,00	-
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	21,6	21,9	22,5	23,4	-
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	21	21,9	22,5	23,4	-
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	10,5	10,95	11,25	11,7	-
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Nilai	17,5	18,25	18,75	19,5	-
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	%	100	100	100	100	100
13	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	%	130,74	100	100	100	100
14	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	%	0	100	100	100	100
15	persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	%	65,71	100	100	100	100
16	persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
17	persentase dokumen lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah	%	0	100	100	100	100
18	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan.	%	74,29	100	100	100	100
19	Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti.	%	100	100	100	100	100
20	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.	%	0	100	100	100	100
21	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air	%	0	27,50	27,50	27,50	27,50
22	Persentase Titik Pantau Udara Yang Memenuhi Baku Mutu	%	0	87,5	87,5	87,5	87,5
23	Persentase Luasan Lahan yang Terpulihkan dari Kerusakan Lingkungan Hidup	%	0	2	4	6	6
24	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup	%	0	25	50	75	75

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Persentase Parameter Pengujian Air dan Udara yang Termasuk dalam Lingkup Akreditasi	%	61	80	85	85	85
26	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	%	0	7,5	7,5	7,5	7,5
27	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100
28	Persentase Usaha Kecil dan Menengah yang Menghasilkan Limbah B3 (bengkel) dapat Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan	%	0	62	65	70	70
29	Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara	%	88	100	100	100	100
30	Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	%	80	100	100	100	100
31	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	%	14.29	37,5	50	62	62
32	Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	%	14.29	37,5	50	62	62
33	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup	%	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
34	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan	%	90	75	75	75	75
35	Persentase Sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata	%	31,6	35	41	46	46
36	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
37	Persentase cakupan area pelayanan	%	66,67	83,33	91,67	100	100
38	Persentase volume sampah yang ditangani	%	55,64	71	70	70	70
39	Persentase volume sampah yang dikurangi	%	16,09	28	30	30	30
40	Persentase areal publik bebas sampah	%	80	100	100	100	100
41	persentase TPS zero sampah pada waktu tertentu (siang hari)	%	80	100	100	100	100
42	Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS3R, rumah kompos) yang beroperasi	%	80	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah	%	10	70	80	90	90
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	89,18	90	91	92	89,22
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	77,70	79,05	79,70	80,35	0
3	Persentase Kepemilikan KTP-EI	%	98,08	99,41	99,42	99,43	99,39
4	Persentase Kepemilikan KIA	%	67,08	70,13	70,14	70,15	71,64
5	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	52,52	56,25	56,50	57	57,21
6	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100
7	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	26,10	26.35	26.45	26.60	0
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	12.00	12.60	12.90	13.00	0
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.00	18.30	18.45	18.75	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	21.60	21.80	21.90	22.00	0
11	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat	Persen	100	100	100	100	100
12	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	Persen	100	100	100	100	100
14	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	Poin	89,23	90	91	92	92
15	IKM terhadap pelayanan akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan	Poin	89,21	90	91	92	92
16	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain	Persentase	100	100	100	100	100
17	Tingkat akurasi elemen data perorangan pada Kartu Keluarga	Persentase	95	95,15	95,20	95,25	95,25

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100
19	Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi pelayanan dokumen kependudukan	Persentase	0	7	10	12	12
20	Tingkat Penyajian Data Kependudukan	Persen	0	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
1	Indeks Desa Membangun	Point	0,6823	0,7350	0,7400	0,7450	0,7253
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	-	78.00	79.00	80.00	-
3	Persentase Desa Maju	Persen	20,63%	78,58%	79,37%	80,16%	76,61%
4	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	score	-	28,46	29,00	29,20	-
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	score	-	18,95	19,00	19,35	-
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	score	-	13,25	13,30	13,50	-
7	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	score	-	17,34	17,70	17,95	-
8	Rata - rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	%	100	100	100	100	100
9	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
10	Persentase ASN dengan capaian kinerja diatas 90%	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Desa yang dilakukan penataan wilayahnya	%	0	25	25	25	25
12	Persentase Peningkatan Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pihak ketiga	%	100	100	100	100	100
13	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Per Undang-Undangan	%	90	95	100	100	100
14	Persentase Bumdes yang Menghasilkan Laba	%	53	61	64	67	67
15	Persentase Kelompok Posyandu Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang aktif	%	100	90	90	90	90

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Persentase TP-PKK yang berkualitas	%	78	80	80	80	80
17	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	32	30	30	30	30
18	Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang kompeten	%	25	25	25	25	25
19	Persentase Bumdes Aktif	%	67	74	78	82	82
20	Persentase Desa yang memiliki Inovasi TTG	%	10	15	18	20	20
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
1	Persentase Keluarga Sejahtera	Persentase	79,58	80,78	81,18	81,59	79,98
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	0	82,55	83,69	84,53	0
3	TFR (Total Fertility Rate)	Rata - rata anak per Wanita	2,26	2,24	2,23	2,22	1,16
4	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Poin	0	26,12	26,2	26,28	0
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Poin	0	24,63	24,89	25	0
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Poin	0	12,8	13,5	13,95	0
7	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Poin	0	19,00	19,10	19,30	0
8	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat.	Persen	0	100	100	100	100
9	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persen	0	100	100	100	100
10	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persen	0	100	100	100	100
11	Persentase pemanfaatan data Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berkualitas yang tersedia	Persen	0	90	95	100	100
12	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	72,66	73,5	74	74,5	74,5
13	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet need)	Persen	14,01	9,98	8,98	8	8

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Persentase masyarakat yang tersentuh Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	60,49	90	95	100	100
15	Persentase Keluarga yang aktif dalam kelompok kegiatan	Persen	0	77	79	80	80
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
Dinas Perhubungan							
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	0	75.10	75.20	75.30	0
2	Rasio Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	11	5.5	6	6.5	6
3	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja	Score	0	28.10	28.20	28.30	0
4	Nilai Komponen AKIP Pelaporan Daerah	Score	0	11.20	11.30	11.40	0
5	Nilai Komponen AKIP Pencapaian Kinerja	Score	0	13.40	13.50	13.60	0
6	Nilai Komponen AKIP Pengukuran Kinerja	Score	0	19.20	19.30	19.40	0
7	Nilai Komponen AKIP Evaluasi Internal	Score	0	5.70	5.80	5.90	0
8	Persentase Ketertiban Lalu Lintas	Persen	101	80	85	90	102
9	Persentase Moda Transportasi yang Laik Jalan	Persen	21	9.5	10	10.5	16
10	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PERSEN	100	100	100	100	100
11	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	Persen	100	100	100	100	100
12	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan	Persen	100	58	64	67	67
14	Persentase sosialisasi	Persen	100	100	100	100	100
15	Persentase razia	Persen	100	100	100	100	100
16	Persentase pengamanan dan pengaturan lalu lintas	Persen	102	79	84	90	90

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Persentase fasilitas perhubungan yang laik fungsi	Persen	100	100	100	100	100
18	Persentase pelabuhan/dermaga yang sesuai standar	PERSEN	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
Dinas Komunikasi Dan Informatika							
1	Indeks SPBE	Nilai	1.89	3.10	3.30	3.50	2.29
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	70.15	73.00	74.00	75.00	0
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	58.3	75	85	100	58.3
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	20.4	50	60	70	20.4
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	61.8	70	75	80	61.76
7	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	21.60	22.35	22.60	22.85	0
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10.95	11.15	11.40	11.65	0
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	13.00	14.15	14.40	14.65	0
10	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24.60	25.35	25.60	25.85	0
11	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	%	105	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	%	100	90	90	95	100
15	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Terhadap Masyarakat	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Low Spot	%	37.3	50	60	70	70

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Persentase Layanan SPBE	%	83.33	93	98	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
Dinas Perindustrian							
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM)	%	2,16	2,70	2,75	2,80	2,40
2	Persentase UMKM binaan yang naik skala usaha	%	-	20,55	21,15	21,65	-
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,22	73,22	73,22	73,22	-
4	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh	%	1,3	1,13	1,15	1,16	0,95
5	Persentase Koperasi Sehat	%	10,74	21,73	22,82	27,17	12,39
6	Pertumbuhan UMKM baru	%	105,68	22,75	23,05	23,25	20,58
7	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	25,57	25,57	25,57	25,57	-
8	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	14,69	14,69	14,69	14,69	-
9	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	10,69	10,69	10,69	10,69	-
10	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Nilai	5,90	5,90	5,90	5,90	-
11	Nilai Komponen AKIP (Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi)	Nilai	16,38	16,38	16,38	16,38	-
12	Persentase Koperasi Sehat (1)	%	-	48,65	49,66	50,33	50,33
13	Persentase Koperasi Sehat (2)	%	0	100	100	100	100
14	Persentase Koperasi Sehat (3)	%	0	26,38	27,78	30,56	30,56
15	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	%	16,91	17,55	18,05	18,55	18,55
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase peningkatan investasi daerah	%	-30,13	5	5	5	11,91
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	73,25	69	70	71	66,15
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	86,57	87	87,5	88	86,68
4	Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	Rp	904,43	568	596	626	1.012,15
5	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	Score	27,43	24,00	24,50	25,00	23,70
6	Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan	Poin	86,57	87	87,5	88	86,68
7	Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	Score	18,75	21,50	22,00	22,50	21,00
8	Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	Score	11,14	11,50	12,00	12,50	10,95
9	Nilai Komponen AKIP (evaluasi internal)	Score	2,59	11,00	11,50	12,00	10,50
10	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	0	100	100	100	100
11	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	%	0	100	100	100	100
12	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	0	100	100	100	100
13	Persentase Hasil Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	0	100	100	100	100
14	Persentase MOU Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan perusahaan yg terfasilitasi	%	0	100	100	100	100
15	Persentase deregulasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Fasilitasi Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	%	0	100	100	100	100
17	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	0	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	%	0	100	100	100	100
19	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	%	96	100	100	100	100
20	Persentase informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid	%	0	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
Dinas Pemuda Dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	2,08	2,24	2,3	2,36	0
2	Persentase peningkatan prestasi olahraga	persen	12,51	21,05	21,73	25	12,51
3	Nilai Sakip Perangkat daerah	Nilai	70	72	73	74	70
4	Pertumbuhan wirausaha muda	persen	1,82	1,88	1,90	1,92	0
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	2,34	2,6	2,7	2,8	0
6	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	persen	14,54	23	28	35	16,36
7	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	20	20	20	20	20
8	Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai	20	20	20	20	20
9	Nilai Pelaporan Kinerja	Nilai	20	20	20	20	20
10	Nilai Evaluasi Internal	Nilai	10	12	13	14	10
11	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	persen	100	100	100	100	100
12	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	persen	100	100	100	100	100
13	Rata-rata capaian kinerja sekretariat	persen	100	100	100	100	100
14	Persentase peningkatan pemuda yang mendaftar sebagai calon Wirausaha Muda	persen	0	20	23,07	23,52	23,52
15	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	persen	80,95	86,36	90,90	95,45	95,45
16	Persentase induk organisasi olahraga tradisional dan rekreasi, dan cabang olahraga khusus yang memperoleh prestasi tingkat provinsi	persen	63	75	80	84,27	84,27
17	Persentase Cabang Olahraga yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi	persen	30	50	60	70	70
18	Persentase Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	persen	0	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
Dinas Komunikasi Dan Informatika							
1	Persentase Data Statistik Yang Disediakan	%	100	90	95	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
Dinas Komunikasi Dan Informatika							
1	Persentase Layanan Informasi Yang Diamankan	%	7.6	30	40	50	50
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata							
1	Kontribusi Usaha Pariwisata terhadap PAD	%	2,57	2,59	3,0	3,1	1,92
2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	29,87	32	33	35	30,00
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,10	76,75	77	77,50	0
4	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	25,22	4,0	4,5	5,0	10
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam	-	3 jam 50 menit	3 jam 55 menit	4 jam	3 jam 40 menit
6	Rata-rata belanja wisatawan	Rp	-	578.000	579.000	580.000	566.758
7	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	48,63	73	74	75	68,21
8	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) /situs yang dilindungi	%	11,11	13	14	15	12
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	22,69	22,75	22,77	20,80	-
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	14,88	15,25	15,50	15,75	-
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	11,15	12,30	12,35	12,40	-
12	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerj	score	27,38	27,42	27,50	27,75	0

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90	%	86,95	100	100	100	100
16	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	%	41,7	43	45	48	48
17	Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilindungi	%	28,75	43	45	48	48
18	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	%	24,13	48	50	52	52
19	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif.	%	88,57	43	45	48	48
20	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik	%	100	78	80	85	85
21	Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik.	%	0	78	80	85	85
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan							
1	Persentase Dokumen Yang Telah Diarsipkan Dengan Baik	Persen	10,62	11,05	11,26	11,47	10,73
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	score	82,26	82,75	82,85	83,00	-
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Point	27,1467	39,87	40,25	40,64	33,52
4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Point	Belum ada survei	53	54	55	49,0175
5	Persentase Peningkatan SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan Sesuai NSPK	Persen	4,16	3,70	3,57	3,44	4
6	Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	score	12,57	12,75	12,85	13,10	-
7	Nilai Komponen AKIP (evaluasi internal)	score	8,14	17,25	18,00	19,25	-
8	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	score	27,43	27,65	27,85	28,00	-
9	Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	score	20,00	21,60	22,20	23,50	-

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	persen	109	100	100	100	100
11	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90 %	persen	100	95	95	95	95
12	Rata-rata Capaian kinerja sekretariat	persen	95	90	90	90	90
13	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Berstandar Nasional Perpustakaan	persen	3,52	5,88	7,05	8,23	8,23
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perpustakaan	poin	85,22	85,30	85,35	85,45	85,45
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan							
1	Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis/statis SKPD	persen	50	25	20	16,67	16,67
2	Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis/statis SKPD.	persen	50	25	20	16,67	16,67
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							
Dinas Perikanan							
1	LPE subkategori perikanan	%	1,9	1,86	1,89	1,92	1,8
2	Meningkatnya nilai LAKIP	nilai	81,60	85	85	85	85
3	Persentase capaian produksi perikanan	%	95,83	100	100	100	43,11
4	Nilai komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	skor	28,33	29	29	29	-
5	Nilai komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	skor	19,6	23	23	23	-
6	Nilai komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	skor	12,04	15	15	15	-
7	Nilai komponen AKIP (PEvaluasi Internal)	skor	6,92	7,2	7,2	7,2	-
8	Nilai komponen AKIP (Capaian Kinerja)	skor	15,25	15,8	15,8	15,8	-

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	91,96	100	100	100	100
10	Persentase produksi perikanan tangkap	%	98,21	100	100	100	100
11	Persentase produksi perikanan budidaya	%	97,95	100	100	100	100
12	Terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan	%	98,95	100	100	100	100
13	Terlaksananya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	84,77	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata							
1	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik	%	66,03	55	60	70	70
2	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	%	18,86	45	48	50	50
3	Persentase Calender Of Event Pariwisata yang terlaksana	%	0	55	60	65	65
4	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	%	0	2,6	2,7	2,8	2,8
5	Persentase Kelompok Sadar Wisata yang aktif	%	39,13	45	50	55	55
6	Pertumbuhan Pelaku Usaha Pariwisata.	%	0	2,6	2,7	2,8	2,8
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
Dinas Pertanian							
1	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	poin	-1,57	0,1	0,1	0,1	0,08
2	Nilai Sakip	Score	70,90	82,00	83,00	0	80,00
3	Jumlah Produksi Padi	Ton	424.249	192.070	196.869	201.790	422.577
4	Jumlah Produksi jagung	Ton	8.024	1.032	1.048	1.070	1.273
5	Jumlah Produksi Cabai Rawit Hiyung	Ton	1.394	1.432	1.442	1.452	1.412

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Jumlah Produksi Jahe	Ton	668	525	540	555	495
7	Jumlah Produksi Jeruk	Ton	25.965	16.654	16.704	16.754	16.554
8	Jumlah Produksi karet	Ton	8.141	9.088	9.097	9.106	9.034
9	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	58.343	56.153	57.276	58.422	58.388
10	Jumlah Produksi Daging	Ton	6.892	5.295	5.300	5.305	5.275
11	Jumlah Produksi Telur	Ton	7.594	7.185	7.210	7.250	7.037
12	Persentase petani yang menerapkan teknologi Pertanian	Persen	-	83,55	83,60	83,65	-
13	Persentase pemenuhan sarana prasarana pertanian	Persen	-	40,11	40,98	41,87	-
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	82,19	81,00	82,00	83,00	70,60
15	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	0	24,25	24,50	24,75	21,60
16	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	0	23,25	23,50	23,75	21,00
17	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	0	13,25	13,50	13,75	10,50
18	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	0	20,25	20,50	20,75	17,50
19	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (1)	persen	100	100	100	100	100
20	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	persen	0	100	100	100	100
21	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	persen	0	100	100	100	100
22	Produktivitas Tanaman Karet	Kg/Ha	662	662,51	662,89	663,26	663,26
23	Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit	Kg Tbs /Ha	1,068	1,102	1,118	1,135	1,135
24	Produktivitas Cabe Rawit hiyung	Ku/Ha	90	68,17	68,85	69,54	69,54
25	Produktivitas Jahe	Ku/Ha	133	94	96	98	98

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Produktivitas Jeruk (Ku/ha)	Ku/Ha	248,06	241	244	247	247
27	Luas Tanaman Karet	Ha	12.850	13565	13690	13815	13815
28	Luas Panen Jeruk	Ha	740	709	711	714	2134
29	Luas Panen Padi	Ton	87.462	37.477	38.376	39.297	115.150
30	Luas Panen Jagung	Ton	542	199	202	206	607
31	Produktivitas Padi	Ku/Ha	50,55	51,85	51,9	52,00	51,35
32	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	51,37	51,85	51,9	52,00	52,00
33	Persentase RMU yang menghasilkan Beras dengan mutu baik	Persen	1	1	1	1	3
34	Jumlah Kemitraan Pemasaran yang dibentuk (MoU)	Persen	1	1	1	1	1
35	Luas Panen Cabe Rawit hiyung (Ha)	Ha	202	190	192	194	576
36	Luas Panen Jahe	Ha	70	61	64	67	192
37	Luas Tanaman Kelapa Sawit	Ha	11.688	12.491	12.541	12.591	12591
38	Persentase UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) kategori baik	persen	4,5	5,5	6	6,6	6,6
39	Populasi kambing	ekor	5496	5.903	6.091	6.260	23939
40	Populasi Sapi	ekor	8663	9.339	9.712	10.116	38041
41	Populasi Unggas	ekor	3061120	3.113.812	3.157.933	3.169.754	12533610
42	Angka konsumsi daging per kapita	Kg/Kapita/Th	4	4,20	4,30	4,40	4,40
43	Persentase lahan fungsional yang dimanfaatkan	Persen	0	119,22	122,09	125,02	125,02
44	Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	Persen	7,17	6,02	5,88	5,74	5,74
45	Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	Persen	1,5	1,28	1,25	1,22	1,22

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Persentase Usulan Pupuk bersubsidi yang disetujui pusat	Persen	46,42	80	80	80	80
47	Persentase usulan Pembiayaan dan Investasi yang di setujui	Persen	0	100	100	100	100
48	Persentase lahan sawah fungsional yang terairi	persen	32,37	33,93	34,71	35,49	35,49
49	Persentase penyakit hewan yg tertangani	Persen	100	100	100	100	100
50	Persentase Hewan Ternak Bebas Penyakit (%)	Persen	100	100	100	100	100
51	Persentase Intensitas Serangan OPT Tanaman Pangan	Persen	0	2,5	2,5	2,5	2,5
52	Persentase Intensitas Serangan OPT Hortikultura	Persen	0	1,5	1,5	1,5	1,5
53	Persentase Intensitas Serangan OPT Perkebunan	Persen	3	2,5	2,5	2,5	2,5
54	Persentase Perijinan yang dipenuhi	persen	0	100	100	100	100
55	Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis	Persen	59,68	63,75	70	100	100
56	Persentase Kelas kelompok tani Lanjut	Persen	62,5	76,98	80,87	84,76	84,76
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral							
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
Dinas Perdagangan							
1	Pertumbuhan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	2.74	0.5	0.5	0.5	1.51
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73.36	86	92	97	-
3	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4	6.22	6.5	6.7	4.15
4	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Skor	28.23	29	29.5	30	-
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	16.88	20	22	24	0

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	13,56	16	17	18	0
7	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Skor	1,94	5	6	7	0
8	Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)	Skor	13	16	17	18	0
9	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
10	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	%	100	100	100	100	100
11	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Izin Usaha	%	65,27	80	90	100	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	IKM	76,7	78	79	80	80
14	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	%	80,56	85	86	87	87
15	Persentase penerimaan retribusi pasar	%	94,51	100	100	100	100
16	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	%	0,54	1	1	1	1
17	Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina	%	0	20	20	20	20
18	Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah	%	10	15	18	20	20
19	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	%	55,71	70	70	75	75
20	Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	%	100	100	100	100	100
21	Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif	%	0	15,56	17,31	18,03	18,03
22	Pertumbuhan Jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah	%	10	20	22,5	25	25
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
Dinas Perindustrian							
1	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	%	0	80	80	80	80

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90%	%	0	80	80	80	80
3	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	%	0,55	0,66	0,67	0,68	0,68
4	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	%	0,5	0,67	0,68	0,69	0,69
5	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	%	5,13	4,01	4,05	4,07	4,07
6	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	%	4,42	2,55	2,65	2,69	2,69
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi							
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
Sekretariat Daerah							
Sekretariat Daerah							
1	Tingkat Inflasi	Persen	2,55%	2,5%	2,5%	2,5%	0,40%
2	Persentase Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase rumusan kebijakan pengendalian harga pangan pokok yang dilaksanakan	persen	100%	100%	100%	100%	90%
4	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	persen	0	100%	100%	100%	0
5	Persentase pelaksanaan urusan administrasi umum yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	persen	0	100%	100%	100%	0
6	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	persen	0	100%	100%	100%	0
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	93,75	93,85	93,90	94	94
8	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	Indeks	88,48	90,2	91,1	92	92
9	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks	88,94	90,2	91,1	92	92
10	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100
11	Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	Persen	35	67	71	77,7	35

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Persentase SKPD yg melaksanakan penataan kelembagaan sesuai standar	Persen	15,6	26,7	33,3	37,8	15,6
13	Persentase SKPD dengan nilai kinerja pelayanan minimal 80	Persen	80	90	93	95	80
14	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik	Persen	84	100	100	100	84
15	Persentase SKPD dengan nilai RB SKPD berkategori baik	Persen	0	26,7	33	55,5	0
16	Presentase hasil rekomendasi lembaga keagamaan dan sosial masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kegiatan pembinaan mental	Indeks	84%	86%	87%	88%	88%
18	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100
19	persentase pelaksanaan pengadaan melalui sistem elektronik	persen	30	60	70	80	40
20	Persentase alternatif kebijakan pengendalian harga pangan pokok yang menjadi rekomendasi kebijakan	Persen	0	100%	100%	100%	100%
Sekretariat DPRD							
Sekretariat DPRD							
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	NILAI	87	92,5	93	93,5	91,2
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	0	78,35	79,25	80,65	0
3	Persentase Ranperda yang berhasil diselesaikan	persen	62.5	92	93	94	75
4	Persentase Pembahasan Anggaran yang terselesaikan	persen	0	92	93	94	0
5	Persentase Pengawasan DPRD yang berhasil diselesaikan	persen	0	92	93	94	0
6	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	0	24.85	25.00	25.12	0
7	Nilai Komponen SAKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	0	23.50	23.75	24.00	0
8	Nilai Komponen SAKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	0	11.00	11.25	11.50	0
9	Nilai Komponen SAKIP (Evaluasi Internal)	Score	0	19.00	19.25	20.00	0

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	PERSENTASE (%)	0	80	85	90	90
11	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	PERSENTASE (%)	0	80	80	80	80
12	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	PERSENTASE (%)	0	80	80	85	85
13	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	PERSENTASE (%)	0	100	100	100	100
14	Persentase Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	PERSENTASE (%)	75	100	100	100	100
15	Persentase Kegiatan DPRD yang terpublikasi & terdokumentasi	PERSENTASE (%)	0	90	90	90	90
16	Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang teakomodir	PERSENTASE (%)	0	80	90	90	90
17	Persentase fasilitasi kegiatan reses yang sesuai masa sidang	PERSENTASE (%)	100	100	100	100	100
18	Persentase pokok pikiran yang dinyatakan selaras dengan RPJMD	PERSENTASE (%)	0	100	100	100	100
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
Perencanaan							
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan							
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Score	7,2	7,75	8,10	8,20	6,56
2	Indeks Inovasi Daerah	Point	-	65	67	70	59
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	76,50	78.35	79.25	80.65	0
4	Persentase inovasi daerah yang memenuhi syarat IGA	Persen	-	100%	100%	100%	-
5	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	persen	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	Persen	93.64%	100%	100%	100%	124.27%
7	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Persen	116,68%	100%	100%	100%	93,59%
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24.60	24.85	25.00	25.15	-

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	23.25	23.50	23.75	24.00	-
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10.75	11.00	11.25	11.50	-
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.50	19.00	19.25	20.00	-
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persen	90	90	90	90	90
14	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persen	90	90	90	90	90
15	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persen	0	100	100	100	100
16	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	Persen	80	80	90	100	100
17	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
18	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Persen	90	90	90	90	90
19	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra konomi dan Infrastrukturyang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
20	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur	Persen	90	90	90	90	90
Keuangan							
Badan Keuangan Dan Aset Daerah							
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,53	100	100	100	-
3	Persentase anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	%	5,68	8	10	12	32,69
4	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
5	Tingkat Kepuasan Pelayanan Penerbitan SP2D	%	82,10	90	90	95	83,51
6	Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Penurunan temuan kesalahan tata kelola administrasi	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	%	97,42	100	100	100	98,08
9	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	27,31	30	30	30	27,31
10	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	19,06	30	30	30	19,06
11	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	12,04	15	15	15	12,04
12	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Nilai	7,56	25	25	25	7,56
13	Nilai Komponen AKIP (Pencapaian Kinerja)	Nilai	16,56	-	-	-	16,56
14	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (BKAD)	%	100	100	100	100	100
15	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	125.6	100	100	100	100
16	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	90	95	95	95	95
17	Persentase KUA PPAS, Perda, dan Perbup APBD yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	%	91.66	100	100	100	100
18	Persentase Pencairan Dana SKPD	%	100	100	100	100	100
19	Persentase kejadian komplain yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
20	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100
21	Persentase Penatausahaan barang milik daerah Pemkab Tapin	%	97.43	100	100	100	100
22	Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	%	100	100	100	100	100
Badan Pendapatan Daerah							
1	Derajat Fiskal otonomi Daerah	Persen	8,45	8,50	8,50	8,50	9,93
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	77,30	75	75	75	-
3	Tingkat Pertumbuhan PAD	Persen	61,42	20	20	20	-39,46

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Skor	25.50	30	30	30	0
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Skor	24	30	30	30	0
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Skor	12.30	15	15	15	0
7	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Skor	15.50	25	25	25	0
8	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (bapenda)	Persen	100	100	100	100	100
9	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	Persen	90	95	95	95	95
10	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Persen	90	95	95	95	95
11	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	Persen	3,23	0,50	0,50	0,50	0,50
12	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Persen	-5,47	1,50	1,50	1,50	1,50
13	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	113,97	100	100	100	100
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	88,76	80	80	80	80
Kepegawaian							
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
1	Indeks Merit Sistem	Poin	0	50	55	60	0
2	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	40	60	70	80	42
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	81,92	82	82	82	81,92
4	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	Persentase	74	80	81	82	77.85
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	0	87	88	90	85,2
6	Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100
7	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Point	27,18	27,18	27,18	27,18	27,18

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Point	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56
9	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Point	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23
10	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Point	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14
11	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	85,2	87	89	90	90
12	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	Persen	100	100	100	100	100
14	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja diatas 90%	Persen	92	100	100	100	100
15	Persentase Keterisian Jabatan Struktural	Persen	100	100	100	100	100
16	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi	point	83	87	88	90	90
17	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Karier Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	point	83	87	88	90	90
18	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Point	83	87	88	90	90
Pendidikan Dan Pelatihan							
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
1	Persentase ASN yang telah Diklat Jabatan	Persen	73,29	80	85	90	90
Penelitian Dan Pengembangan							
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan							
1	Persentase inovasi daerah yang direplikasi	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
Inspektorat Daerah							

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Inspektorat							
1	Indeks Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,038	3,200	3,300	3,400	3,067
2	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	71	73	74	75	0
3	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2
4	Indeks Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko	0	3	3	3	2
5	Nilai komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	23	25	26	27	0
6	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	21	23	24	25	0
7	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10	12	13	14	0
8	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	16	18	19	20	0
9	Rata-rata capain kinerja kegiatan Sekretariat	Persentase	100	100	100	100	100
10	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	Nilai	80,3	82	83	84	84
11	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100
12	Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8
13	Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Level	3,65	3	3	3	3
Unsur Kewilayahan							
Kecamatan Administrasi							
Kecamatan Piani							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Point	86,73	87,20	87,50	87,75	86,96
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	72,55	74,45	76,35	76,42	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24,21	24,80	24,95	25,15	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	16,88	17,15	17,45	17,87	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	12,45	12,95	13,10	13,35	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	19,03	19,55	19,85	20,05	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat .	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Piani)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Piani)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Piani)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Piani)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Piani)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	82.17	86.9	87.0	87.1	82.22
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	70.35	70.47	70.53	70.59	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	25,05	25.07	25.08	25.09	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	14,69	14.73	14.75	14.77	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	11.99	12.03	12.05	12.07	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.62	18.64	18.65	18.66	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Tapin Selatan)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Tapin Selatan)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Selatan)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Selatan)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Tapin Selatan)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Benuang							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	87,50	89,05	89,10	89,15	88,79
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	72.77	72.87	72.93	72.97	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	Persen	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	Persen	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24.57	24.59	24.61	24.62	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19.06	19.09	19.11	19.12	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10.61	10.64	10.65	10.66	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.53	18.55	18.56	18.57	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat.	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%.	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Binuang).	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Binuang).	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Binuang).	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Binuang)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Binuang).	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	86,81	87,82	87,84	87,85	87,80
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	72,12	72,36	72,48	72,60	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24,57	24,63	24,66	24,69	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19,06	19,12	19,15	19,18	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10,34	10,40	10,43	10,46	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18,15	18,21	18,24	18,27	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat..	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%.	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik.	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B.	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan.	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan.	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	88.33	88.40	88.42	88.44	88.36
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	71.53	72.06	72.26	72.46	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	25.86	26.01	26.06	26.11	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	16.25	16.35	16.4	16.45	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	11.41	11.35	11.4	11.45	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.01	18.35	18.4	18.45	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat.	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Tapin Utara)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Tapin Utara)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Utara)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Tapin Utara)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Tapin Utara)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	86,7	90,05	90,10	90,15	87,69
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SCORE	63.93	68.35	69.85	71.1	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	persen	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	persen	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	score	24.63	25.1	25.3	25.7	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	score	17.5	19.5	20	20.5	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	score	7.91	9.5	10.25	10.5	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	score	13.89	14.25	14.3	14.4	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat.	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%.	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran.	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Bakarangan)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Bakarangan)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Bakarangan)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Bakarangan)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Bakarangan)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	81	86,81	86,82	86,83	83
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	63,22	68.46	70.03	71.2	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	024.17	25.01	25.36	25.83	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19.38	19.85	20.57	20.85	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10.78	11.75	12.03	12.13	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	8.89	11.85	12.07	12.39	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat,	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%,	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran,	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Candi Laras Selatan)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Candi Laras Selatan)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Selatan)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Selatan)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Candi Laras Selatan)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	81,7	84,25	84,50	85	83,39
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Score	68,59	67,25	67,50	67,75	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	26,55	26,65	26,70	26,75	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	15,94	15,96	15,97	15,98	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	11,23	11,27	11,29	11,31	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	0,88	0,92	0,94	0,96	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Candi Laras Utara)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Candi Laras Utara)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Utara)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Candi Laras Utara)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Candi Laras Utara)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	87,59	88,05	88,10	88,15	87,92
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	72.50	72.68	72.79	72.89	0
3	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24.57	24.59	24.61	24.63	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19.06	19.14	19.18	19.20	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10.34	10.38	10.41	10.45	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	18.53	18.57	18.59	18.61	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat .	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%.	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	poin	86,11	87,11	87,20	87,30	86,60
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	62,18	62,50	62,58	62,74	0
3	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Socre	25,80	25,88	25,90	25,94	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	12,50	12,58	12,60	12,64	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	9,88	9,96	9,98	10,02	0
11	Nilai Komponen AKIP (Capaian Kinerja)	Score	14,00	14,08	14,10	14,14	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat	%	0	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	0	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	0	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Salam Babaris)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Salam Babaris)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Salam Babaris)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Salam Babaris)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Salam Babaris)	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	87,09	87,50	87,50	87,60	87,22
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	63.22	68.46	70.03	71.2	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	24.17	25.01	25.36	25.83	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	19.38	19.85	20.57	20.85	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10.78	11.75	12.03	12.13	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	8.89	11.85	12.07	12.39	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Score	86,78	86,90	87,00	87,10	86,72
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	58,73	64,66	64,88	65,10	0
3	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	Score	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	Score	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Score	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	Score	100	100	100	100	100
7	presentasi desa dengan administrasi kependudukan yang baik	Score	100	100	100	100	100
8	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	25,53	26,15	26,16	26,17	0
9	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	18,13	19,10	19,20	19,30	0
10	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	10,88	13,50	13,60	13,70	0
11	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	4,19	5,91	5,92	5,93	0
12	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat.	%	100	100	100	100	100
13	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	100	100	100	100	100
14	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	100	100	100	100	100
15	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Lokpaikat)	%	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Lokpaikat)	%	100	100	100	100	100
17	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Lokpaikat)	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Lokpaikat)	%	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Lokpaikat)	%	100	100	100	100	100
Unsur Pemerintahan Umum							
Kesatuan Bangsa Dan Politik							
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							
1	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Persen	-	85	85	85	-

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Nilai SAKIP perangkat daerah	Score	-	72	73	75	-
3	Persentase masyarakat yang paham terhadap wawasan kebangsaan	persen	100	80	85	90	75
4	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	persen	100	82	83	85	75
5	Persentase ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan kab. Tapin	persen	54,24	63,5	64	65	62,6
6	Persentase antisipasi dan penanganan konflik yang diselesaikan	persen	66,67	100	100	100	100
7	Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	Score	-	21,75	22	23	-
8	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	Score	-	22,25	22,50	23	-
9	Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	Score	-	10,25	10,50	11	-
10	Nilai Komponen AKIP (evaluasi kinerja)	Score	-	17,75	18	18	-
11	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	persen	0	94	96	98	0
12	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	persen	0	100	100	100	0
13	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	Skor	0	96	97	98	0
14	Persentase peserta kegiatan yang paham wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila	Persen	0	80	85	85	90
15	Persentase peserta yang paham terhadap politik	Persen	0	83	85	90	90
16	Persentase ormas yg aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan	Persen	0	63,7	64	65	65
17	Persentase saran dan masukan kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti	Persen	0	80	85	85	90
18	Persentase Deteksi dini atas potensi kerawanan konflik yg diselesaikan	Persen	0	83	85	85	85



BAB IX

PENUTUP



Bab Penutup menguraikan pengoperasian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin agar mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapin yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin pada periode 2024-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapin, serta memerhatikan Rencana pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024. Selain itu juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2024-2026, penyusunan RKPDP Tahun 2024 berpedoman pada RPD tahun berkenaan (2024-2026), arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapin, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk keselarasan program pembangunan kabupaten dengan pembangunan provinsi. Selain itu juga menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi



kekosongan RKPD setelah RPD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tapin, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2024

Penyusunan RKPD 2024 menggunakan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yang akan diperkatakan pada minggu keempat bulan Maret 2023. Namun rancangan RPD sudah bisa dipakai untuk rancangan RKPD 2024, sambil menunggu dokumen RPD Kabupaten Tapin ditetapkan. RKPD Tahun 2024 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

2. RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026

RKPD tahun 2025 dan tahun 2026 akan disusun bersamaan dengan event Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyusunan RKPD 2025 dan 2026 selain mempedomani RPD Kabupaten Tapin 2024-2026, juga perlu memperhatikan rancangan RPJPD 2025-2045, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk keselarasan program pembangunan kabupaten dengan pembangunan provinsi. serta visi, misi dan program prioritas Kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024.

Pedoman transisi di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi/ peraturan atau kebijakan yang berlaku.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Kaidah pelaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata



kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026;
3. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
4. Pemerintah Kabupaten Tapin wajib menyebarluaskan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin pada masa yang akan datang.

BUPATI TAPIN,

H.M. ARIFIN ARPAN